

ISSN: 02162792
E-ISSN: 2654427X



Volume 15
Nomor 2/2022

JURNAL PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Terakreditasi Kemenristek/BRIN Nomor: 85/M/KPT/2020

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2022

Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan (JPKP) Edisi Kedua Volume 15 tahun 2022 ini berisikan 6 (enam) artikel dengan topik beragam di bidang pendidikan. Enam topik tersebut antara lain mengenai pembelajaran Biologi SMA/MA di Jabodetabek ditinjau dari Standar Proses, relevansi kurikulum jurusan Pendidikan Teknik Bangunan UNJ terhadap kompetensi program keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK, peran SMK pada perkembangan pasar tenaga kerja di Indonesia, kemampuan penting abad 21 dan pemetaannya di sekolah dalam menghadapi Asesmen Nasional, permasalahan pengelolaan guru honorer pada jenjang pendidikan dasar, dan peran orang tua dalam mencegah perilaku menyimpang pada anak melalui penguatan karakter dan optimalisasi potensi anak.

Artikel pertama tentang pembelajaran Biologi SMA/MA di Jabodetabek ditinjau dari Standar Proses ditulis oleh Dina Rahma Fadlilah dan Yanti Herlanti. Implementasi Standar Proses yang baik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Dalam Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses, disebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Pembelajaran yang demikian sebenarnya sudah mulai diinisiasi dalam Kurikulum 2013 melalui pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Pelaksanaan Standar Proses yang telah berjalan baik dari Kurikulum 2013 layak dipertahankan pada Kurikulum Merdeka, karena masih sejalan dengan tujuan kurikulum yang baru. Adapun kekurangan yang ditemukan pada penelitian ini dapat menjadi masukan agar implementasi Kurikulum Merdeka menjadi lebih baik.

Artikel kedua berjudul Relevansi Kurikulum Pendidikan Teknik Bangunan UNJ terhadap Kompetensi SMK Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan ditulis oleh Febby Fraharyani, dkk. Objek penelitian ini yaitu dokumen Kurikulum Merdeka, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, dan dokumen Capaian Pembelajaran Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UNJ sangat relevan terhadap kompetensi SMK Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan pada Kurikulum Merdeka, dengan hasil keterkaitan sebesar 80,77%.

Artikel ketiga tentang Sinkronisasi Pasar Tenaga Kerja: Analisis Peran SMK pada Perkembangan Pasar Tenaga Kerja di Indonesia ditulis oleh Goldy Dharmawan dan Wisnu Harto Adi Wijoyo. Penelitian ini mengukur efisiensi distribusi sekolah kejuruan melalui pola permintaan-penawaran lulusan SMK di tingkat nasional dan daerah di Indonesia dengan indikator lapangan kerja, status setengah pengangguran, dan tingkat upah. Dengan menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional Indonesia (Sakernas) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang lulusan SMK untuk mendapatkan pekerjaan umumnya lebih baik dibandingkan lulusan SMA, namun dengan tingkat upah yang lebih rendah. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mengkaji kembali program studi apa yang dibutuhkan di daerah tertentu serta memberikan alternatif untuk mengikuti pelatihan kerja sebagai strategi untuk mendongkrak tingkat upah pekerja.

Artikel keempat tentang Permasalahan Pengelolaan Guru Honorer pada Jenjang Pendidikan Dasar ditulis oleh Simon Sili Sabon. Analisis terhadap guru honorer dilakukan terkait: (i) perencanaan kebutuhan, (ii) proses rekrutmen, (iii) pengembangan karier, serta (iv) kompetensi, kinerja, dan kesejahteraan. Rekomendasi yang diusulkan berdasarkan hasil analisis terutama berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru honorer, pemerataan kesempatan dalam peningkatan kompetensi, serta pemenuhan hak guru honorer.

Artikel kelima berjudul Literasi Informasi: Kemampuan Penting Abad 21 dan Pemetaannya di Sekolah dalam Menghadapi Asesmen Nasional ditulis oleh Zainul Mustofa. Penelitian ini melihat bagaimana profil awal literasi informasi siswa di era global sebagai persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa masuk dalam kategori “perlu intervensi khusus” (62,9%) dengan rata-rata kemampuan literasi informasi berada di nilai 34,4. Penelitian juga menyimpulkan bahwa para siswa lebih menggunakan anggapan atau intuisinya daripada mengelola informasi yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas literasi siswa dalam bentuk peningkatan fasilitas, program, dan evaluasi terhadap Gerakan Literasi Sekolah.

Artikel terakhir tentang Peran Orang Tua dalam Mencegah Perilaku Menyimpang pada Anak dengan Penguatan Karakter dan Optimalisasi Potensi Anak ditulis oleh Yeni Mulati. Indonesia diprediksi memiliki potensi bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040, namun pada saat yang sama kasus kenakalan remaja dan perilaku menyimpang juga masih menjadi permasalahan. Orang tua sebagai agen penting dalam pembentukan karakter anak diharapkan dapat berperan dalam membantu remaja memenuhi tugas-tugas perkembangannya; memahami psikologi remaja; menjadi *role model* yang baik untuk remaja, serta mengembangkan 3 dimensi karakter, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*; dan menerapkan pola asuh yang tepat sesuai kebutuhan anak. Untuk mengoptimalkan potensi anak, orang tua dapat menerapkan pendidikan di dalam rumah dengan pendekatan kecerdasan majemuk.

Semoga apa yang disajikan dalam jurnal edisi kedua ini dapat menjadi referensi dan rujukan, terutama bagi para praktisi dan pemerhati dunia pendidikan, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan.

Jakarta, Februari 2023

JURNAL PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Volume 15 Nomor 2/2022

Daftar isi

1. Analisis Pembelajaran Biologi SMA/MA di Jabodetabek
Ditinjau dari Standar Proses
Dina Rahma Fadlilah dan Yanti Herlanti67
2. Relevansi Kurikulum Pendidikan Teknik Bangunan UNJ terhadap Kompetensi
SMK Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
Febby Fraharyani, dkk87
3. Sinkronisasi Pasar Tenaga Kerja: Analisis Peran SMK pada Perkembangan Pasar
Tenaga Kerja di Indonesia
Goldy Dharmawan dan Wisnu Harto Adi Wijoyo97
4. Literasi Informasi: Kemampuan Penting Abad 21 dan Pemetaannya di Sekolah
dalam Menghadapi Asesmen Nasional
Zainul Mustofa109
5. Permasalahan Pengelolaan Guru Honorer pada Jenjang Pendidikan Dasar
Simon Sili Sabon119
6. Peran Orang Tua dalam Mencegah Perilaku Menyimpang pada Anak dengan
Penguatan Karakter dan Optimalisasi Potensi Anak
Yeni Mulati135

ABSTRACT

A good implementation of Process Standard is a part of the effort to improve the quality of learning process. In Permendikbudristek No. 16 of 2022 regarding Process Standard, it is stated that learning is done in an interactive, inspiring, enjoyable, challenging and motivating environment for students. This type of learning had actually been initiated in the 2013 Curriculum through a scientific approach which proposes several learning models, namely discovery/inquiry learning and problem-based learning; such as problem-based learning (PBL) and project-based learning (PjBL). Therefore, this study aims to analyze the scientific approach in Biology learning as an implementation of Process Standard in Jakartan High Schools. Furthermore, this study used quantitative and qualitative methods as its approach. It found that teachers had implemented the scientific approach in their classrooms. However, results from students' perceptions showed the opposite. They stated that teachers did not effectively do "hands-on" activities through discovery/inquiry and PjBL. Moreover, this study suggests that the implementation of the Process Standard that have been effectively applied since the 2013 Curriculum needs to be maintained in Kurikulum Merdeka (in English: Emancipated Curriculum) because it is still relevant with the goals of Emancipated Curriculum. Finally, the findings of this study should be addressed so it can improve the implementation of Process Standard in the Emancipated Curriculum.

key words: curriculum implementation, biology learning, problem based learning, project-based learning, process standards.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan saintifik sebagai implementasi Standar Proses pada pembelajaran Biologi. Implementasi Standar Proses yang baik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Dalam Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses, disebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Pembelajaran yang demikian sebetulnya mulai diinisiasi dalam Kurikulum 2013 melalui pendekatan saintifik yang menyarankan beberapa model pembelajaran, yaitu *discovery/inquiry learning* dan pembelajaran berbasis masalah, meliputi *problem-based learning* (PBL) dan *project-based learning* (PjBL). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditunjukkan bahwa implementasi pendekatan saintifik telah dilaksanakan oleh para guru di kelas. Namun, persepsi peserta didik menunjukkan hasil sebaliknya, di mana guru masih kurang menerapkan aktivitas secara "hands on" melalui pendekatan saintifik. Pelaksanaan Standar Proses yang telah berjalan baik dari Kurikulum 2013 layak dipertahankan pada Kurikulum Merdeka, karena masih sejalan dengan tujuan kurikulum yang baru. Diharapkan kekurangan yang ditemukan pada penelitian ini dapat diatasi sehingga implementasi pada Kurikulum Merdeka dapat lebih baik lagi.

kata kunci: implementasi kurikulum, pembelajaran biologi, *problem-based learning*, *project-based learning*, standar proses.

PENDAHULUAN

Kurikulum di Indonesia dirancang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan, di antaranya yaitu globalisasi (WTO, ASEAN *Community*, APEC, CAFTA), masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, ekonomi berbasis pengetahuan, konvergensi ilmu dan teknologi, kebangkitan industri kreatif, pergeseran ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknoains, serta materi TIMSS dan PISA. Selain itu, kurikulum juga dirancang untuk memberdayakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, dan menyiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia (Kemendikbud, 2014). Dengan rancangan seperti itu, diharapkan peserta didik di Indonesia memiliki daya saing dalam arus globalisasi, yakni lebih produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi (Asri, 2017).

Standar Proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Sejak diterapkannya kurikulum yang didasarkan pada keterampilan abad 21, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Sekolah Penggerak hingga Kurikulum Merdeka, Standar Proses mengalami dinamika. Awalnya, Standar Proses Kurikulum 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 65 Tahun 2013. Namun, di tahun 2016, peraturan mengenai Standar Proses pendidikan dasar dan menengah diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses. Selanjutnya, pada masa sekarang, Standar Proses pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 16 Tahun 2022.

Walaupun terjadi perubahan Peraturan Menteri yang cukup dinamis, filosofi kurikulum tetap sama, yaitu kurikulum sebagai praksis kontekstual. Adapun makna kurikulum sebagai praksis kontekstual adalah kurikulum sebagai komitmen bersama, sebagai dasar menyepakati kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan, menggunakan pendekatan sistem dari materi ke proses ke produk, penguasaan materi pelajaran diperoleh melalui siklus aksi refleksi berkelanjutan, pendekatan pembelajaran bersifat interdisipliner dan kontekstual dengan sekitarnya (Kemendikbud, 2014).

Pada praktiknya, penelitian Rakhmawati di 2016

menunjukkan bahwa berdasarkan Standar Proses sesuai Permendikbud No. 65 tahun 2013, pembelajaran Biologi sudah dilaksanakan dengan baik. Penelitian Albirron, dkk. (2019) juga mengungkapkan bahwa jika ditinjau dari interaksi pembelajaran, penerapan Standar Proses melalui pola pembelajaran *student centered* (aktifnya peserta didik) telah berhasil (Albirron, dkk., 2019).

Namun, Aruman (2019) mengungkapkan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada mata pelajaran peminatan MIPA di SMA Negeri 1 Muara Pinang, guru masih perlu diberikan pemenuhan media atau sumber belajar oleh pihak sekolah (Aruman, dkk., 2019). Hal ini menunjukkan, amanah Standar Proses yang berupa penggunaan ragam sumber belajar belum diimplementasikan. Masalah lain juga ditemukan oleh Chairunnisa, dkk. (2020), yaitu ketidaksesuaian tahap uraian rangkaian kegiatan pembelajaran, penilaian yang tidak dilaksanakan sepenuhnya serta kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas yang tidak dilakukan.

Fakta-fakta pada praktik implementasi Standar Proses di atas menunjukkan alasan-alasan dinamisnya implementasi Standar Proses itu sendiri. Pengembangan Standar Proses terus dilakukan agar dapat memfasilitasi pencapaian kompetensi peserta didik agar lebih baik lagi. Selain itu, perubahan yang dilakukan juga semakin menyesuaikan/beradaptasi dengan kondisi satuan pendidikan dan perkembangan IPTEK. Misalnya, seperti yang telah disampaikan pada awal pendahuluan, saat ini terdapat Standar Proses baru, yaitu Standar Proses Permendikbud No. 16 Tahun 2022. Perbedaan Standar Proses ini dengan Standar Proses sebelumnya yaitu Standar Proses ini disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka, sedangkan Standar Proses sebelumnya disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Standar Proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar Proses meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran pada Permendikbud tentang Standar Proses No. 16 Tahun 2022 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana. Hal ini merupakan hal yang

berbeda dari Standar Proses sebelumnya (Mendikbudristek, 2022).

Pada pelaksanaan pembelajaran, kaidah proses pembelajaran pada Standar Proses No. 16 Tahun 2022 tidak berbeda dengan Standar Proses sebelumnya. Adapun hal tersebut adalah pendekatan pembelajaran yang digunakan bukan lagi pendekatan tekstual, melainkan pendekatan saintifik (sistematis), yang mengarahkan peserta didik untuk mencari tahu (*student centered*), pembelajaran dengan penelitian dan berbasis masalah (menantang). Terlebih lagi, pada Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022, pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Pembelajaran yang memiliki karakteristik tersebut di antaranya adalah pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif, *discovery/inquiry learning*, *project based learning*, serta *problem based learning* (Florentina & Leonard, 2017; Sufairoh, 2016).

Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang terdiri dari proses mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mencoba (*experimenting*), mengasosiasi (*associating*), dan mengkomunikasikan (*communicating*) (Fadlillah, 2014). Selanjutnya, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran di mana peserta didik belajar secara berkelompok. Dalam kerja kelompok tersebut, peserta didik memiliki tujuan yang sama, berbagi tugas dan tanggung jawab serta dievaluasi bersama (Riyanto, 2009).

Adapun pembelajaran *discovery/inquiry* adalah pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas peserta didik untuk mencari dan menemukan dengan maksimal. Pembelajaran *discovery/inquiry* bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental dengan cara mengenali, menganalisis, dan menemukan masalah serta memecahkan masalah dari suatu fenomena (Anam, 2016).

Sejalan dengan pembelajaran *discovery/inquiry*, pembelajaran berbasis masalah yang meliputi *project based learning* (PjBL) dan *problem based learning* (PBL) pun berorientasi pada pemecahan masalah (Fathurrohman, 2016; Sofyan, dkk., 2017). PjBL merupakan pembelajaran yang berbasis pada tugas berupa proyek, dikerjakan melalui penyelidikan untuk menghasilkan suatu produk guna memecahkan suatu masalah dari masalah yang telah ditentukan di awal pembelajaran (Fathurrohman, 2016; Musfiqon & Nurdyansyah, 2015; Widiasmoro, 2017). Sedangkan PBL adalah proses pembelajaran yang dimulai dengan masalah untuk membangun konsep pada peserta didik (Isrok'atun & Rosmala, 2018). Dalam PBL, peserta didik dituntut untuk membaca, menulis, menganalisis dan berpikir. Melalui pembelajaran dengan PBL, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri (Sofyan, dkk., 2017).

Walaupun demikian, peran pendidik dalam Standar Proses No. 16 tahun 2022 bagian pelaksanaan pembelajaran terdapat perubahan, yaitu pendidik selain menjadi teladan, juga harus menjadi pendamping dan memfasilitasi, tidak hanya sebagai pemberi motivasi dan mengembangkan peserta didik seperti peran guru pada Standar Proses sebelumnya.

Selanjutnya, menurut Standar Proses No. 16 Tahun 2022, asesmen pembelajaran dilakukan dengan menekankan pada refleksi diri bersama sesama pendidik. Berbeda dari penilaian pada Standar Proses sebelumnya yang hanya menekankan pada refleksi diri terhadap peserta didik.

Biologi merupakan salah satu bagian ilmu yang dipelajari dalam bidang ilmu pengetahuan alam (IPA). Mata pelajaran Biologi dipelajari secara khusus di Sekolah Menengah Atas (SMA) (Permendikbud No. 37 Tahun 2018).

Mata pelajaran Biologi pada satuan pendidikan dasar dan menengah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang bertujuan untuk memperoleh kompetensi lanjutan dan budaya berpikir ilmiah secara analitis, kritis, kreatif dan mandiri (Surahman & Surjono, 2017). Materi yang dipelajari dalam Biologi berkaitan dengan fakta ilmiah serta fenomena alam yang konkret dan abstrak. Oleh karena itu, mempelajari biologi

idealnya adalah dengan proses ilmiah (sistematis). Dalam hal ini, proses ilmiah yang dimaksud yaitu mengamati, mengukur, menghitung, mengklasifikasi, memprediksi, mengontrol variabel, merumuskan masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, eksperimen, menarik kesimpulan, mengaplikasikan konsep pada situasi yang berbeda (Sudarisman, 2015).

Mengacu pada keterangan di atas, Standar Proses yang dikembangkan, sangat relevan dengan mata pelajaran Biologi, khususnya pada bagian pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, bagian ini merupakan bagian Standar Proses yang cukup stabil dibanding dengan bagian Standar Proses lainnya (perencanaan dan penilaian). Oleh karena itu, proses pembelajaran Biologi seyogianya dapat berjalan dengan sangat baik dan kompetensi yang diharapkan pada peserta didik dapat tercapai. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ismail dan Hasan (2022), pembelajaran yang dilakukan berdasarkan Standar Proses dapat membuat proses pembelajaran lebih terarah sehingga pemahaman peserta didik dapat meningkat (Ismail & Hasan, 2022).

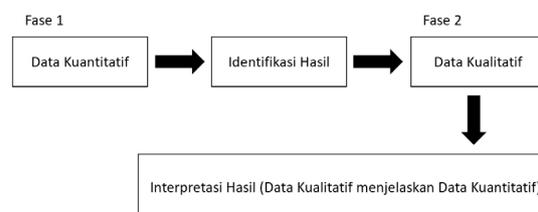
Berdasarkan fakta yang dikemukakan, di mana terdapat Standar Proses No. 16 Tahun 2022 dan bagian pelaksanaan pembelajaran merupakan bagian yang tidak berubah dari Standar Proses sebelumnya (hal baik yang diteruskan dari Standar Proses sebelumnya), maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembelajaran Biologi ditinjau dari Standar Proses (Bagian Pelaksanaan Pembelajaran). Adapun pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran kooperatif, *discovery/inquiry learning*, *project based learning*, dan *problem based learning*.

Selain itu, penelitian ini dilakukan pada wilayah Jabodetabek, karena Jabodetabek memiliki faktor pendukung untuk mengimplementasikan Standar Proses lebih baik, khususnya terkait dengan sarana dan prasarana di sekolah (Rahmadhani, 2020; Tanaga, 2018)

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bagi pembuat kebijakan untuk meninjau pelaksanaan pembelajaran yang dapat dipertahankan atau ditindaklanjuti lebih jauh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMA/MA wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi pada Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif (*mixed method*). Desain *mixed method* yang digunakan adalah *Explanatory Sequential Mixed Methods Design*. Peneliti melakukan dua fase penelitian, yaitu fase kuantitatif dan kualitatif. Kegiatan fase kuantitatif meliputi pengumpulan data kuantitatif (melalui angket), analisis data kuantitatif serta memperoleh hasil data kuantitatif. Adapun kegiatan yang termasuk fase kualitatif adalah pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan observasi dengan teknik VICS guna mendukung hasil penelitian fase kuantitatif (Creswell & Creswell, 2018).



Gambar 1. Desain Penelitian
Sumber: Creswell & Creswell, 2018

Sampel yang digunakan adalah 17 orang guru dan 532 orang peserta didik kelas XI MIPA pada sekolah sampel. Sampel sekolah dipilih dengan teknik *Stratified Random Sampling*, berdasarkan rata-rata hasil Ujian Nasional (UN) di SMA-MA Negeri Jabodetabek. Adapun pengelompokan sampel sekolah tersebut adalah SMA Negeri dengan rata-rata UN tinggi, selanjutnya disebut sebagai kelompok SMAN A; SMA Negeri dengan rata-rata UN sedang, selanjutnya disebut sebagai kelompok SMAN B; dan SMA Negeri dengan rata-rata UN rendah, selanjutnya disebut sebagai kelompok SMAN C; serta MAN, selanjutnya disebut sebagai kelompok MAN. Guru dan peserta didik dipilih sebagai sampel guna memperoleh data dari pelaku pembelajaran. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, yang menentukan arah pembelajaran termasuk pemilihan pendekatan dan model pembelajaran, sedangkan peserta didik sebagai objek pembelajar, yang menerima arahan proses pembelajaran dari guru.

Merujuk pada pendekatan dan desain penelitian yang digunakan, penelitian ini terbagi atas 2 fase kegiatan, yaitu:

1. Fase Kuantitatif

Teknik penelitian data yang digunakan pada fase kuantitatif adalah kuesioner/angket. Kuesioner dikembangkan untuk melihat proses pembelajaran berdasarkan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada Standar Proses, yaitu pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik, Model Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran *Discovery/Inquiry*, serta Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dan *Project Based Learning* (PjBL).

Untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel, sebelum diberikan kepada guru dan peserta didik di sekolah, instrumen diuji coba terlebih dahulu. Tabel 1 menunjukkan instrumen yang digunakan, teknik uji validasi dan subjek uji coba instrumen.

Tabel 1. Uji Coba Validitas Instrumen Penelitian

Kuesioner Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran	Instrumen yang Diuji	Teknik Validasi	Subjek
Pendekatan Saintifik	Kuesioner Guru	Validasi Empiris*	20 Mahasiswa semester 10 yang telah melakukan praktik mengajar (PPKT)
	Kuesioner Peserta Didik	Validasi Empiris*	45 peserta didik SMAN 8 Tangsel**
Model Pembelajaran Kooperatif/ Kolaboratif	Kuesioner Guru	Validasi Konstruktif	Ahli Bahasa dan Dosen
	Kuesioner Peserta Didik	Validasi Empiris*	35 peserta didik SMAN 1 Tangsel**
Model Pembelajaran <i>Discovery/Inquiry</i>	Kuesioner Guru	Validasi Konstruktif	Dosen
	Kuesioner Peserta Didik	Validasi Empiris*	40 peserta didik SMAN 8 Tangsel**

Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	Kuesioner Guru	Validasi Konstruktif	Dosen
	Kuesioner Peserta Didik	Validasi Empiris*	35 peserta didik SMAN 1 Tangsel**
Model Pembelajaran <i>Project Based Learning</i> (PjBL)	Kuesioner Guru	Validasi Konstruktif	Dosen
	Kuesioner Peserta Didik	Validasi Empiris*	35 peserta didik SMAN 1 Tangsel**

* Olah menggunakan SPSS; ** Tangerang Selatan

Hasil uji validitas yang menunjukkan butir pernyataan valid sebelum dan sesudah uji validasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Butir Pernyataan Kuesioner Guru dan Peserta Didik Sebelum dan Sesudah Uji Validasi

Kuesioner Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran	Jumlah Butir Kuesioner Guru		Jumlah Butir Kuesioner Peserta Didik	
	B*	S**	B*	S**
Pendekatan Saintifik	73	50	73	60
Model Pembelajaran Kooperatif/ Kolaboratif	34	32	32	26
	20	20	20	20
Model Pembelajaran <i>Discovery/Inquiry</i>	40	40	40	39
Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	35	35	35	31

Ket: *B=sebelum uji validasi; **S=sesudah uji validasi

Instrumen yang diuji validasi secara empiris kemudian diuji reliabilitasnya. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*. Berdasarkan teknik tersebut, kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan *reliable* bila koefisien reliabilitas (r_{11}) > 0,5. Uji reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan *IBM*

SPSS Statistics 24. Hasil uji reliabilitas instrumen angket, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa semua instrumen yang digunakan pada penelitian ini reliabel. Adapun instrumen yang reliabel tersebut adalah kuesioner guru dan peserta didik untuk mengukur implementasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik, kuesioner peserta didik untuk mengukur implementasi pembelajaran dengan model kooperatif/kolaboratif, *discovery/inquiry*, PBL dan PjBL.

Tabel 3. Hasil Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Kuesioner Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran	Instrumen yang diuji	R hitung	Ket
Pendekatan Saintifik	Kuesioner Guru	0,75	R
	Kuesioner Peserta Didik	0,75	R
Model Pembelajaran Kooperatif/ Kolaboratif	Kuesioner Peserta Didik	0,90	R
Model Pembelajaran <i>Discovery/Inquiry</i>	Kuesioner Peserta Didik	0,74	R
Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	Kuesioner Peserta Didik	0,75	R
Model Pembelajaran <i>Project Based Learning</i> (PjBL)	Kuesioner Peserta Didik	0,75	R

Ket: Keterangan; R: Reliabel

Setelah data kuantitatif dari kuesioner guru dan peserta didik diperoleh, kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Data kuantitatif dinilai dengan kriteria yang disajikan pada Tabel 4.

Selanjutnya, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi perbedaan implementasi Kurikulum 2013 berdasarkan Standar Proses Permendikbud No. 22 tahun 2016 antar kelompok sekolah (SMAN A, SMAN B, SMAN C, MAN). Teknik yang

digunakan pada pengujian hipotesis bergantung dari uji prasyarat data, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

Tabel 4. Kriteria Data Kuantitatif Penelitian (Arikunto, 2013)

Daftar Kuantitatif (Skor)	Kriteria
80-100	Baik Sekali
66-79	Baik
56-65	Cukup
40-55	Kurang
30-39	Kurang sekali

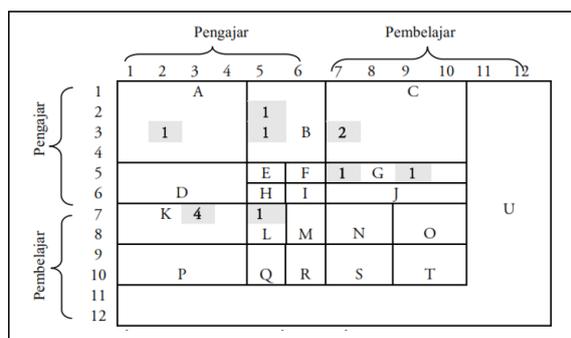
2. Fase Kualitatif

Setelah melakukan fase kuantitatif, maka berikutnya dilakukan fase kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data pada fase ini adalah wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Responden wawancara adalah 1 orang guru Biologi kelas XI (total 13 orang) dan 3 orang peserta didik kelas XI pada setiap sekolah sampel penelitian (total 39 orang). Pemilihan 3 orang peserta didik sebagai narasumber, menggunakan teknik standar 3 Gronlund \pm Standar Deviasi dari hasil kuesioner masing-masing peserta didik.

Selain wawancara, pada penelitian ini juga dilakukan observasi. Teknik observasi yang digunakan, yaitu *Verbal Interaction Category System* (VICS) yang dikembangkan oleh Amidon dan Hunter (Amidon & Hunter, 1968). Teknik VICS memperluas Sistem Flanders (1965) untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai interaksi komunikasi verbal antara guru dan peserta didik ketika berlangsungnya kegiatan pembelajaran (Amidon & Hunter, 1968). Oleh karena itu, data yang diperoleh adalah data interaksi komunikasi (percakapan) antara guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Data percakapan ini dikumpulkan melalui rekaman audio dan rekaman video visual.

Data kualitatif yang bersumber dari wawancara, dianalisis dengan reduksi data hasil wawancara. Sedangkan data hasil observasi dianalisis menggunakan Teknik VICS. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan teknik VICS antara lain adalah: 1) data yang diperoleh, yaitu interaksi komunikasi (percakapan) antara

guru dan peserta didik dari rekaman audio dan video visual, ditranskripsi menjadi bentuk teks. 2) Pemberian kode VICS pada teks transkripsi. 3) Memasangkan kode VICS yang telah diberikan. 4) Tabulasi pasangan kode VICS untuk dimasukkan ke dalam matriks VICS (Amidon & Hunter, 1968; Herlanti, 2014). Adapun matriks VICS dan makna dari matriks dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Matriks VICS

Sumber: Herlanti, 2014

Keterangan gambar 1:

1-12: kode VICS (Amidon & Hunter, 1968; Herlanti, 2014);
 A-U: wilayah pasangan kode VICS (Herlanti, 2014)
 Frekuensi A, B, D, E, F, H, I tinggi: guru dominan (*teacher center*); Frekuensi C, G, J, K, L, M, P, R tinggi: umpan balik antara guru dan peserta didik (interaksi dua arah); Frekuensi N, O, S, T tinggi: peserta didik dominan (*student center*) (Herlanti, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Data Kuantitatif

1. Data Guru

Data kuantitatif guru diperoleh dari pengisian kuesioner mengenai implementasi Standar Proses, khususnya terkait pendekatan saintifik, model pembelajaran kooperatif/kolaboratif, model pembelajaran *discovery/inquiry*, model pembelajaran *problem based learning* (PBL), dan model pembelajaran *project based learning* (PjBL). Hasil kuesioner disajikan pada Tabel 5.

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa, guru SMA/MA se-Jabodetabek sudah dengan baik mengimplementasikan pelaksanaan pembelajaran yang disarankan oleh Standar Proses, terutama pada implementasi pendekatan saintifik dengan model pembelajaran *problem based learning* (PBL). Kedua karakteristik

tersebut diimplementasikan sangat baik oleh para guru, ditunjukkan dengan rata-rata hasil kuesioner sebesar 80,63 dan 81,50, masing-masing untuk pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL.

Tabel 5. Hasil Kuesioner Guru Mengenai Implementasi Standar Proses pada Pembelajaran Biologi

Kuesioner Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran	Skor	Rata-Rata	SD	Ket
Pendekatan Saintifik	1370	80,63	7,43	BS
Model Pembelajaran Kooperatif/ Kolaboratif	1213,75	71,40	8,53	B
Model Pembelajaran <i>Discovery/Inquiry</i>	1264	74,35	7,26	B
Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	1385,5	81,5	7,64	BS

Pengolahan data kuesioner guru tentang implementasi Standar Proses pada Pembelajaran Biologi SMA/MA juga dilakukan pada setiap kelompok sekolah. Penyajian data tersebut disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bahwa pendekatan saintifik diimplementasikan dengan sangat baik oleh kelompok sekolah SMAN A yang memiliki rata-rata UN tinggi dan SMAN B yang memiliki rata-rata UN sedang. Selanjutnya, diketahui pula bahwa seluruh kelompok sekolah telah mengimplementasikan dengan baik model pembelajaran kooperatif/kolaboratif dan model pembelajaran *discovery/inquiry* pada pembelajaran Biologi SMA/MA se-Jabodetabek. Sedangkan Model pembelajaran PBL dengan sangat baik diimplementasikan oleh kelompok sekolah SMAN B. Selain itu, model pembelajaran PjBL diimplementasikan dengan sangat baik oleh kelompok sekolah MAN.

Tabel 6. Hasil Kuesioner Guru Mengenai Implementasi Standar Proses pada Pembelajaran Biologi per Kelompok Sekolah

Kuesioner Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran	Kel. Sekolah	Skor	Rata-Rata	SD	Ket
Pendekatan Saintifik	SMAN A	329,20	82,30	6,69	BS
	SMAN B	340,80	85,20	2,50	BS
	SMAN C	395,60	79,12	6,47	B
	MAN	305,20	76,30	11,29	B
Model Pembelajaran Kooperatif/Kolaboratif	SMAN A	279,38	69,84	4,46	B
	SMAN B	283,13	70,78	6,30	B
	SMAN C	363,13	72,63	8,12	B
	MAN	288,13	72,03	15,28	B
Model Pembelajaran <i>Discovery/Inquiry</i>	SMAN A	298,00	74,50	4,72	B
	SMAN B	312,00	78,00	9,12	B
	SMAN C	368,00	73,60	8,44	B
	MAN	286,00	71,50	7,14	B
Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	SMAN A	317,50	79,37	9,99	B
	SMAN B	320,00	80,00	11,67	BS
	SMAN C	318,00	79,50	12,86	B
	MAN	351,00	87,75	13,20	BS
Model Pembelajaran <i>Project Based Learning</i> (PjBL)	SMAN A	295,90	73,97	9,09	B
	SMAN B	312,50	78,12	8,68	B
	SMAN C	378,10	75,62	2,98	B
	MAN	360,50	90,12	10,31	BS

Kel.: Kelompok; Ket: Keterangan; BS: Baik Sekali; B: Baik

Secara statistik deskriptif, beberapa implementasi pelaksanaan pembelajaran oleh guru SMA/MA se-Jabodetabek berdasarkan Standar Proses, diketahui memiliki perbedaan kategori di beberapa kelompok sekolah seperti yang telah ditunjukkan pada Tabel 6.

Oleh karena itu, tahap analisis data dilanjutkan ke pengujian hipotesis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi perbedaan implementasi Standar Proses antarkelompok sekolah (SMAN A, SMAN B, SMAN C, MAN).

Sebelum uji hipotesis, uji prasyarat data yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas dilakukan terlebih dahulu. Uji normalitas yang digunakan pada data kuesioner guru

adalah Kolmogorov Smirnov, sedangkan uji homogenitasnya adalah uji Levine. Hasil uji prasyarat data digunakan sebagai dasar pemilihan teknik uji hipotesis. Hasil uji hipotesis disajikan pada Tabel 7.

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa walaupun pada beberapa implementasi pelaksanaan pembelajaran yang ditinjau dari Standar Proses terdapat perbedaan pada beberapa kelompok sekolah, setelah diuji secara statistik, ternyata perbedaan kategori tersebut, tidak berbeda secara signifikan. Artinya, secara umum implementasi pelaksanaan pembelajaran yang didasari pada Standar Proses, di seluruh kelompok SMA/MA se-Jabodetabek adalah sama-sama baik.

Tabel 7. Hasil Uji Prasyarat dan Uji Hipotesis Kuesioner Guru Mengenai Implementasi Standar Proses pada Pembelajaran Biologi

Kuesioner Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran	Kel. Sekolah	Ket	Uji P*	Uji Hipotesis**
Pendekatan Saintifik	SMAN A	BS	N & H	Uji <i>one way Anova</i> : terima Ho
	SMAN B	BS		
	SMAN C	B		
	MAN	B		
Model Pembelajaran Kooperatif/ Kolaboratif	SMAN A	B	TN	Uji Kruskal Wallis: terima Ho
	SMAN B	B		
	SMAN C	B		
	MAN	B		
Model Pembelajaran <i>Discovery/ Inquiry</i>	SMAN A	B	N & H	Uji <i>one way Anova</i> : terima Ho
	SMAN B	B		
	SMAN C	B		
	MAN	B		
Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	SMAN A	B	N & H	Uji <i>one way Anova</i> : terima Ho
	SMAN B	BS		
	SMAN C	B		
	MAN	BS		
Model Pembelajaran <i>Project Based Learning</i> (PjBL)	SMAN A	B	N & TH	Uji t' Kel. SMAN A-B; A-C; A-MAN; B-C; B-MAN; C-MAN: terima Ho
	SMAN B	B		
	SMAN C	B		
	MAN	BS		

*Uji P: Uji Prasyarat, N:Normal; TN:Tidak Normal; H:Homogen; TH:Tidak Homogen

**Ho: tidak ada perbedaan antar Kelompok Sekolah

2. Data Peserta Didik

Sama halnya dengan data kuantitatif guru, data kuantitatif peserta didik juga diperoleh dari pengisian kuesioner mengenai implementasi Standar Proses pada Pembelajaran Biologi SMA/MA. Hasil kuesioner peserta didik disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Kuesioner Peserta Didik Mengenai Implementasi Standar Proses pada Pembelajaran Biologi

Kuesioner Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran	Skor	Rata Rata	SD	Ket
Pendekatan Saintifik	32193,67	60,51	10,31	C
Model Pembelajaran Kooperatif/ Kolaboratif	36777,69	69,13	9,21	B

Kuesioner Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran	Skor	Rata Rata	SD	Ket
Model Pembelajaran <i>Discovery/ Inquiry</i>	33039	62,10	12,38	C
Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	36294,87	68,22	7,64	B
Model Pembelajaran <i>Project Based Learning</i> (PjBL)	32937,42	61,91	10,79	C

Ket: Keterangan; B: Baik; C: Cukup

Berdasarkan hasil kuesioner pada Tabel 8, implementasi pelaksanaan pembelajaran ditinjau dari Standar Proses, sebagian besar telah cukup diikuti oleh peserta didik SMA/MA se-Jabodetabek, yaitu pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model *discovery/ inquiry* dan PjBL.

Data implementasi pelaksanaan pembelajaran ditinjau dari Standar Proses oleh peserta didik SMA/MA se-Jabodetabek juga disajikan secara berkelompok sekolah. Data tersebut disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Kuesioner Peserta Didik Mengenai Implementasi Standar Proses pada Pembelajaran Biologi per Kelompok Sekolah

Kuesioner Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran	Kel. Sekolah	Skor	Rata-Rata	SD	Ket
Pendekatan Saintifik	SMAN A	8.143,67	64,12	10,06	C
	SMAN B	7.911,67	59,94	9,55	C
	SMAN C	8.907,33	58,22	10,89	C
	MAN	7231	60,26	9,67	C
Model Pembelajaran Kooperatif/Kolaboratif	SMAN A	9471,54	71,75	6,92	B
	SMAN B	8808,46	68,82	9,33	B
	SMAN C	10289,23	67,25	10,66	B
	MAN	8208,46	68,98	8,69	B
Model Pembelajaran <i>Discovery/Inquiry</i>	SMAN A	8517	67,60	9,99	B
	SMAN B	8376	61,59	11,67	C
	SMAN C	9469	59,93	12,86	C
	MAN	6677	59,62	13,20	C
Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	SMAN A	9136,92	67,68	9,42	B
	SMAN B	9136,92	69,22	10,60	B
	SMAN C	10970,77	68,14	13,47	B
	MAN	7050,26	67,79	12,40	B
Model Pembelajaran <i>Project Based Learning</i> (PjBL)	SMAN A	8408,39	62,28	8,23	C
	SMAN B	8184,52	62,00	11,53	C
	SMAN C	9927,10	61,66	10,78	C
	MAN	6417,42	61,71	12,75	C

Kel.: Kelompok; Ket: Keterangan; B: Baik; C: Cukup

Tidak sama dengan guru, implementasi pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Standar Proses bagi peserta didik pada Tabel 9 cenderung menunjukkan hasil yang konsisten per kelompok sekolah pada setiap pelaksanaan pembelajaran. Namun, terdapat hasil yang menarik pada pelaksanaan pembelajaran *discovery/inquiry*, yakni hasil kelompok SMAN A berbeda dengan kelompok SMAN B, SMAN C, dan MAN, yaitu SMAN A masuk dalam implementasi kategori baik sedangkan yang lain adalah cukup. Dengan demikian, analisis data dilanjutkan dengan uji hipotesis guna mengetahui signifikansi perbedaan tiap kelompok sekolah pada tiap pelaksanaan pembelajaran. Uji hipotesis data peserta didik disajikan pada Tabel 10.

Setelah dilakukan uji hipotesis, ternyata diperoleh hasil yang signifikan berbeda tiap kelompok sekolah pada pelaksanaan pembelajaran pendekatan saintifik dan pembelajaran kooperatif. Padahal, secara selisih rata-rata nilai implementasi Standar Proses pada peserta didik tiap kelompok sekolah (Tabel 9) dalam pelaksanaan pembelajaran pendekatan saintifik dan pembelajaran kooperatif, tidak jauh berbeda.

Pada pembelajaran *discovery/inquiry*, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada peserta didik di tiap kelompok sekolah dalam implementasi pelaksanaan pembelajaran *discovery/inquiry*. Hal ini mengkonfirmasi bahwa kelompok SMAN A nyata berbeda dengan kelompok sekolah yang lain.

Tabel 10. Hasil Uji Prasyarat dan Uji Hipotesis Kuesioner Peserta Didik Mengenai Implementasi Standar Proses pada Pembelajaran Biologi

Kuesioner Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran	Kel. Sekolah	Ket	Uji P*	Uji Hipotesis**
Pendekatan Sainifik	SMAN A	C	N & H	Uji <i>one way Anova</i> : tolak Ho
	SMAN B	C		
	SMAN C	C		
	MAN	C		
Model Pembelajaran Kooperatif/Kolaboratif	SMAN A	B	TN	Uji Kruskal Wallis: tolak Ho
	SMAN B	B		
	SMAN C	B		
	MAN	B		
Model Pembelajaran <i>Discovery/Inquiry</i>	SMAN A	B	TN	Uji Kruskal Wallis: tolak Ho
	SMAN B	C		
	SMAN C	C		
	MAN	C		
Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	SMAN A	B	TN	Uji Kruskal Wallis: terima Ho
	SMAN B	B		
	SMAN C	B		
	MAN	B		
Model Pembelajaran <i>Project Based Learning</i> (PjBL)	SMAN A	C	N & TH	Uji t' Kel. SMAN A-B; A-C; A-MAN; B-C; B-MAN; C-MAN: terima Ho
	SMAN B	C		
	SMAN C	C		
	MAN	C		

*Uji P: Uji Prasyarat, N:Normal; TN:Tidak Normal; H:Homogen; TH:Tidak Homogen

**Ho: tidak ada perbedaan antar Kelompok Sekolah

Adapun hasil uji hipotesis yang sesuai dengan pengkategorian ditunjukkan oleh pelaksanaan pembelajaran PBL dan PjBL. Dapat dilihat pada Tabel 10 bahwa tidak ada perbedaan pada tiap kelompok sekolah dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembelajaran PBL dan PjBL. Semua peserta didik pada tiap kelompok sekolah mengimplementasikan PBL secara baik, sedangkan PjBL diimplementasikan dengan cukup.

B. Data Kualitatif

Pada penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari wawancara dan observasi. Sedangkan pengumpulan data melalui observasi dilakukan

dengan sistem kategori interaksi verbal atau VICS (*Verbal Interaction Category System*).

1. Wawancara

Pada implementasi pendekatan saintifik, guru telah melaksanakannya dengan baik sekali, ketika dikonfirmasi melalui wawancara, guru menerapkan berbagai model pembelajaran yang mendukung seperti PBL, PjBL, *Discovery*, dan *Cooperative Learning*. Dengan demikian, peserta didik terfasilitasi untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran secara individu maupun kelompok. (1)

Peserta didik juga mengonfirmasi bahwa mereka merasa telah melakukan tahapan pendekatan

saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Hasil wawancara juga menerangkan bahwa sebagian besar peserta didik menyukai kegiatan praktikum, selebihnya ada peserta didik yang menyukai pembelajaran Biologi dengan presentasi-diskusi dan juga ada yang menyukai pembelajaran Biologi dengan metode ceramah. (2)

Sama halnya dengan pendekatan saintifik, kuesioner implementasi pembelajaran kooperatif oleh guru mengungkapkan bahwa, guru telah melaksanakan pembelajaran kooperatif dengan baik. Namun, saat dikonfirmasi wawancara, guru mengungkapkan bahwa implementasi model pembelajaran kooperatif terdapat beberapa tantangan, yaitu mengondisikan peserta didik agar semuanya berperan aktif dalam proses pembelajaran karena proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Satu orang peserta didik harus saling bekerja sama dan komunikasi dengan anggota kelompoknya. (3)

Sejalan dengan hasil wawancara dengan guru, tantangan yang dirasakan oleh peserta didik sama seperti tantangan yang diungkapkan oleh guru saat melakukan pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif. Peserta didik mengungkapkan bahwa peserta didik menemukan kesulitan dalam komunikasi, mengatur waktu dan berkoordinasi antar anggota kelompok. Selain itu, kurangnya kepedulian dan kesadaran diri serta tanggung jawab antar anggota kelompok juga menjadi kesulitan yang dihadapi. (4)

Walaupun demikian, peserta didik mengungkapkan bahwa peserta didik merasakan manfaat juga dari pembelajaran kooperatif. Peserta didik dapat lebih memahami materi melalui diskusi yang dilakukan dalam kelompok, membangkitkan kepercayaan diri dan lebih mudah mengutarakan pendapat. (5)

Selanjutnya, hasil wawancara tentang pembelajaran *discovery/inquiry* menerangkan bahwa keterlaksanaan kegiatan model pembelajaran *discovery/inquiry* sering muncul/digunakan bila metode pembelajaran yang digunakan adalah praktikum. Melalui praktikum, kegiatan pengumpulan data yang merupakan salah satu indikator *discovery/inquiry* dapat terlihat. Selain itu, kegiatan

tersebut dapat juga menjadi cara untuk mengembangkan kemampuan peserta didik pada ranah psikomotorik. Namun, tantangan pada implementasi model pembelajaran ini juga tidak kalah besar, yaitu mendorong peserta didik untuk membuat pertanyaan dan mendesain penyelidikan. (6)

Hal tersebut juga dikonfirmasi peserta didik melalui wawancara. Peserta didik merasa melakukan komponen pembelajaran *discovery/inquiry* pada saat pembelajaran dengan praktikum. Peserta didik menerangkan bahwa kegiatan praktikum tidak dilakukan setiap materi pembelajaran biologi. Selain itu, peserta didik mengungkapkan kegiatan praktikum belum dilakukan secara maksimal, karena ada keterbatasan fasilitas/alat-alat laboratorium. (7)

Peserta didik menyukai pembelajaran yang aktif dan menggunakan beragam metode. Peserta didik mengatakan bahwa lebih mudah memahami materi dengan praktikum, karena dalam rangkaian kegiatan praktikum guru memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai praktikum yang akan dilakukan, kemudian selama proses praktikum, peserta didik menggunakan berbagai referensi pembelajaran untuk membuat kesimpulan dalam praktikum, setelah itu guru memberi penegasan setelah praktikum dilakukan. (8)

Guru juga telah mengimplementasikan pembelajaran PBL dan PjBL dengan baik berdasarkan hasil kuesioner guru. Namun, pada saat dikonfirmasi melalui wawancara, untuk keterlaksanaan pembelajaran PBL dan PjBL, kurang sesuai dengan hasil kuesioner, terutama untuk implementasi pembelajaran PjBL. Tantangan yang sering kali ditemukan dalam implementasi pembelajaran ini adalah relevansi pembelajaran PBL dan PjBL dengan materi pembelajaran. Selain itu, keterampilan guru dalam mengelola kelas dan mengatur waktu juga diperlukan, terutama untuk pembelajaran PjBL karena untuk menyelesaikan proyek, peserta didik sangat perlu untuk berdiskusi dengan teman sekelompok dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas proyek yang diberikan oleh guru. (9)

Pada hasil kuesioner kelompok MAN terhadap implementasi model pembelajaran PjBL terungkap, implementasi model pembelajaran

PjBL sangat baik diimplementasikan oleh kelompok MAN. Artinya, keterlaksanaan kegiatan PjBL sering muncul/diterapkan oleh guru. Namun, berdasarkan wawancara, ternyata guru mengutarakan bahwa jarang menggunakan model pembelajaran PjBL dalam pembelajaran Biologi. Hal ini terkonfirmasi pada hasil kuesioner peserta didik, di mana peserta didik jarang melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran PjBL. (10)

Dalam wawancara mengenai pelaksanaan pembelajaran PBL pada peserta didik, diperoleh pendapat yang beragam antar peserta didik di setiap kelompok sekolah. Walaupun demikian, secara umum peserta didik mengungkapkan bahwa biasanya guru mengimplementasikan PBL dengan memberikan masalah pada peserta didik, kemudian peserta didik bekerja secara berkelompok melalui LKPD yang telah diberikan oleh guru. Terkadang, terdapat juga guru yang meminta peserta didik kerja kelompok tanpa LKPD. Setelah berdiskusi secara berkelompok,

biasanya guru meminta peserta didik untuk memberikan kesimpulan dari materi yang telah didiskusikan kemudian, terkadang disampaikan melalui presentasi, terkadang hanya menuliskan di buku atau LKPD. (11)

2. Observasi

Tabel 11 adalah hasil observasi dengan menggunakan teknik VICS. Observasi pembelajaran dengan teknik VICS dilakukan pada sekolah yang gurunya bersedia untuk diobservasi. Oleh karena itu, dapat dilihat pada Tabel 11 bahwa terdapat kelompok sekolah di wilayah tertentu yang tidak dilakukan observasi, yaitu kelompok sekolah SMAN A (SMA dengan rata-rata UN tinggi) pada wilayah Jakarta. Selain itu, dilakukan atau tidaknya observasi juga tergantung dari ada atau tidaknya kelompok sekolah yang dikehendaki, seperti pada daerah Depok yang tidak terdapat kelompok sekolah MAN.

Tabel 11. Interaksi Verbal antara Guru dan Peserta Didik di SMA-MA Negeri se-Jabodetabek

Kel. Sekolah	Daerah*	Wilayah Interaksi				Kesimpulan (Kecenderungan)
		Guru-Guru (A, B, D, E, F, H, I)	Interaksi Dua Arah (C, G, J, K, L, M, P, Q, R)	Peserta Didik-Peserta Didik (N, O, S, T)	Lainnya (U)	
SMAN A	Bogor	37,35%	43%	11,39%	7,28%	Interaksi dua arah
	Depok	13,54%	45,58%	23,89%	16,81%	Interaksi dua arah
	TangSel**	56%	34%	2%	7,80%	<i>Teacher centered</i>
	Bekasi	2,83%	64%	16,35%	15,82%	Interaksi dua arah
SMAN B	Jakarta	16,85%	64,83%	1,46%	17%	Interaksi dua arah
	Bogor	10,32%	57,10%	19,03%	13,55%	Interaksi dua arah
	Depok	9,85%	48,87%	12,11%	29,17%	Interaksi dua arah
	TangSel**	37,09%	30,65%	6,45%	25,81%	<i>Teacher centered</i>
	Bekasi	18,34%	63,91%	0,59%	17,75%	Interaksi dua arah
SMAN C	Jakarta	13,32%	43,02%	20,00%	24%	Interaksi dua arah
	Bogor	8,55%	51,71%	13,95%	25,75%	Interaksi dua arah
	Depok	6%	62,05%	14,73%	16,51%	Interaksi dua arah
	TangSel**	27,86%	45,01%	9,99%	17,14%	Interaksi dua arah
	Bekasi	12,77%	64,90%	0,00%	22,34%	Interaksi dua arah
MAN	Jakarta	32,07%	37,73%	11%	18,86%	Interaksi dua arah
	Bogor	16,50%	52,19%	25,59%	5,72%	Interaksi dua arah
	TangSel**	34,11%	42,36%	8%	15,29%	Interaksi dua arah
	Bekasi	21,43%	60,76%	0,60%	16,67%	Interaksi dua arah

*Daerah observasi bagi guru yang bersedia diobservasi

**TangSel: Tangerang Selatan

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengukur secara holistik implementasi Standar Proses (bagian pelaksanaan pembelajaran) pada pembelajaran Biologi. Pembelajaran yang memiliki karakteristik yang tertuang pada Standar Proses di antaranya yaitu pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik, pembelajaran dengan model kooperatif, *discovery/inquiry*, dan berbasis masalah (PBL dan PjBL).

Namun, hasil temuan penelitian menunjukkan, peserta didik merasakan guru lebih banyak melakukan pendekatan pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah melalui metode ilmiah dengan proses diskusi dibandingkan dengan pendekatan saintifik melalui model pembelajaran *discovery/inquiry* yang menuntut keterampilan dan menggunakan metode ilmiah secara *hands on* (Tabel 8). Walaupun dari sumber, guru merasa telah melakukan semua pendekatan ini dengan baik dan proporsional (Tabel 5).

Data pada Tabel 5 ini bermakna guru sudah melakukan setiap jenis pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan langkahnya masing-masing. Hal tersebut dapat diartikan bahwa guru telah berupaya mengimplementasikan proses pembelajaran yang diarahkan dalam Standar Proses sesuai dengan ciri serta tahapan tiap-tiap jenis pembelajaran. Sisidiana (2019) mengungkapkan, penerapan kurikulum dapat dilaksanakan jika guru dan sekolah telah memiliki kesiapan. Kesiapan tersebut dapat diperoleh dengan pelatihan kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama guru. Guru menjadi unit utama karena guru melaksanakan langsung kegiatan pembelajaran (Sisidiana, 2019).

Sejalan dengan Sisidiana (2019), Fitria & Fidesrinur (2021) menerangkan bahwa pelatihan, seminar, dan *workshop* yang dilakukan oleh guru dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru dalam menyusun/menentukan strategi pembelajaran. Selain itu, Albirron, dkk. (2019) memaparkan, kegiatan MGMP juga dapat menjadi alasan guru dapat menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kegiatan MGMP bisa menjadi ajang guru berbagi teknik pembelajaran dan membahas konsep-konsep sulit dalam mata pelajaran Biologi (Albirron, dkk., 2019). Oleh karena

itu, implementasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Standar Proses dalam penelitian ini, dapat dipengaruhi oleh pelatihan, MGMP ataupun seminar dan *workshop* yang dijalankan oleh sekolah maupun guru SMA/MA Negeri se-Jabodetabek.

Tabel 8 menunjukkan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, pembelajaran *discovery/inquiry* dan PjBL telah dilakukan dengan cukup. Makna “cukup” di sini adalah peserta didik melaksanakan tahapan pembelajaran yang disebutkan, secara seadanya, atau dengan kata lain belum terlaksana dengan optimal.

Menurut peserta didik, tahapan pembelajaran *discovery/inquiry* terpenuhi ketika peserta didik melakukan kegiatan praktikum (wawancara baris 7). Maka dari itu, keterbatasan fasilitas/alat laboratorium menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran *discovery/inquiry*. Hal tersebut menjadi kendala pelaksanaan pembelajaran di atas karena sering kali guru mengisi proses pembelajaran *discovery/inquiry* dengan kegiatan praktikum.

Seperti yang tertuang dalam Meishanti, dkk. (2020), *discovery learning* merupakan pembelajaran yang mampu mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik bisa memiliki pengetahuan baru dengan menemukan sendiri. Pengaturan pengajaran yang dimaksud dapat berupa merancang kegiatan pembelajaran dengan kegiatan praktikum.

Praktikum sudah menjadi komponen penting dalam pembelajaran Biologi (Rahmah, dkk., 2021). Selain itu, praktikum dapat membuat konsep abstrak menjadi konsep yang lebih mudah ditangkap oleh peserta didik (Dewi, dkk., 2014). Walaupun demikian, kendala yang ditemukan pada penelitian ini ditemukan juga dalam penelitian yang lain, yaitu pada penelitian Rahmah, dkk. (2021), yang mengungkapkan beberapa faktor kendala pelaksanaan praktikum. Beberapa di antaranya adalah fasilitas pendukung yang tidak memadai, minimnya kelengkapan bahan praktikum dan kurangnya kesiapan laboran dalam mempersiapkan alat dan bahan.

Pada dasarnya, peserta didik menyukai proses pembelajaran aktif, salah satunya praktikum, karena melalui praktikum peserta didik lebih mudah memahami materi (wawancara baris 8). Maka, keterbatasan fasilitas serta alat dan

bahan seyogianya diatasi oleh guru, sang fasilitator pembelajaran. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan kreativitas guru. Guru yang memiliki kreativitas mengolah pembelajaran dapat membuat pembelajaran tidak membosankan melainkan menyenangkan (Yuliati, (2008 *dalam* Lubis, dkk., 2017). Kreativitas guru dapat ditunjukkan dengan memanfaatkan benda-benda sekitar atau benda buatan sendiri untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Jika guru sudah terbiasa memanfaatkan benda-benda sederhana di sekitarnya, maka nantinya tidak akan mengeluh bila fasilitas di sekolah kurang lengkap (Lubis, dkk., 2017). Penelitian Umboh (2017) juga menyimpulkan, kekurangan alat praktikum dan fasilitas laboratorium dapat diatasi, tidak hanya bergantung buatan pabrik, tetapi bisa menggunakan alat peraga buatan guru (Umboh, 2017).

Kendala berikutnya adalah waktu yang diungkapkan oleh guru melalui wawancara (baris 9). Waktu yang terbatas berisiko membuat rangkaian pembelajaran tidak dilaksanakan dengan penuh. Misalnya, pada pembelajaran Biologi dengan PjBL, untuk menyelesaikan proyek, peserta didik sangat perlu melakukan diskusi dengan teman sekelompok dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas proyek yang diberikan oleh guru, sehingga jika waktu yang ada tidak cukup untuk menyelesaikannya, maka kegiatan tersebut tidak dilakukan.

Di samping itu, guru juga menghadapi tantangan dalam menemukan relevansi materi yang sedang dipelajari dengan jenis pembelajaran yang dirancang, seperti tugas proyek yang diberikan pada peserta didik. Kendala-kendala tersebut ditegaskan oleh Mislinawati & Nurmasyitah (2018) dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran PjBL, waktu menjadi kendala saat mengarahkan peserta didik dan mengaitkan tujuan pelaksanaan proyek dengan materi pelajaran yang sedang dibahas. Sebagian peserta didik belum memahami tujuan pelaksanaan proyek dan kaitannya dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga muncul persepsi pada peserta didik pelaksanaan proyek terpisah dari materi pelajaran (Mislinawati & Nurmasyitah, 2018).

Sejatinya, kendala yang ditemukan dalam pembelajaran adalah hal yang lumrah,

namun sikap yang baik untuk menyikapinya adalah dengan mencari solusi dari kendala tersebut. Adapun untuk mengatasi kendala waktu yang terbatas, guru dapat melakukan beberapa hal, di antaranya adalah: 1) mengenal karakteristik peserta didik, sehingga beban tugas atau perlakuan yang diberikan oleh guru saat menerapkan/mengimplementasikan pendekatan serta model (strategi) pembelajaran kurikulum 2013 dapat dituntaskan sesuai waktu yang dialokasikan. Selain itu, Novitasari, dkk. (2020) menjelaskan bahwa dengan mengenal karakteristik peserta didik dalam hal tingkat pemahamannya, dapat membantu guru untuk menyusun tata urutan materi. Guru memiliki kekuasaan penuh untuk mengubah atau memodifikasi materi yang ada di buku atau silabus sepanjang sesuai dengan logika akademik yang benar (Novitasari, dkk., 2020); 2) matang dalam pembuatan rancangan pembelajaran (RPP), dan tertib terhadap alokasi yang telah dibuat. Cara ini dapat dilakukan dengan membuat lini masa pemberian tugas pada peserta didik, sehingga kegiatan menjadi terjadwal.

Mislinawati & Nurmasyitah (2018) menambahkan guru juga perlu memantau aktivitas belajar dan diskusi yang dilakukan peserta didik. Dengan melakukan hal ini, guru dapat memastikan semua peserta didik bekerja dengan baik. Selanjutnya, guru harus lebih kreatif dalam menstimulasi peserta didik.

Implementasi pembelajaran aktif juga terungkap melalui penelitian ini, terlihat dari hasil penelitian kualitatif (data VICS). Menurut data tersebut, sebagian besar guru di SMA/MA Negeri di Jabodetabek telah membawa pembelajaran pada interaksi dua arah, di mana terdapat umpan balik antara guru dan peserta didik. Adanya umpan balik antara guru dan peserta didik ini menunjukkan kegiatan pembelajaran yang difasilitasi atau dikelola guru dapat memicu atau mendorong keterlibatan peserta didik. Terlibatnya peserta didik dapat dipandang sebagai keaktifan (Darmuki & Hariyadi, 2019). Keaktifan dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Dalam konteks verbal, sebagaimana teknik yang digunakan pada observasi (VICS), keaktifan dapat dilakukan dengan menyampaikan pendapat, menanggapi, diskusi, mengajukan pertanyaan, memberi saran, dan lain sebagainya (Hidayati & Darmuki, 2021).

Secara umum, jika hasil penelitian ini (baik hasil kuantitatif maupun kualitatif) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Putri & Jumadi (2017), guru-guru Biologi di SMA/MA Negeri se-Jabodetabek tidak mengalami kendala pada RPP ataupun penentuan model pembelajaran terhadap materi yang dipelajari.

Selanjutnya, temuan yang diperoleh dari penelitian ini membuktikan bahwa tidak berubahnya bagian pelaksanaan pembelajaran merupakan hal yang dapat dipertahankan dan ditindaklanjuti. Dapat dipertahankan karena baik menurut Standar Proses No. 16 Tahun 2022 maupun Standar Proses sebelumnya, guru sudah dapat dan siap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Standar Proses, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang interaktif (ditunjukkan dari pola *student centered*), menantang (ditunjukkan dari pembelajaran berbasis *discovery*, masalah dan proyek), menyenangkan (ditunjukkan dari pembelajaran kooperatif dan aktif).

Adapun hal yang dapat ditindak lanjuti adalah hal yang ditekankan pada Standar Proses No. 16 Tahun 2022 yang tidak terdapat pada Standar Proses sebelumnya, yaitu peran pendidik sebagai pendamping dan memberikan fasilitas. Dua faktor tersebut hal yang ditambahkan pada Standar Proses ini dapat dipahami, karena menurut temuan penelitian ini, memang dua faktor itulah yang dibutuhkan peserta didik agar kompetensi peserta didik dapat tercapai.

Hasil penelitian menunjukkan, implementasi pelaksanaan pembelajaran yang diatur pada Standar Proses, oleh peserta didik masih rendah. Dengan demikian, penerapan Standar Proses No. 16 Tahun 2022 ini sebaiknya dioptimalkan lebih lagi pada proses pendampingan dan fasilitasi dari pendidik ke peserta didik.

Selain itu, hasil yang diperoleh juga menunjukkan, secara umum, implementasi proses pembelajaran berbasis proyek (PjBL) masih dalam kategori cukup. Adapun kurang optimalnya implementasi pembelajaran berbasis proyek ini, disebabkan oleh kurangnya waktu peserta didik untuk berdiskusi, kurangnya pengelolaan kelas oleh guru, sehingga proses pembelajaran berbasis proyek dilakukan dengan proses seadanya dan jarang digunakan oleh guru (wawancara baris 9).

Pada Kurikulum Merdeka, pembelajaran berbasis proyek sudah dilakukan secara terarah dimulai dari mendesain, mengelola, mendokumentasikan dan melaporkan, mengevaluasi serta melakukan tindak lanjut proyek. Bahkan desain proyek pada kurikulum merdeka sudah menetapkan alokasi waktu, misalnya untuk tingkat SMA kelas X sampai XII ditentukan waktu per tahun 192 sampai 486 jam. Selain itu proyek bersifat tematik yang dapat mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, tema proyek pun sudah ditentukan ada tujuh tema (Sufyadi, dkk., 2021). Tabel 12 menunjukkan perbandingan pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

Tabel 12. Perbandingan Pembelajaran Berbasis Proyek Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka

Perbandingan	K. 2013	K. Merdeka
Dasar	Kompetensi Dasar pada kompetensi inti IV (Keterampilan)	Pelajar Pancasila
Perencanaan proyek	Masing-masing guru mata pelajaran, pelibatan kepala sekolah tidak langsung	Guru lintas mata pelajaran melibatkan kepala sekolah secara langsung
Pengelolaan	individual, per mata pelajaran, otonomi	kolaboratif, lintas mata pelajaran, terpusat
Penerapan	Satu atau per mata pelajaran dengan durasi fleksible sesuai inisiatif guru	lintas mata pelajaran durasi ditentukan, SMA Kelas X 486 jam, kelas XI 216 jam, kelas XII 192 jam.
Tema	tidak ditentukan	ditentukan ada tujuh tema
Kewajiban	Tidak wajib	wajib

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi Standar Proses pada pembelajaran Biologi SMA/MA se-Jabodetabek telah diterapkan dengan baik oleh para guru. Keterlaksanaan implementasi tersebut didukung oleh faktor kesiapan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh para guru.

Menurut pandangan peserta didik, guru Biologi masih kurang dalam memfasilitasi kegiatan *hands on* yang mendukung implementasi pendekatan saintifik, *discovery/inquiry* dan PjBL. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, kelengkapan fasilitas untuk kegiatan praktikum dan pemahaman guru dalam menentukan jenis pendekatan pembelajaran sesuai kompetensi dasar yang menjadi tuntutan kurikulum.

Kekurangan ini menjadi dasar bagi lembaga pelatihan para guru untuk terus meningkatkan keterampilan, fasilitas, dan kemampuan para guru dalam mendesain pembelajaran berbasis *hands on* dengan menggunakan pendekatan saintifik, *discovery/inquiry* dan PjBL.

Pelaksanaan Standar Proses yang telah berjalan baik perlu untuk dipertahankan, mengingat pencapaian yang dilakukan guru dalam menerapkan Standar Proses belum sepenuhnya dirasakan oleh peserta didik. Secara bertahap para guru pun perlu terus mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan Standar Proses yang diharapkan. Diharapkan kekurangan yang ditemukan pada penelitian ini dalam implementasi proses pembelajaran, dapat diatasi sehingga implementasi pada Kurikulum Merdeka dapat berlangsung/diimplementasikan lebih baik lagi.

Ucapan terima kasih

Disampaikan kepada Puslitpen LP2M UIN Jakarta yang telah mendanai penelitian ini melalui BOPTN UIN Jakarta tahun 2020. Kepada para enumerator di lapangan Syifa Alwahidah, Khairunnisa Kurnia Sari, Elah Nurlaelah, Aula Hani Maisaroh, Like Herawati, dan Firda Aulia.

PUSTAKA ACUAN

- Albirron, A., Herlanti, Y., & Fadlilah, D. R. (2019). Pola Interaksi Verbal Guru Biologi setelah mendapatkan Pelatihan Kurikulum 2013. *EduSains*, 11(1), 141–146. <https://doi.org/es.v11i1.10650>
- Amidon, E. J., & Hunter, E. (1968). Abstracted from VERBAL INTERACTION CATEGORY SYSTEM (VICS). *Classroom Interaction Newsletter*, 3(2), 1-5.
- Anam, K. (2016). *Pembelajaran Berbasis Inkuiri* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Aruman, Danim, S., & Sumarsih, S. (2019). Implementasi Kurikulum 2013 dalam Manajemen Pembelajaran Mata Pelajaran Peminatan MIPA. *Manajer Pendidikan*, 13(1).
- Asri, M. (2017). Dinamika Kurikulum Di Indonesia. *Modelling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 192–202.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In D. C. Felts (Ed.), *SAGE Publications, Inc.* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Darmuki, A., & Hariyadi, A. (2019). Peningkatan Keterampilan Berbicara menggunakan Metode Kooperatif Tipe Jigsaw pada Mahasiswa PBSI Tingkat I-B IKIP PGRI Bojonegoro Tahun Akademik 2018/2019. *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 2(2), 256–267. <https://doi.org/10.24176/kredo.v2i2.3343>
- Dewi, I. S., Sunariyati, S., & Neneng, L. (2014). Analisis Kendala Pelaksanaan Praktikum Biologi di SMA Negeri se-Kota Palangkaraya. *EduSains*, 2(1), 13–26.
- Fadlillah, M. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, & SMA/MA*. Ar-Ruzz Media.
- Fathurrohman, M. (2016). *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Ar-ruzz media.
- Fitria, N., & Fidesrinur, F. (2021). Pelatihan Peningkatan Strategi Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013. *Jurnal*

- Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.36722/jpm.v3i1.501>
- Florentina, N., & Leonard, L. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 7(2), 96–106. <https://doi.org/10.30998/formatif.v7i2.1877>
- Herlanti, Y. (2014). Buku Saku: Tanya Jawab Seputar Penelitian Pendidikan Sains. *Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah*.
- Hidayati, N. A., & Darmuki, A. (2021). Penerapan Model Auditory Intellectually Repetition (AIR) untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara pada Mahasiswa. *Jurnal Educatio*, 7(1), 252–259. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i1.959>
- Ismail, M. I., & Hasan, A. H. (2022). Implementasi Standar Proses pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Swasta Terpadu Bani Rauf Kabupaten Gowa. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, XI, 85–100.
- Isrok'atun, & Rosmala, A. (2018). *Model-Model Pembelajaran Matematika*. Bumi Aksara.
- Kemendikbud. (2014). *Paparan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Bidang Pendidikan (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013)*.
- Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka - Direktorat Sekolah Dasar*. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>
- Lubis, F. A., Lubis, J. A., & Lubis, M. (2017). "Pepradase" Pelatihan Praktikum Biologi dengan Alat dan Bahan Sederhana. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 16–21. <https://doi.org/10.31604/jpm.v1i1.16-21>
- Meishanti, O. P. Y., Sholihah, F. N., & Dari, N. S. U. (2020). Implementasi Discovery Learning dengan Praktikum Kingdom Plantae untuk Melatih Keterampilan Proses di MA Unggulan KH.Abd. Wahab Hasbulloh Tambakberas Jombang. *Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya*, 7(2), 36–43.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Pub. L. No. 22. Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pub. L. No. 37. Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses, Pub. L. No. 16. Indonesia: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mislinawati., M., & Nurmasiyah., N. (2018). Kendala Guru dalam Menerapkan Model-Model Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 pada SD Negeri 62 Banda Aceh. *Jurnal Pesona Dasar*, 6(2), 22–32. <https://doi.org/10.24815/pear.v6i2.12194>
- Musfiqon, & Nurdyansyah. (2015). *Pendekatan Pembelajaran Saintifik*. Nizamia learning center.
- Novitasari, N., Nabila, C., & Fratiwi, W. H. (2020). Analisis Kendala Guru dalam Menerapkan K13 terhadap Hasil Belajar Siswa di SDN Pegadungan 8 Petang. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(1), 1–15.
- Putri, R. F., & Jumadi, J. (2017). Kemampuan Guru Fisika dalam Menerapkan Model-Model Pembelajaran pada Kurikulum 2013 serta Kendala-Kendala yang dihadapi. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 3(2), 201–211. <https://doi.org/10.21831/jipi.v3i2.8636>
- Rahmadhani, N.A. (2020). *Pentingnya Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/novitaasfiandarahmadhani/5e7d9405097f361bbe>

- 142d94/pentingnya-pemerataan-sarana-prasarana-pendidikan-di-indonesia.
- Rahmah, N., Asiah, Hasanuddin, & Syafrianti, D. (2021). Analisis Kendala Praktikum Biologi di Sekolah Menengah Atas (Obstacles Analysis of Biology Laboratory Practice of High School). *BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 7(2), 169–178.
- Riyanto, Y. (2009). *Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi bagi Pendidik dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas*. Prenada Media Group.
- Sisdiana, E. (2019). Kajian Pelatihan Kurikulum 2013 oleh Instruktur Kabupaten/Kota kepada Guru Sekolah Sasaran. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 18(2), 155–180. <https://doi.org/10.21009/jimd.v18i2.11799>
- Sofyan, H., Wagiran, Komariah, K., & Triwiyono, E. (2017). *Problem Based Learning dalam Kurikulum 2013* (1st ed., Vol. 148). UNY Press.
- Sudarisman, S. (2015). Memahami Hakikat dan Karakteristik Pembelajaran Biologi dalam Upaya Menjawab Tantangan Abad 21 serta Optimalisasi Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Florea*, 2(1), 29–35.
- Sufairoh. (2016). Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran K-13. *Jurnal Pendidikan Profesional*, 5(3), 116–125.
- Sufyadi, S., Harjatanaya, T. Y., Adiprima, P., Satria, M. R., Andiarti, A., & Herutami, I. (2021). *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)*. Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/05/tentang-profil-pelajar-pancasila>
- Surahman, E., & Surjono, H. D. (2017). Pengembangan Adaptive Mobile Learning pada Mata Pelajaran Biologi SMA sebagai Upaya Mendukung Proses Blended Learning. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 4(1), 26–37. <https://doi.org/10.21831/jitp.v4i1.9723>
- Tanaga, S. (2018). *Jabodetabek Satu Kawasan Metropolitan*. URDI. <https://www.urdi.org/2018/02/22/jabodetabek-satu-kawasan-metropolitan.html>
- Umboh, S. I. (2017). Pelatihan Merancang Alat Praktikum dan Pemantapan Materi Fisika SMP bagi Guru-Guru Fisika. *Jurnal Abdimas*, 10(01), 77–82.
- Widiasmoro, E. (2017). *Strategi dan metode Mengajar Peserta didik di Luar Kelas (Outdoor Learning) secara Aktif, Kreatif, Inspiratif dan Komunikatif*. Ar-Ruzz Media.

ABSTRACT

This study aims to determine the level of relevance between the Building Engineering Education study program curriculum in the State University of Jakarta (UNJ), and the competency of Building Design and Information Modeling expertise program in Vocational High Schools (SMK) in "Kurikulum Merdeka" (Emancipated Curriculum). The objects of the study are the Kurikulum Merdeka guidelines, Semester Lesson Plan for the Building Engineering Education study program, and document on Learning Outcomes for the Building Design and Information Modeling expertise program. The method used in this research was descriptive quantitative. The data were collected through literature review, documentation, and interviews. The data were analyzed by assessing the percentage of each competency or learning element in the expertise program. Then, the results were categorized according to the relevance level, which were divided into very relevant, quite relevant, and irrelevant. The result found that overall; the curriculum of the Building Engineering Education study program is very relevant to the competency of Building Design and Information Modeling expertise program with a correlation of 80.77%.

Key words: curriculum, relevance, building engineering, Vocational High School, building design, information modeling

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat relevansi kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terhadap kompetensi Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Objek pada penelitian ini yaitu dokumen Kurikulum Merdeka, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, dan dokumen Capaian Pembelajaran Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian literatur, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan menilai persentase setiap kompetensi atau elemen pembelajaran SMK Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan yang kemudian hasilnya dikategorikan sesuai kategori tingkatan relevansi. Tingkatan relevansi yang dimaksud berupa keterkaitan capaian pembelajaran yang terdiri dari kategori sangat relevan, cukup relevan, dan tidak relevan. Hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UNJ sangat relevan terhadap kompetensi SMK Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan pada Kurikulum Merdeka, dengan hasil keterkaitan sebesar 80,77%.

Kata kunci: desain pemodelan, informasi bangunan, relevansi kurikulum, SMK, teknik bangunan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu sarana penunjang persaingan di dunia kerja. Pendidikan teknologi dan kejuruan baik di perguruan tinggi maupun di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil (Alifin Nur & HP, 2019). Salah satu komponen penting berjalannya suatu sistem pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan program perencanaan yang disusun secara terstruktur untuk dijadikan suatu pedoman dalam mencapai tujuan dalam pendidikan (Ekaningrum, 2015). Kurikulum baru telah dipersiapkan oleh pemerintah yaitu Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan mulai tahun ajaran 2022/2023. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang bertujuan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang inovatif dan sesuai kebutuhan siswa (Indarta, dkk., 2022). Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dipersiapkan dalam rangka pemulihan pembelajaran, sesuai Keputusan Mendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sudah diterapkan di perguruan tinggi sejak 2020, sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka sendiri merupakan program yang mengedepankan kemandirian dan kemerdekaan dengan melaksanakan pembelajaran 2 semester di luar program studi dan 1 semester di luar kampus (Andine, 2020; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020; Susilawati, 2021).

Di SMK, bukan hanya kurikulum saja yang berkembang, namun kompetensi keahliannya pun mengalami banyak perubahan mengikuti perkembangan industri. Tentu hal ini juga memengaruhi kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan di UNJ. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan ini merupakan jurusan yang salah satu tujuannya untuk mencetak tenaga pengajar di SMK Bidang Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti.

Dalam membuat kurikulum, terdapat 4 komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Komponen

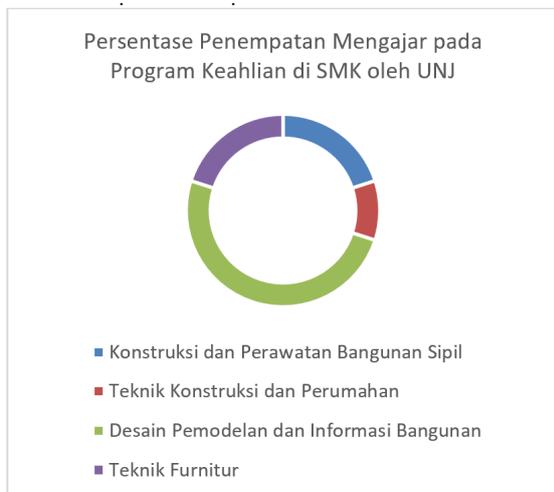
kurikulum merupakan bagian atau unsur yang memiliki keterkaitan satu sama lain (Mansyukur, 2018). Berikut ini penjelasan 4 komponen utama dalam kurikulum:

1. **Komponen Tujuan**
Komponen tujuan dalam rancangan kurikulum menjadi ide atau gagasan awal yang diinginkan dalam setiap proses pendidikan. Rancangan tujuan memberikan arah terhadap proses pendidikan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
2. **Komponen Isi/Materi**
Konten atau isi materi dalam kurikulum ruang lingkupnya meliputi banyak hal. Ada yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
3. **Komponen Metode atau Strategi Pembelajaran**
Strategi yang tepat akan mempermudah untuk mengantarkan pencapaian tujuan pembelajaran.
4. **Komponen Evaluasi**
Evaluasi merupakan komponen keempat dari pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi mempunyai kedudukan yang penting terutama dalam menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

Karakteristik Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Kurikulum Merdeka di SMK dilihat dari 4 komponen kurikulum, berdasarkan studi pendahuluan, dapat dilihat pada Tabel 1.

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan (PTB) UNJ merupakan program studi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan calon tenaga guru bidang keahlian Teknik Bangunan di SMK. Mata kuliah yang dipelajari pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan terdiri dari Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Program Studi, dan Mata Kuliah Pilihan. Mata kuliah program studi merupakan mata kuliah yang menunjang kompetensi mahasiswa dalam penguasaan bidang teknik bangunan. Untuk mempersiapkan tenaga pendidik atau guru yang profesional, diperlukan adanya pelatihan. Universitas Negeri Jakarta memiliki program atau kegiatan akademik yang dinamakan Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) dan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (AMSP), yaitu pelaksanaan kegiatan latihan praktik mengajar langsung di sekolah

oleh mahasiswa. Penempatan mahasiswa saat kegiatan mengajar oleh pihak universitas dan sekolah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Persebaran Penempatan Mahasiswa PKM dan AMSP pada Kompetensi SMK di Jakarta

Sumber : Data Program Studi PTB UNJ dan Web Sekolah

Berdasarkan Gambar 1., Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) merupakan program keahlian yang paling banyak terdapat di SMK yang ada di Jakarta. Dengan pertimbangan tersebut, perlu adanya penelitian terkait kesesuaian pokok bahasan yang dipelajari pada program keahlian ini dengan materi yang dipelajari selama perkuliahan.

Pada saat pelaksanaan kegiatan mengajar di sekolah, mahasiswa memiliki banyak kendala yang harus dihadapi. Kendala yang pertama yaitu mahasiswa kurang berkompeten karena kurangnya pengetahuan tentang materi yang kurang dibahas saat di perkuliahan (Julistiana, 2018). Kedua, kurangnya penguasaan materi oleh mahasiswa sehingga saat melakukan kegiatan mengajar menjadi tidak maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Rustanti, 64,7% mahasiswa UNJ mengalami kesulitan saat mengajar dan 44,1% mahasiswa mengalami kesulitan karena kurangnya penguasaan terhadap materi yang perlu diajarkan pada peserta didik di SMK saat melaksanakan Praktik Keterampilan Mengajar (PKM).

Untuk mempersiapkan mahasiswa UNJ yang nantinya akan menjadi seorang pendidik, perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat relevansi kurikulum Program Studi PTB FT UNJ terhadap kompetensi SMK Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan yang menggunakan Kurikulum Merdeka. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan untuk kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UNJ. Selain itu, diharapkan Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UNJ dapat menghasilkan pendidik yang profesional, berkualitas, dan memiliki kompetensi yang sesuai di bidang pendidikan.

Tabel 1. Karakteristik Kurikulum MBKM dan Kurikulum Merdeka

Komponen Kurikulum	Kurikulum MBKM (PTB UNJ)	Kurikulum Merdeka (SMK DPIB)
Tujuan	Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang keilmuan	Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menguatkan kompetensi numerasi dan literasi siswa, serta menciptakan pembelajaran sesuai dengan capaian masing-masing siswa
Materi/Isi	Terdapat 8 semester dengan rincian 5 semester mempelajari mata kuliah pada program studi, 2 semester mempelajari mata kuliah di luar program studi, dan 1 semester belajar di luar kampus	Mempelajari mata pelajaran Kelompok Umum dan mata pelajaran kelompok Kejuruan
Metode/Strategi	<i>Student Centered Learning (SCL)</i>	Pembelajaran berpusat kepada siswa
Evaluasi	Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan	Asesmen formatif dan asesmen sumatif

Sumber: Buku Panduan MBKM (2020); Buku Panduan Kurikulum Merdeka (2021)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran. Penelitian deskriptif berfungsi membantu memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu fenomena yang diselidiki (Leonard A. Jason, 2016). Data dan informasi yang dikumpulkan berupa data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*) (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini dilakukan pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, SMK Negeri 58 Jakarta, dan SMK Negeri 52 Jakarta. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2022. Objek pada penelitian ini yaitu dokumen Kurikulum Merdeka, RPS Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, dan dokumen Capaian Pembelajaran (CP) Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Subjek pada penelitian ini yaitu guru SMK Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) yang berada di wilayah Jakarta Timur.

Pengumpulan data dilakukan dengan kajian literatur, dokumentasi, dan wawancara, dan analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Data yang dikumpulkan berupa angka yang nantinya dapat dideskripsikan secara verbal sehingga lebih mudah dipahami. Data dianalisis dengan menilai persentase setiap kompetensi atau elemen yang diperoleh untuk menentukan persentase rata-rata nilai. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{persentase skor} = \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor total}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, data persentase skor yang sudah dihitung kemudian dianalisis untuk diolah secara verbal sehingga hasil penelitian mudah dipahami. Identifikasi menggunakan patokan kategori tingkatan relevansi yang dikembangkan dari Efendi Rizal (2020) seperti tergambar pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategori Tingkatan Relevansi Kurikulum

Kategori	Simbol	Indikator	Skor
Sangat Relevan	SR	Apabila secara keseluruhan Kurikulum PTB FT UNJ relevan terhadap kompetensi SMK Bidang Keahlian Konstruksi dan Properti dengan Kurikulum Merdeka	80 – 100 %
Cukup Relevan	CR	Apabila cukup sebagian Kurikulum PTB FT UNJ relevan terhadap kompetensi SMK Bidang Keahlian Konstruksi dan Properti dengan Kurikulum Merdeka	20 - 79 %
Tidak Relevan	TR	Apabila secara keseluruhan Kurikulum PTB FT UNJ tidak relevan terhadap kompetensi SMK Bidang Keahlian Konstruksi dan Properti dengan Kurikulum Merdeka	< 20%

Sumber : Rizal Efendi (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil dari analisis komponen isi atau materi pada kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan terhadap SMK Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Dilihat dari kesesuaian atau keterkaitan, CP SMK Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada RPS Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan memiliki keterkaitan sebesar 80,77%, sehingga termasuk ke dalam kategori Sangat Relevan (SR).

Tabel 3. Hasil Analisis Keterkaitan tiap Capaian Pembelajaran

Kurikulum SMK Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan		Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan		SKOR
Elemen (Kompetensi)	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Mata Kuliah	
Proses bisnis menyeluruh pada bidang desain pemodelan dan informasi bangunan	gambar rumah sederhana	Mampu menggambar bagian-bagian bangunan dan detailnya dengan memperhatikan kaidah gambar teknik	Menggambar Teknik 2 & CAD	1
	Gambar rumah bertingkat	Mampu menggambar bagian-bagian bangunan dan detailnya dengan memperhatikan kaidah gambar teknik	Menggambar Teknik 2 & CAD	1
	Penerapan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH)	Mampu menguasai konsep K3 pekerjaan konstruksi bangunan	K3	1
	Dasar Manajemen Proyek	Dasar-dasar manajemen konstruksi	Manajemen Konstruksi	1
Perkembangan teknologi dan isu-isu global pada desain pemodelan dan informasi bangunan	<i>green building</i>	-	-	0
	<i>sustainable building</i>	-	-	0
Teknik dasar pada pekerjaan desain pemodelan dan informasi bangunan	Peralatan gambar	Mampu mengenal alat gambar	Gambar Teknik I	1
	peralatan ukur	Menjelaskan definisi ukur tanah	Ilmu Ukur Tanah	1
	pengoperasian dan perawatan alat ukur	Menjelaskan pengukuran dengan alat sederhana	Ilmu Ukur Tanah	1
Gambar teknik	Penggunaan alat gambar	Mampu mengenal alat gambar, garis & huruf yang digunakan pada gambar teknik	Gambar Teknik I	1
	Standar gambar teknik	Mampu memahami konsep dasar gambar teknik	Gambar Teknik I	1
	Dasar gambar proyeksi ortogonal (2D)	Mampu menggambar proyeksi isometrik	Gambar Teknik I	1
	Dasar gambar proyeksi piktorial (3D)	Mampu menggambar proyeksi isometrik	Gambar Teknik I	1
	Gambar manual	Mampu menggambar proyeksi isometrik	Gambar Teknik I	1
	Gambar menggunakan perangkat lunak	Konsep Dasar Penggunaan AutoCad	Menggambar Teknik 2 & CAD	1
<i>Building Information Modelling (BIM)</i>	Pengertian <i>Building Information Modelling (BIM)</i>	-	-	0
	Fungsi <i>Building Information Modelling (BIM)</i>	-	-	0
	Contoh penerapan <i>Building Information Modelling (BIM)</i>	-	-	0

Perhitungan statika bangunan	Elemen-elemen struktur bangunan	Mampu memahami Model beban, struktur dan peletakan	Mekanika Teknik I	1
	Perhitungan keseimbangan gaya batang pada rangka sederhana	Mampu menghitung Struktur Balok Sederhana	Mekanika Teknik I	1
Spesifikasi dan karakteristik bahan bangunan berbasis green material dan pekerjaan konstruksi	Spesifikasi dan karakteristik bahan bangunan berbasis <i>green material</i>	Mampu memahami jenis-jenis material bahan bangunan	Ilmu Bahan Bangunan	1
	Pengenalan, pengoperasian dan peralatan alat ukur tanah sederhana	Menjelaskan pengukuran dengan alat sederhana	Ilmu Ukur Tanah	1
	Pengenalan, pengoperasian dan peralatan alat ukur tanah profesional (manual/digital)	Menjelaskan Theodolith TO dan perawatannya dan menggunakan untuk pengukuran profil melintang & memanjang jalan	Ilmu Ukur Tanah	1
	Menghitung hasil praktik alat ukur theodolit	Menjelaskan Theodolith TO dan perawatannya dan menggunakan untuk pengukuran profil melintang & memanjang jalan	Ilmu Ukur Tanah	1
	Analisis hasil praktik alat ukur theodolith	Menghitung hasil pengukuran	Ilmu Ukur Tanah	1
	Evaluasi hasil pekerjaan pengukuran	Menghitung hasil pengukuran	Ilmu Ukur Tanah	1
PERSENTASE SKOR KETERKAITAN				80,77%
KATEGORI				Sangat Relevan

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis keterkaitan CP di SMK Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan dengan CPMK Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UNJ. Berikut ini pembahasan dari masing-masing elemen atau kompetensi pada Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB).

Elemen Proses Bisnis Menyeluruh pada Bidang DPIB

Proses bisnis menyeluruh bidang DPIB merupakan salah satu kompetensi atau elemen pada Kurikulum Merdeka. Berdasarkan hasil analisis tabel, kesesuaian pokok materi CP DPIB dengan CPMK PTB memiliki kesesuaian 100% dan termasuk ke dalam kategori Sangat Relevan (SR). Pokok bahasan pada elemen ini memiliki keterkaitan dengan beberapa mata kuliah yang terdapat pada Program Studi PTB UNJ, yaitu pada mata kuliah Menggambar Teknik II dan CAD, K3, serta Manajemen Konstruksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru DPIB, Elemen Proses Bisnis pada Bidang DPIB sendiri sudah diterapkan dalam pembelajaran baik di SMK Negeri 58 Jakarta maupun di SMK Negeri 52 Jakarta.

Elemen Perkembangan Teknologi dan Isu-isu Global pada DPIB

Berdasarkan hasil analisis, pokok materi elemen perkembangan teknologi dan isu-isu global DPIB pada CPMK Program Studi PTB UNJ dengan CP SMK Program Keahlian DPIB tidak memiliki kesesuaian. Elemen perkembangan teknologi dan isu global DPIB terdiri dari 2 capaian pembelajaran di antaranya terkait dengan materi *green building* dan *suitable building*. Materi isu terkait dengan *green building* dan *suitable building* ini berkaitan dengan pembangunan ramah lingkungan untuk

mengurangi kerusakan lingkungan (Sahid dkk., 2020). Untuk kelanjutan pembangunan di masa depan, khususnya di Indonesia, perlu adanya suatu pemahaman terkait perkembangan *green building* dan *suitable building* (Engkus, 2019; Sahid dkk., 2020). Cakupan dari elemen ini terdiri dari materi baru yang sebelumnya tidak terdapat di Kurikulum 2013 maupun Kurikulum 2013 Revisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang mengajar Mata Pelajaran Kejuruan di Program Keahlian DPIB, materi yang terdapat pada elemen Perkembangan Teknologi dan Isu-isu DPIB merupakan materi baru yang dikembangkan pada Kurikulum Merdeka ini yang belum ada pada kurikulum sebelumnya. Belum terdapat relevansi antara kurikulum yang terdapat pada Program Studi PTB UNJ dengan yang berada di SMK karena materi ini merupakan materi baru yang belum terdapat pada kurikulum sebelumnya. Dengan begitu, perlu adanya penyesuaian terkait dengan Kurikulum Merdeka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan elemen ini baik di SMK Negeri 58 Jakarta maupun di SMK Negeri 52 Jakarta masih belum maksimal karena kurangnya referensi terkait dengan materi tersebut. Seperti yang diungkapkan salah satu guru DPIB di SMK Negeri 52 Jakarta:

“Materi terkait sustainable building sulit untuk dicari referensi buku atau panduan yang membahas materi ini apalagi yang berbahasa Indonesia. Masih jarang dan walaupun ada kemungkinan hanya dasarnya saja”

Elemen Teknik Dasar pada Pekerjaan DPIB

Berdasarkan analisis, kompetensi CP pada elemen teknik dasar pekerjaan DPIB dengan CPMK pada RPS Program Studi PTB FT UNJ memiliki kesesuaian sebesar 100% sehingga termasuk ke dalam kategori Sangat Relevan (SR). Pada elemen teknik dasar pekerjaan DPIB sendiri terdapat tiga capaian pembelajaran yaitu materi mengenai peralatan gambar, peralatan ukur dan pengoperasian, serta perawatan alat ukur. Materi peralatan gambar memiliki keterkaitan dengan materi pengenalan alat gambar pada Mata Kuliah Gambar Teknik I Program Studi PTB FT UNJ. Sedangkan materi peralatan ukur, pengoperasian, serta perawatan alat ukur memiliki keterkaitan dengan alat ukur

sederhana pada Mata Kuliah Ilmu Ukur Tanah I Program Studi PTB FT UNJ. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa materi teknik dasar yang berkaitan dengan Ilmu Ukur tanah yang terdapat pada Pendidikan Teknik Bangunan UNJ memiliki kategori sangat relevan dengan hasil persentase sebesar 100% (Julistiana, dkk., 2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru DPIB, Elemen Teknik Dasar Pekerjaan DPIB sudah diterapkan dalam pembelajaran baik di SMK Negeri 58 Jakarta maupun di SMK Negeri 52 Jakarta.

Elemen Gambar Teknik

Berdasarkan analisis, kompetensi CP pada elemen Gambar Teknik SMK DPIB dengan CPMK pada RPS Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UNJ memiliki kesesuaian sebesar 100% sehingga termasuk ke dalam kategori Sangat Relevan (SR). Elemen gambar teknik terdiri dari 6 capaian pembelajaran dengan 5 capaian pembelajaran yang terdiri dari penggunaan alat gambar, standar gambar, dasar gambar proyeksi ortogonal, dasar gambar proyeksi piktorial, dan gambar manual. 5 CP ini memiliki keterkaitan materi dengan CPMK RPS Mata Kuliah Gambar Teknik I. Sementara capaian pembelajaran gambar menggunakan perangkat lunak selaras dengan CPMK RPS Mata Kuliah Menggambar Teknik II & CAD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julistiana, dkk. (2018), hasil tingkat relevansi untuk mata pelajaran Gambar Teknik termasuk besar yaitu 94,12%. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru DPIB, Elemen Gambar Teknik sudah diterapkan dalam pembelajaran baik di SMK Negeri 58 Jakarta maupun di SMK Negeri 52 Jakarta.

Elemen *Building Information Modelling* (BIM)

Elemen *Building Information Modelling* (BIM) merupakan kompetensi yang sebelumnya belum pernah ada dan merupakan materi baru pada Kurikulum Merdeka. BIM sendiri adalah seperangkat teknologi dan proses kebijakan yang seluruh prosesnya berjalan secara terintegrasi dalam suatu model digital yang setelah itu dapat diterjemahkan sebagai gambar tiga dimensi (Ramadhan & Maulana, 2020). Berdasarkan analisis, CP pada Elemen BIM tidak memiliki kesesuaian dengan CPMK mata kuliah

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UNJ. BIM sendiri memang belum termasuk ke dalam materi salah satu mata Kuliah di UNJ namun sudah terdapat kegiatan pelatihan di luar mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa dalam mempelajari materi BIM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru DPIB, Elemen BIM belum sepenuhnya diterapkan. Namun, pada SMK Negeri 52 Jakarta elemen ini sudah mulai dipelajari di kelas X, sedangkan pada SMK Negeri 58 Jakarta baru mulai dipelajari pada kelas XI. Perbedaan ini karena konsep dari Kurikulum Merdeka sendiri yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang kurikulum satuan pendidikannya sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Belum terdapat relevansi antara kurikulum yang terdapat pada Program Studi PTB UNJ dengan yang berada di SMK karena materi ini merupakan materi baru yang belum terdapat pada kurikulum sebelumnya, sehingga perlu adanya penyesuaian. Seluruh guru yang mengajar di SMK DPIB berpendapat bahwa seorang mahasiswa yang lulusannya menjadi guru di SMK perlu mempelajari materi ini untuk mempersiapkan diri saat nantinya menjadi seorang guru.

Elemen Statika Bangunan

Berdasarkan analisis, kompetensi CP pada elemen Statika Bangunan SMK DPIB memiliki kesesuaian sebesar 100% dengan CPMK pada RPS pada Mata Kuliah Program Studi PTB FT UNJ sehingga termasuk ke dalam kategori Sangat Relevan (SR). Pada elemen statika bangunan terdapat 2 CP yang terdiri dari materi elemen struktur bangunan dan perhitungan keseimbangan gaya batang. Kedua capaian tersebut memiliki kesesuaian dengan pokok materi yang terdapat CPMK Mekanika Teknik I. Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang sama yaitu tingkat relevansi materi statika bangunan yang ada di perguruan tinggi dengan yang ada di SMK memiliki hasil sangat relevan dengan persentase sebesar 88,89% (Julistiana, dkk., 2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru DPIB, Elemen Statika Bangunan sudah diterapkan dalam pembelajaran baik di SMK Negeri 58 Jakarta maupun di SMK Negeri 52 Jakarta.

Elemen Spesifikasi dan Karakteristik Bahan Bangunan Berbasis *Green Material* dan Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan analisis, kompetensi CP pada elemen Spesifikasi dan Karakteristik Bahan Bangunan dan Pekerjaan Konstruksi SMK DPIB memiliki kesesuaian sebesar 100% dengan CPMK pada RPS Program Studi PTB FT UNJ sehingga termasuk ke dalam kategori Sangat Relevan (SR).

Pada elemen ini terdapat 6 CP yaitu spesifikasi dan karakteristik bahan bangunan berbasis *green material*, pengenalan dan pengoperasian alat ukur tanah sederhana, pengenalan dan pengoperasian alat ukur tanah profesional, menghitung hasil praktik alat ukur theodolite, analisis hasil praktik alat ukur theodolite, serta evaluasi hasil pekerjaan pengukuran. Seluruh CP pada elemen ini memiliki kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik UNJ yaitu pada spesifikasi dan karakteristik bahan bangunan berbasis *green material*. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru DPIB, Elemen Spesifikasi dan Karakteristik Bahan Bangunan sudah diterapkan dalam pembelajaran baik di SMK Negeri 58 Jakarta maupun di SMK Negeri 52 Jakarta.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kurikulum Program Studi PTB FT UNJ termasuk dalam kategori Sangat Relevan (SR) terhadap kompetensi SMK Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan pada Kurikulum Merdeka dengan hasil keterkaitan sebesar 80,77%. Relevansi yang dilihat berdasarkan keterkaitan antara CPMK Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UNJ dengan CP SMK Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan pada Kurikulum Merdeka. Terdapat beberapa materi dalam CP yang belum tercakup pada mata kuliah serta kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan dikarenakan materi tersebut merupakan materi baru pada Kurikulum Merdeka. Materi tersebut merupakan materi yang sebelumnya belum terdapat pada Kurikulum 2013 serta kurikulum sebelumnya. Namun, terlepas dari perbedaan dan perubahan tersebut, seorang

guru profesional harus senantiasa belajar dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri menghadapi segala perkembangan yang ada.

Usulan Kebijakan

Mengacu pada simpulan, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 1) Perguruan tinggi khususnya Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UNJ sebaiknya perlu untuk memperbarui kurikulum berkaitan dengan regulasi tentang kurikulum yang berkembang. Dapat dilakukan dengan menambahkan mata kuliah atau menyisipkan materi baru pada mata kuliah yang sudah ada sebelumnya.

Dalam melakukan perubahan kurikulum sebaiknya pemerintah mempertimbangkan materi baru yang akan ditambahkan. Sepatutnya guru difasilitasi dengan buku referensi atau materi terutama pada materi baru. Hal ini sangat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan kurikulum. Guru yang nantinya akan mengajar harus diberikan banyak pelatihan baik secara luring maupun daring. Pihak universitas juga disarankan ikut serta dalam pelatihan ini sehingga dapat membentuk sinergi dan pelaksanaannya dapat sesuai baik untuk dosen, guru, dan siswa.

PUSTAKA ACUAN

Alifin Nur, N., & HP, S. (2019). Kesesuaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Kurikulum 2013 SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton (TKBB) dengan Kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) Jasa Konstruksi di D.I. Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Teknik Sipil*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jpts.v1i1.28275>

Andine, S. P. (2020). *Implementasi Konsep Kampus Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.

Efendi, M. R. (2020). Relevansi Materi Mata Pelajaran Menggambar SMK dalam Rangka Rintisan Pengembangan Materi Mata Kuliah Menggambar S-1 Pendidikan Teknik Bangunan FT-UNESA. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, 6(2).

Ekaningrum, Y., & Restami, M. (2015). Kesesuaian Kurikulum 2013 SMK Akomodasi Perhotelan dengan Kurikulum Prodi Perhotelan Poltek NSC Surabaya. *Jurnal Bisnis Teknologi*, 2(1), 29-33.

Engkus. (2019). Green Building Policy Formulation in the Municipality of Bandung Indonesia. *Sosiohumaniora*, 21(3), 296-304. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23612>

Indarta, Y., Jalinus, N., Waskito, W., Samala, A. D., Riyanda, A. R., & Adi, N. H. (2022). Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar dengan Model Pembelajaran Abad 21 dalam Perkembangan Era Society 5.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 3011-3024. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2589>

Julistiana, E., Murtinugraha, E., & Bachtiar, G. (2018). Relevansi Materi Ajar di Prodi PTB FT UNJ dengan Materi Ajar di SMK Program Keahlian Teknik Bangunan. *Jurnal Pensil: Pendidikan Teknik Sipil*, 7(1), 1-8.

Leonard A. Jason, D. S. G. (2016). *Handbook of Methodological Approaches To Community-Based Research*. Oxford University Press.

Mansyukur. (2018). *Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum*. AURA.

Ramadhan, M. A., & Maulana, A. (2020). Revit Bagi Guru SMK Teknik Bangunan Se-JABODETABEK. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).

Rustanti, L., Murtinugraha, R. E., & Saleh, R. (2021). Kesesuaian antara Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan UNJ dengan Kurikulum SMK Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan. *Jurnal Pendidikan Teknik Sipil*, 3(1), 38-44.

Sahid, Sumiyati, Y., & Purisari, R. (2020). The Constrains of Green Building Implementation in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1485(1), 0-10. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1485/1/012050>

Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>

ABSTRACT

This research tries to evaluate the efficiency of the vocational school distribution by examining the supply-demand pattern of vocational school graduates at the national and regional levels in Indonesia using employment, underemployment, and wage level as the indicators. We use the recent data of the Indonesian National Labor Force Survey (Sakernas) and Core Educational Data (Dapodik) to conduct statistical analysis assessing the vocational school graduates. The result indicates that vocational school graduates' odds to get a job is generally better than the high school graduates. However, the study finds that high school graduates get higher wage level compared to vocational school graduates. Moreover, there is a different pattern of enrolment of the vocational study program in different regions. The results also suggest that job training with a certificate has a better effect on higher earnings than graduating vocational schools. The result can be considered as a valuable input in the form of policy recommendation to recalculate which study program that is needed in which region and providing alternatives to take job-training as a strategy to boost workers wage level.

Key words: *dapodik, vocational education, SMK, sakernas, labor market*

ABSTRAK

Penelitian ini mengukur efisiensi distribusi sekolah kejuruan melalui pola permintaan-penawaran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tingkat nasional dan daerah di Indonesia dengan indikator lapangan kerja, setengah pengangguran, dan tingkat upah. Penulis menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional Indonesia (Sakernas) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk melakukan analisis statistik dalam menilai lulusan SMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang lulusan SMK untuk mendapatkan pekerjaan umumnya lebih baik dibandingkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, penulis menemukan bahwa lulusan SMA mendapatkan tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMK. Selain itu, penulis juga menemukan adanya perbedaan pola pendaftaran program studi vokasi di berbagai daerah. Temuan lain juga menunjukkan bahwa pelatihan kerja dengan sertifikat memiliki efek yang lebih baik terhadap penghasilan dibanding menamatkan SMK. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk mengkaji kembali program studi apa yang dibutuhkan di daerah tertentu serta memberikan alternatif untuk mengikuti pelatihan kerja sebagai strategi untuk mendongkrak tingkat upah pekerja.

Kata kunci: *dapodik, pendidikan vokasi, SMK, sakernas, tenaga kerja*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mempromosikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jargon “SMK Bisa!”, meski temuan atas keberhasilannya dalam meningkatkan pasar tenaga kerja masih terbatas. Melihat pengalaman negara lain, penulis menemukan dampak positif dari bersekolah di SMK di Thailand, Mesir, dan Israel. Sebaliknya, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat upah lebih tinggi di Suriname dan Tanzania. Berbeda dengan dua kelompok sebelumnya, Jerman Timur, Korea Selatan, dan Romania menunjukkan bahwa baik SMK maupun SMA mendapat upah yang sama (Newhouse dan Suryadarma, 2011).

Newhouse dan Suryadarma (2011) dan Chen (2009) telah melakukan penelitian pada sistem pendidikan vokasi di Indonesia. Newhouse dan Suryadarma (2011) dengan menggunakan data *Indonesian Family Life Survey* (IFLS), mengungkapkan bahwa upah untuk perempuan lulusan SMA lebih tinggi dibandingkan laki-laki lulusan SMA. Bahkan, laki-laki lulusan SMK menderita premium negatif upah yang cukup besar. Chen (2009) menemukan adanya kesesuaian upah dan hasil pekerjaan pada tingkat upah yang serupa dengan data IFLS.

Penelitian ini mencoba mengevaluasi SMK di Indonesia dengan melihat apakah lulusan SMK menciptakan tenaga kerja yang lebih baik. Penelitian mengukur capaian lulusan dengan mengamati tingkat pengangguran, setengah pengangguran, dan upah riil menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Selain itu, penulis juga membandingkan perbedaan profil lulusan antara SMK dan SMA di tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya, penulis mencoba menggambarkan dinamika keseimbangan penawaran dan permintaan sekolah kejuruan itu sendiri untuk menjelaskan program studi apa yang peminatnya bertumbuh dan berkurang menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sebagai informasi tambahan, artikel ini juga ingin membahas beberapa temuan mengenai karakteristik industri yang dimiliki oleh lulusan SMK dan SMA serta apa perbedaannya dengan lulusan pendidikan jenis lain.

Idealnya, analisis dilakukan dengan menggunakan data dari survei penelusuran yang terdiri dari indikator pilihan sekolah, program studi, dan pekerjaan individu termasuk pendapatan

mereka. Namun, penulis memutuskan untuk menggunakan dua kumpulan data yang terpisah karena data dari survei penelusuran saat ini tidak tersedia. Sakernas mencakup informasi pasar kerja sedangkan Dapodik mencakup informasi lembaga pendidikan. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing data akan diberikan kemudian.

Penelitian ini memberi dua kontribusi pada diskusi kebijakan. *Pertama*, membedakan pengaruh bersekolah di SMK dan SMA terhadap peluang bekerja dan tingkat upahnya di tingkat nasional dan daerah. *Kedua*, menggunakan informasi pola pendaftaran SMK di tingkat nasional dan daerah. Meskipun saat ini tidak dapat memberikan analisis yang lebih menyeluruh dengan menggunakan Dapodik, penulis berharap data yang lebih rinci akan tersedia untuk studi yang akan datang.

Ada empat temuan utama dari penelitian ini. *Pertama*, analisis tingkat nasional mengungkap bahwa lulusan SMK memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan lulusan SMA. Penulis juga menemukan bahwa efeknya bervariasi di tingkat daerah. Lulusan SMK mendapatkan manfaat positif hanya di Sumatra, Jawa/Bali, Sulawesi, dan Maluku. *Kedua*, lulusan SMK juga punya probabilitas yang lebih rendah untuk menjadi setengah menganggur ketika mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Hasilnya menunjukkan efek yang berbeda di tingkat daerah. Penulis menemukan bahwa peluang lebih rendah bagi lulusan SMK untuk setengah menganggur hanya terdapat di Sumatra, Jawa/Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. *Ketiga*, penulis menemukan bahwa lulusan SMK berpenghasilan lebih rendah daripada lulusan SMA meskipun kemungkinan mereka mendapatkan pekerjaan lebih tinggi. Di tingkat daerah, perhitungan penulis menemukan bahwa lulusan SMK di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dibayar lebih rendah daripada rekan lulusan SMA mereka. *Keempat*, meskipun sertifikat pelatihan tidak selalu meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan, namun dapat memberikan efek yang lebih baik pada tingkat upah daripada masuk SMK. Hasil tersebut juga konsisten ketika kita menghitung di tingkat daerah.

Artikel ini terdiri atas empat bagian. *Pertama*, penulis akan menjelaskan pendidikan menengah di Indonesia secara singkat. *Kedua*, akan

dijelaskan data yang penulis gunakan dan menjelaskan relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Bagian *ketiga* dan *keempat* masing-masing akan memaparkan temuan-temuan di tingkat nasional dan daerah.

Pendidikan Menengah di Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membagi sistem pendidikan Indonesia menjadi tiga bagian: pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan menengah dibagi menjadi pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas; masing-masing membutuhkan waktu tiga tahun untuk menyelesaikannya. Pendidikan menengah atas dibedakan dengan kurikulum inti untuk sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan. Sementara SMA umum menyediakan tiga jenis jurusan (yaitu IPA, IPS, dan Bahasa), SMK memiliki berbagai jurusan yang terbagi menjadi 9 jenis keahlian (yaitu agribisnis, bisnis dan manajemen, energi dan pertambangan, maritim, pekerja kesehatan dan sosial, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknik, dan TIK). Rata-rata, anak-anak berusia sekitar 15 tahun harus memilih jenis pendidikan menengah atas tempat mereka akan belajar. *Pertama*, mereka mungkin memutuskan untuk melanjutkan SMA umum yang akan dirujuk ke SMA.¹ *Kedua*, mereka mungkin memutuskan untuk melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan yang akan dirujuk ke SMK.²

Menurut Kemendikbud (2017), setelah menyelesaikan SMA atau SMK, siswa dapat memilih untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau memutuskan untuk memasuki pasar kerja sebagai pencari kerja. Dalam merancang SMK, Kemendikbud menggunakan konsep Djojonegoro (1998) yang menggambarkan SMK sebagai institusi untuk mempersiapkan siswa memasuki pasar tenaga kerja sebagai tenaga kerja yang lebih terampil dibandingkan dengan SMA. Oleh karena itu, Kemendikbud secara umum membedakan lulusan SMK dari lulusan SMA berdasarkan kompetensi mereka dalam keterampilan khusus yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja (Menteri Pendidikan Nasional, 2009).

- 1 Definisi penulis tentang SMA juga mencakup siswa atau lulusan dari sekolah agama dan sekolah luar biasa (misalnya SMA-LB, MA, dan MA-LB).
- 2 Definisi tentang SMK juga mencakup siswa atau lulusan sekolah agama (misalnya MAK).

Pada tahun 2006, Kemendikbud mulai memperluas sistem sekolah kejuruan. Tujuan utamanya untuk mengurangi jumlah pengangguran kaum muda dengan menyiapkan sejumlah besar angkatan kerja yang siap bekerja di sektor industri. Kemendikbud memperkenalkan paradigma "SMK Bisa!" untuk menegaskan gagasan bahwa lulusan SMK dapat berprestasi lebih baik daripada lulusan SMA ketika memasuki pasar tenaga kerja. Kemendikbud juga telah meningkatkan alokasi anggaran untuk SMK dari tahun 2006 hingga 2016 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

METODE PENELITIAN

Penulis kesulitan mendapatkan data yang komprehensif dan terbaru untuk mengevaluasi *output* SMK. Oleh karena itu, makalah ini menggunakan dua set data untuk menangkap lulusan sekolah kejuruan di pasar tenaga kerja. *Pertama*, penulis menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Indonesia yang dikumpulkan pada semester kedua tahun 2016. *Kedua*, menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Survei Angkatan Kerja Nasional Indonesia, disingkat Sakernas, dirancang untuk mengumpulkan informasi umum angkatan kerja Indonesia antarperiode survei (Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk & Tenaga Kerja, 2017). Tujuan utama Sakernas adalah untuk mendapatkan pemutakhiran angkatan kerja Indonesia secara berkala, khususnya untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah orang yang bekerja, menganggur, tidak bekerja lagi, dan berpindah pekerjaan di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Sakernas (2016) mengumpulkan informasi dari 200.000 rumah tangga sebagai sampel di seluruh Indonesia. Data tersebut memberikan informasi umum seperti jumlah pekerja, tingkat upah, jam kerja, dan karakteristik individu lainnya (misalnya usia, provinsi, pendidikan).

Data Pokok Pendidikan yang disingkat Dapodik adalah sistem basis data berskala nasional yang menghimpun dan menyimpan informasi yang relevan dengan perencanaan pendidikan nasional. Izin akses Dapodik diatur oleh Kemendikbud (Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia, 2017). Dapodik terdiri dari, namun tidak terbatas pada data siswa, fasilitas sekolah, data kepala sekolah, alokasi anggaran, profil guru, dan deskripsi kurikulum. Meskipun Dapodik menggambarkan sistem basis data berskala besar, penelitian ini hanya menggunakan aspek tertentu dari Dapodik yang tersedia untuk umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jumlah siswa kelas 10 sampai 12 dari setiap program studi di semua SMK yang terdaftar di Indonesia. Tanggal pengambilan pastinya tidak tercatat, tetapi pada awal tahun 2018. Dengan demikian, pemutakhiran terakhir mencakup data yang diunggah pada Desember 2017. Singkatnya, penulis memiliki data populasi siswa SMK beserta program studi dan jenis keahliannya.

Data tersebut dianalisis secara deskriptif dan inferensi statistik. Analisis inferensi statistik dilakukan menggunakan regresi OLS. Regresi OLS dipilih karena fiturnya untuk mengukur besaran dampak (*size-effect*) dari kriteria pendidikan. Keterangan model OLS akan dijelaskan lebih lanjut pada masing-masing bagian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lulusan SMK pada Pasar Tenaga Kerja Nasional

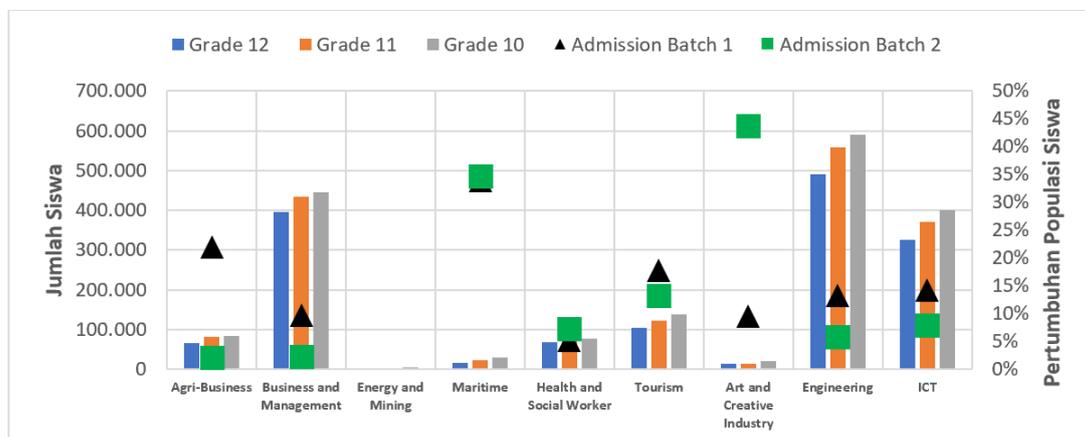
Pada bagian ini, penulis akan memulai pembahasan dengan menjelaskan partisipasi SMK sebagai alat ukur keseimbangan pasar pendidikan di tingkat nasional. Penjelasan penulis menggambarkan berapa banyak siswa yang terdaftar di SMK dan bagaimana ukuran tersebut merepresentasikan pola penerimaan. Kemudian, bagian selanjutnya mengkaji

pasar tenaga kerja dengan menggunakan tingkat kesempatan kerja, tingkat setengah pengangguran, dan tingkat upah sebagai ukuran keseimbangan pasar tenaga kerja. Pada bagian kedua, penulis juga akan memberikan hasil studi sesuai hasil analisis regresi.

Kemendikbud berencana meningkatkan jumlah SMK untuk memenuhi rasio 70:30 terhadap SMA. Oleh karena itu, anggaran besar-besaran dialokasikan untuk SMK secara bertahap dari tahun 2006 hingga 2016 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Dalam jangka waktu 10 tahun, anggaran SMK dinaikkan enam kali lipat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Mengingat bahwa pengeluaran per siswa untuk SMK lebih tinggi daripada SMA (Newhouse & Suryadarma, 2011), penulis memperkirakan bahwa anggaran tersebut dapat melampaui anggaran SMA saat ini. Peningkatan alokasi anggaran untuk SMK membuat Kemendikbud harus mengurangi alokasi yang lain, mengingat anggaran pendidikan selalu di atas 20% dari APBN. Pemerintah saat ini membutuhkan lebih banyak bukti untuk melihat jenis keahlian mana yang harus mereka investasikan lebih banyak dan mana yang harus mereka hitung ulang.

Pendaftaran SMK menjadi pelopor angkatan kerja masa depan

Gambar 1 menunjukkan, pada semua jenis keahlian, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah pendaftaran siswa di tingkat nasional. Untuk jenis keahlian yang sudah memiliki peserta didik relatif banyak, peningkatan penerimaan peserta didik relatif lebih rendah, seperti bisnis dan manajemen, teknik, dan TIK.



Gambar 1. Jumlah Siswa SMK di Indonesia Tahun 2017

Namun, meskipun memiliki jumlah siswa relatif rendah, jurusan agribisnis, pekerja kesehatan dan sosial, dan pariwisata memiliki peningkatan siswa yang diterima relatif rendah. Temuan ini mungkin menunjukkan bahwa keahlian dengan peningkatan rendah siswa yang diterima mungkin telah mencapai kematangannya. Untuk industri kemaritiman dan kreatif, tren pertumbuhannya relatif lebih tinggi dibandingkan bidang keahlian lainnya. Ada harapan bahwa jumlahnya akan meningkat di tahun berikutnya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis keahlian menjadi matang sementara yang lainnya masih tumbuh. Namun, penulis belum bisa mendapatkan bukti jumlah siswa yang ideal untuk setiap jenis keahlian.

Peluang lulusan SMK dan SMA di pasar tenaga kerja

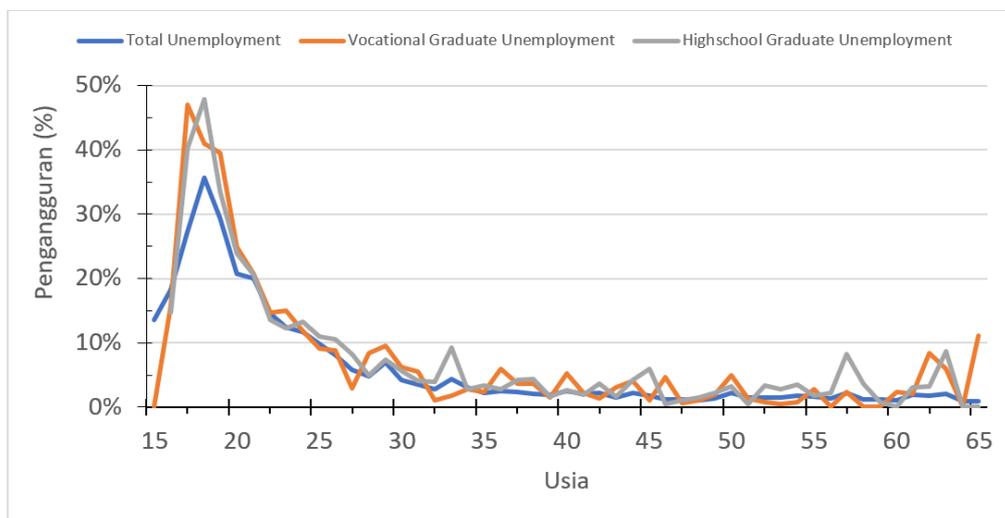
Dengan mencermati Gambar 2, secara visual dapat dilihat bahwa pola tingkat pengangguran antara lulusan SMK, lulusan SMA, dan seluruh angkatan kerja serupa. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang peran lulusan SMK di pasar tenaga kerja, artikel ini menyarankan untuk membandingkannya secara *head-to-head* dengan lulusan SMA.

Gambar 3 menunjukkan pola yang sama dari tingkat pengangguran dan setengah pengangguran lulusan SMK dan SMA. Grafik

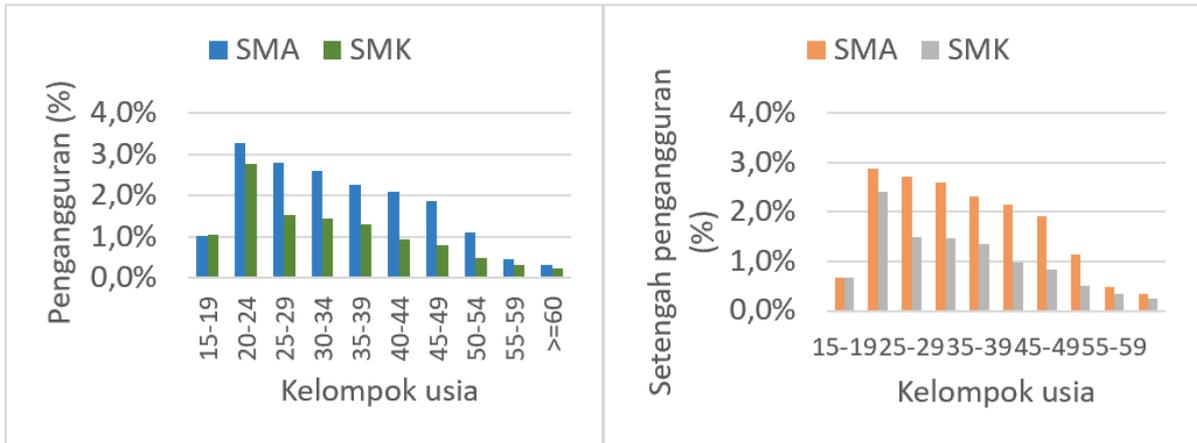
ini dihasilkan dari Sakernas 2016. Grafik pengangguran dihasilkan dengan menghitung rasio mereka yang berada dalam angkatan kerja, tetapi tidak bekerja terhadap mereka yang menyatakan diri sudah memiliki pekerjaan atau sedang bekerja atau sedang membuka atau menjalankan usaha sendiri. Grafik setengah pengangguran menghitung jumlah lulusan SMA dan SMK yang menyatakan memiliki pekerjaan dan bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Perlu diingat bahwa tingkat setengah pengangguran yang ditunjukkan pada Gambar 3 tergantung pada status pekerjaan.

Dari Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran mulai meningkat secara signifikan pada kelompok usia 20 hingga 24 tahun dan secara bertahap menurun pada kelompok usia tertua. Rendahnya tingkat pengangguran pada kelompok usia pertama ini mungkin disebabkan oleh usia sekolah, atau sebagian besar siswa masih terkait seluruhnya atau sebagian terkait dengan program SMK dan SMA mereka, yaitu melakukan magang atau *on-the-job training*.

Menurut Gambar 3 juga, dapat dilihat bahwa pola setengah pengangguran dibentuk serupa dengan pengangguran. Kelompok usia termuda memiliki tingkat setengah pengangguran yang rendah, dan angka tersebut melonjak pada kelompok usia kedua dan secara bertahap menurun pada kelompok usia berikutnya.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Indonesia Tahun 2016



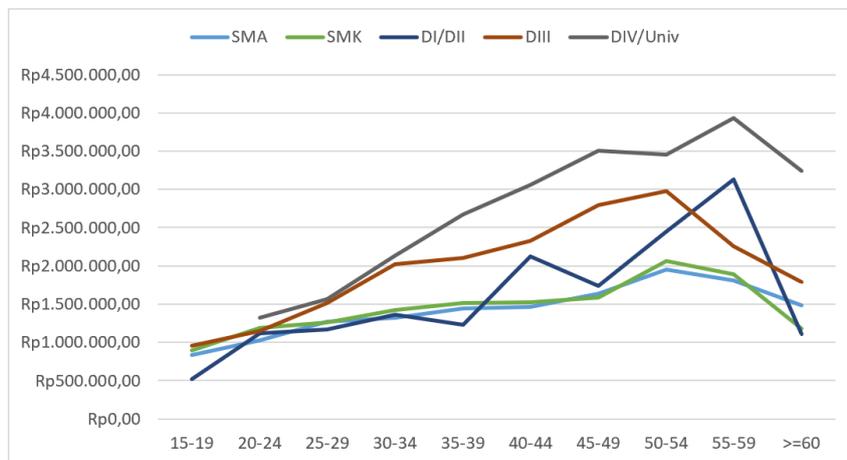
Gambar 3. Tingkat Pengangguran dan Setengah Pengangguran Lulusan Tahun 2016

Melihat Gambar 3 secara lebih kasar, dapat dilihat bahwa peluang lulusan SMK mendapatkan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA. Kesimpulan kasar serupa juga berlaku untuk setengah pengangguran di mana lulusan SMK cenderung memiliki peluang lebih rendah untuk menjadi setengah pengangguran dibandingkan lulusan SMA karena pola serupa yang telah dijelaskan sebelumnya.

Setelah memeriksa kemungkinan mereka tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi pekerjaan penuh waktu, pembahasan berikut akan menunjukkan berapa banyak mereka dibayar. Gambar 4 menunjukkan upah bulanan riil yang diterima pekerja menurut tingkat pendidikan tertinggi yang meliputi SMA, SMK, D1, D2, D3, dan D4 atau S1. Bagan ini juga dihitung dengan menggunakan Sakernas 2016 dan disesuaikan dengan inflasi untuk mendapatkan upah riil.

Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat upah secara visual berhubungan dengan tingkat pendidikan pekerja. Pekerja dengan gelar sarjana memiliki upah tertinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki gelar sarjana. Pola yang juga konsisten dengan D1, D2, dan D3 dari satu tahun studi tambahan umumnya memberikan tingkat upah yang lebih tinggi.

Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat upah lulusan SMA dan SMK secara visual serupa. Hal ini menunjukkan bahwa SMK dan SMA tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal tingkat upah. Seperti teori umum bahwa produktivitas tercermin pada tingkat upah, dapat diduga bahwa produktivitas SMA dan SMK tidak jauh berbeda dengan mengasumsikan bahwa semua aksioma diterapkan. Jika ini benar, maka misi Kemendikbud untuk menyediakan tenaga kerja terampil dengan memperkenalkan SMK dan berupaya meningkatkan rasio SMK terhadap SMA belum terlihat dampaknya.



Gambar 4. Upah Riil Bulanan menurut Tingkat Pendidikan

Untuk memeriksa data lebih dalam, dibutuhkan analisis statistik untuk memverifikasi apakah interpretasi visual sudah tepat.

Analisis statistik

Untuk memverifikasi apakah tingkat pengangguran, setengah pengangguran, dan tingkat upah berbeda antara lulusan SMA dan SMK, penulis melakukan dua analisis regresi. *Pertama*, penulis akan menguji apakah setengah pengangguran dan tingkat pekerjaan secara signifikan dipengaruhi oleh jenis sekolah menggunakan analisis regresi logit. *Kedua*, penulis akan menguji apakah jenis sekolah secara signifikan memengaruhi tingkat upah menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*.

Untuk pengaruh SMA/SMK terhadap tingkat kesempatan kerja, penulis menggunakan Model 1:

Model 1

$$\begin{aligned} \text{Unemployed}_i &= \beta_{\text{SMK}}\text{SMK}_i \\ &+ \beta_{\text{Certificate}}\text{Certificate}_i \\ &+ \beta_{\text{region}}\text{Region}_i + \beta_{X_i}X_i + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Untuk pengaruh SMA/SMK terhadap tingkat setengah pengangguran, penulis menggunakan Model 2 dengan syarat sedang bekerja:

Model 2

$$\begin{aligned} \text{Underemployed}_i &= \beta_{\text{SMK}}\text{SMK}_i \\ &+ \beta_{\text{Certificate}}\text{Certificate}_i \\ &+ \beta_{\text{region}}\text{Region}_i + \beta_{X_i}X_i + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Baik pada Model 1 maupun Model 2, adalah *dummy* untuk bekerja atau menganggur, adalah *dummy* untuk mencapai SMK atau SMA, adalah *dummy* untuk melakukan *on-the-job training* atau pelatihan apa saja yang berhubungan dengan pekerjaan yang disediakan sertifikat setelah selesai, adalah variabel kategori untuk wilayah (misalnya Jawa/Bali, Sumatra, Kalimantan), adalah vektor dari variabel kontrol yang mencakup karakter individu, dan merupakan eror perhitungan.

Tabel 1. Regresi Logit untuk Status Menganggur dan Setengah Menganggur

LOGIT REGRESSION	UNEMPLOYMENT	UNDEREMPLOYMENT
<i>Urban (Dummy)</i>	0.058***	-0.758***
	-0.001	-0.001
<i>Male (Dummy)</i>	0.044***	-0.703***
	-0.001	-0.001
<i>ln(Age)</i>	-2.292***	0.119***
	-0.003	-0.002
<i>Married (Dummy)</i>	-1.399***	-0.179***
	-0.002	-0.001
<i>Owning Certificate (Dummy)</i>	-0.069***	-0.166***
	-0.002	-0.001
<i>General high school (Base)</i>	0	0
	(.)	(.)
<i>Vocational high school (Dummy)</i>	-0.097***	-0.325***
	-0.002	-0.001
<i>Sumatra (Dummy)</i>	-0.200***	0.447***
	-0.002	-0.001
<i>Java/Bali (Base)</i>	0	0
	(.)	(.)
<i>Kalimantan (Dummy)</i>	-0.186***	0.254***
	-0.003	-0.002
<i>Sulawesi (Dummy)</i>	-0.449***	0.448***
	-0.003	-0.002
<i>Nusa Tenggara (Dummy)</i>	-0.626***	0.641***
	-0.005	-0.003
<i>Maluku (Dummy)</i>	0.076***	0.483***
	-0.006	-0.004
<i>Papua (Dummy)</i>	-0.163***	0.415***
	-0.006	-0.004
<i>Constant</i>	5.948***	-0.987***
	-0.009	-0.006
<i>N</i>	3.61E+07	3.26E+07

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Hasil reduksi logit Model 1 dan Model 2 disajikan pada Tabel 1. Hasilnya menunjukkan bahwa belajar di SMK memberi kemungkinan lebih rendah secara statistik untuk menganggur dan setengah menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi lulusan SMK dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam bersaing di pasar kerja. Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa memiliki sertifikat kursus pelatihan juga memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan baik untuk lulusan SMA maupun SMK.

Dari analisis regresi yang menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja minimal 35 jam seminggu, penulis juga perlu memeriksa apakah lulusan SMK secara signifikan memengaruhi tingkat upah. Oleh karena itu, penulis menggunakan Model 3 untuk menguji pengaruh SMK terhadap tingkat upah.

Model 3

$$\begin{aligned} \text{RMWage}_i &= \beta_{\text{SMK}}\text{SMK}_i + \beta_C C_i + \beta_R R_i + \beta_W W_i \\ &+ \beta_{\text{SMK}_i R_i} \text{SMK}_i R_i + \beta_{X_i} X_i + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Tabel 2. Regresi OLS untuk Upah Riil Bulanan

OLS REGRESSION FOR LN(REALMWAGE)	MODEL 3A	MODEL 3B	MODEL 3C
Urban (Dummy)	0.201***	0.198***	0.199***
	0	0	0
Male (Dummy)	0.218***	0.217***	0.217***
	0	0	0
ln(Age)	0.343***	0.338***	0.333***
	-0.001	-0.001	-0.001
Married (Dummy)	0.068***	0.069***	0.069***
	0	0	0
Owning Certificate (Dummy)	0.182***	0.183***	0.183***
	0	0	0
Work at least one year (Dummy)	0.187***	0.186***	0.186***
	0	0	0
Status: Own account (Base)	0	0	0
	(.)	(.)	(.)
Status: Employee (Dummy)	0.176***	0.178***	0.178***
	-0.001	-0.001	-0.001
Status: Casual worker in agricultural sector (Dummy)	-0.216***	-0.211***	-0.211***
	-0.001	-0.001	-0.001
Status: Casual worker in non-agricultural sector (Dummy)	-0.204***	-0.204***	-0.204***
	-0.001	-0.001	-0.001
Distance: < 10km (Base)	0	0	0
	(.)	(.)	(.)
Distance: 10 - 29 km (Dummy)	0.187***	0.185***	0.185***
	0	0	0
Distance: > 30 km (Dummy)	0.321***	0.320***	0.320***
	-0.001	-0.001	-0.001
General high school (Base)	0	0	0
	(.)	(.)	(.)
Vocational high school (Dummy)	0	-0.049***	-0.087***
	0	-0.001	-0.004
Sumatra (Dummy)	-0.109***	-0.118***	-0.119***
	0	0	0
Java/Bali (Base)	0	0	0
	(.)	(.)	(.)
Kalimantan (Dummy)	0.016***	-0.011***	-0.012***
	-0.001	-0.001	-0.001
Sulawesi (Dummy)	-0.151***	-0.142***	-0.142***
	-0.001	-0.001	-0.001
Nusa Tenggara (Dummy)	-0.325***	-0.358***	-0.359***
	-0.001	-0.001	-0.001
Maluku (Dummy)	-0.090***	-0.106***	-0.106***
	-0.001	-0.001	-0.001
Papua (Dummy)	0.219***	0.191***	0.191***
	-0.001	-0.002	-0.002
Vocational high school # Sumatra		0.021***	0.021***
		-0.001	-0.001
Vocational high school # Java/Bali		0	0
		(.)	(.)
Vocational high school # Kalimantan		0.083***	0.083***
		-0.001	-0.001
Vocational high school # Sulawesi		-0.047***	-0.046***
		-0.002	-0.002
Vocational high school # Nusa Tenggara		0.101***	0.102***
		-0.002	-0.002
Vocational high school # Maluku		0.056***	0.056***
		-0.003	-0.003
Vocational high school # Papua		0.079***	0.080***
		-0.003	-0.003
Vocational high school # ln_age			0.010***
			-0.001
Constant	12.124***	12.160***	12.175***
	-0.002	-0.002	-0.003
R-squared	0.285	0.29	0.29
N	2.07E+07	2.07E+07	2.07E+07

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

RMWage_i merepresentasikan upah bulanan riil (logaritmik) yang dilaporkan oleh responden, merepresentasikan *dummy* SMK terhadap SMA, merepresentasikan *dummy* sertifikat, merupakan variabel kategori wilayah, merepresentasikan *dummy* sudah bekerja selama satu tahun pada pekerjaan saat ini, merepresentasikan interaksi antara mencapai SMK dan lokasi bekerja, mencakup semua variabel kontrol, dan menempatkan istilah kesalahan dalam Model 3. Penulis juga memperluas Model 3 ke Model 3A,

Model 3B, dan Model 3C yang memiliki sedikit modifikasi untuk memeriksa ketahanannya.

Hasilnya menunjukkan lulusan SMK mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan rekannya. Meskipun besarnya relatif kecil, secara statistik signifikan. Hasilnya juga cenderung menggembirakan, bahwa memiliki sertifikat meningkatkan tingkat upah yang sama besarnya dengan sudah bekerja di pekerjaan saat ini setidaknya selama satu tahun.

Dengan memperhatikan besarnya, mendapatkan sertifikat dapat memberikan kenaikan tingkat upah yang lebih signifikan dibandingkan dengan bersekolah di SMK.

Dari analisis data di atas, terlihat bahwa misi SMK untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan lulusannya saat bekerja belum tercapai optimal. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bukti atas premis ini.

Lulusan SMK pada Pasar Tenaga Kerja Daerah

Bagian ini akan memberikan penjelasan singkat yang mirip dengan bagian sebelumnya. Namun, bagian ini akan berfokus pada bagaimana peran SMK di tingkat daerah.

Tabel 3 dan Tabel 4 menunjukkan pengaruh belajar di SMK terhadap SMA di tingkat daerah. Tabel 3 menunjukkan peluang lulusan SMK mendapatkan pekerjaan lebih baik di Sumatra, Jawa/Bali, Sulawesi, dan Maluku dan Tabel 4 menunjukkan peluang lulusan SMK untuk menjadi pengangguran lebih rendah di Sumatra, Jawa/Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Menarik untuk mendapatkan hasil bahwa SMK secara statistik tidak menguntungkan pekerja di Kalimantan, baik dalam pekerjaan maupun setengah pengangguran. Hasil ini mungkin karena skala industri kecil di Kalimantan relatif kecil terhadap jumlah penduduknya.

Tabel 5 menunjukkan bahwa menjadi lulusan SMK memiliki hasil yang beragam dalam meningkatkan tingkat upah di setiap daerah. Penulis juga menemukan bahwa besarnya pengaruh kepemilikan sertifikat terhadap tingkat upah lebih tinggi untuk lulusan SMA dan SMK di seluruh wilayah di Indonesia.

Tabel 3. Regresi Logit untuk Status Menganggur Berdasarkan Wilayah

LOGIT REGRESSION FOR UNEMPLOYMENT (DUMMY)	Sumatra	Java/Bali	Kalimantan	Sulawesi	Nusa Tenggara	Maluku	Papua
Urban (Dummy)	0.160***	-0.062***	0.051***	0.310***	0.141***	0.828***	0.767***
	-0.003	-0.002	-0.005	-0.005	-0.008	-0.011	-0.01
<i>Male (Dummy)</i>	-0.171***	0.200***	-0.095***	-0.446***	-0.061***	-0.573***	-0.438***
	-0.003	-0.002	-0.005	-0.005	-0.008	-0.011	-0.011
<i>ln(Age)</i>	-2.225***	-2.321***	-1.839***	-2.320***	-3.578***	-2.892***	-1.639***
	-0.006	-0.004	-0.012	-0.011	-0.021	-0.025	-0.022
<i>Married (Dummy)</i>	-1.606***	-1.385***	-1.553***	-1.129***	-0.402***	-0.967***	-1.893***
	-0.004	-0.002	-0.007	-0.007	-0.011	-0.013	-0.014
Owning Certificate (Dummy)	0.108***	-0.093***	-0.387***	0.107***	-0.063***	-0.127***	-0.651***
	-0.004	-0.002	-0.007	-0.008	-0.011	-0.019	-0.017
<i>General high school (Base)</i>	0	0	0	0	0	0	0
	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Vocational high school (Dummy)	-0.089***	-0.097***	0.327***	-0.047***	0.338***	-0.458***	0.698***
	-0.003	-0.002	-0.005	-0.006	-0.008	-0.017	-0.011
<i>Constant</i>	5.642***	6.030***	4.468***	5.681***	9.188***	7.860***	3.845***
	-0.019	-0.011	-0.036	-0.035	-0.064	-0.078	-0.07
<i>N</i>	8352439	2.11E+07	2101222	2380978	1108433	447078	525602

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Tabel 4. Regresi Logit untuk Status Setengah Menganggur Berdasarkan Wilayah

LOGIT REGRESSION FOR UNDEREMPLOYMENT (DUMMY)	Sumatra	Java/Bali	Kalimantan	Sulawesi	Nusa Tenggara	Maluku	Papua
Urban (Dummy)	-0.836***	-0.750***	-1.067***	-0.580***	-0.595***	-0.008	-0.696***
	-0.002	-0.001	-0.004	-0.003	-0.005	-0.007	-0.007
<i>Male (Dummy)</i>	-0.629***	-0.723***	-0.821***	-0.869***	-0.685***	-0.938***	-0.353***
	-0.002	-0.001	-0.004	-0.003	-0.004	-0.008	-0.008
<i>ln(Age)</i>	-0.093***	0.318***	0.087***	-0.007	0.013	-0.350***	-0.583***
	-0.003	-0.002	-0.007	-0.005	-0.008	-0.013	-0.013
<i>Married (Dummy)</i>	-0.184***	-0.086***	-0.357***	-0.512***	-0.233***	-0.016	-0.031***
	-0.002	-0.002	-0.005	-0.004	-0.006	-0.009	-0.009
Owning Certificate (Dummy)	-0.212***	-0.155***	0.031***	-0.149***	-0.094***	-0.012	-0.289***
	-0.003	-0.002	-0.005	-0.004	-0.006	-0.01	-0.011
<i>General high school (Base)</i>	0	0	0	0	0	0	0
	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Vocational high school (Dummy)	-0.145***	-0.299***	0.023***	0.067***	-0.200***	-0.007	-0.262***
	-0.002	-0.001	-0.004	-0.004	-0.005	-0.01	-0.009
<i>Constant</i>	0.190***	-1.751***	-0.327***	0.139***	-0.029	0.858***	1.494***
	-0.011	-0.008	-0.023	-0.017	-0.027	-0.044	-0.044
<i>N</i>	7596027	1.90E+07	1906603	2215876	1026483	401935	475579

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Tabel 5. Regresi OLS untuk Upah Riil Bulanan menurut Wilayah

OLS REGRESSION FOR LN(REALMWAGE)	Sumatra	Java/Bali	Kalimantan	Sulawesi	Nusa Tenggara	Maluku	Papua
Urban (Dummy)	0.121***	0.284***	0.207***	0.048***	0.091***	0.085***	0.128***
	-0.001	0	-0.001	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003
Male (Dummy)	0.355***	0.171***	0.227***	0.273***	0.143***	0.295***	0.376***
	-0.001	0	-0.001	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003
Distance: < 10km (Base)	0	0	0	0	0	0	0
	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Distance: 10 - 29 km (Dummy)	0.131***	0.207***	0.104***	0.147***	-0.004	0.210***	0.008*
	-0.001	0	-0.001	-0.002	-0.003	-0.004	-0.004
Distance: > 30 km (Dummy)	0.173***	0.401***	0.146***	0.161***	0.358***	0.482***	0.179***
	-0.001	-0.001	-0.002	-0.003	-0.008	-0.016	-0.005
ln(Age)	0.451***	0.240***	0.367***	0.516***	0.619***	0.409***	0.440***
	-0.001	-0.001	-0.003	-0.003	-0.005	-0.005	-0.005
Married (Dummy)	0.083***	0.050***	0.146***	0.165***	0.070***	-0.001	0.054***
	-0.001	0	-0.001	-0.002	-0.003	-0.003	-0.003
Owning Certificate (Dummy)	0.318***	0.120***	0.191***	0.267***	0.205***	0.262***	0.083***
	-0.001	0	-0.001	-0.002	-0.002	-0.004	-0.004
Work at least one year (Dummy)	0.204***	0.174***	0.276***	0.156***	-0.003	0.368***	0.350***
	-0.001	0	-0.002	-0.002	-0.002	-0.004	-0.005
Status: Own account (Base)	0	0	0	0	0	0	0
	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Status: Employee (Dummy)	0.213***	0.127***	0.184***	0.331***	0.146***	0.137***	0.145***
	-0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.004	-0.004	-0.004
Status: Casual worker in agricultural sector (Dummy)	-0.235***	-0.245***	0.047***	0.101***	-0.185***	0.875***	
	-0.002	-0.003	-0.005	-0.005	-0.007	-0.009	
Status: Casual worker in non-agricultural sector (Dummy)	-0.196***	-0.222***	-0.192***	-0.052***	-0.145***	0.032***	0.140***
	-0.002	-0.001	-0.004	-0.003	-0.006	-0.007	-0.007
General high school (Base)	0	0	0	0	0	0	0
	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Vocational high school (Dummy)	-0.158***	0.023***	-0.141***	-0.153***	0.130***	0.032***	0.072***
	-0.002	-0.001	-0.003	-0.004	-0.004	-0.005	-0.004
Constant	11.451***	12.662***	11.899***	10.977***	11.118***	11.647***	11.854***
	-0.005	-0.003	-0.009	-0.01	-0.017	-0.019	-0.018
R-squared	0.292	0.288	0.39	0.238	0.312	0.301	0.308
N	4357924	1.30E+07	1191693	1165685	507098	247407	264937

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Dari hasil analisis, dapat ditarik 4 poin simpulan. *Pertama*, penulis menemukan dari analisis tingkat nasional bahwa lulusan SMK memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan lulusan SMA. Penulis juga menemukan bahwa efeknya bervariasi di tingkat regional. *Kedua*, lulusan SMK juga memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menjadi pengangguran ketika sudah mendapatkan pekerjaan. Hasilnya juga menunjukkan efek yang berbeda di tingkat daerah. *Ketiga*, penulis menemukan bahwa lulusan SMK berpenghasilan lebih rendah daripada lulusan SMA meskipun kemungkinan mereka mendapatkan pekerjaan lebih tinggi. Di tingkat daerah, perhitungan penulis menemukan bahwa lulusan SMK di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dibayar lebih rendah daripada rekan lulusan SMA mereka. *Keempat*, meskipun sertifikat pelatihan tidak selalu meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan, namun

dapat memberikan pengaruh yang lebih tinggi terhadap tingkat upah dibandingkan memilih sekolah kejuruan. Hasil ini juga konsisten ketika kita menghitung di tingkat daerah.

Kendala utama dalam memperluas penelitian ini adalah ketersediaan data. Jika kita dapat memperoleh data Gambar 1 dengan rentang tahun yang lebih panjang, kita dapat mengamati bagaimana pola penerimaan berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, jika kita dapat menghubungkannya dengan data pasar tenaga kerja pada Sakernas atau data yang lebih rinci, kita dapat menemukan bagaimana pendidikan dan pasar kerja berinteraksi dan seberapa banyak jeda waktu antara kedua pasar tersebut.

Rekomendasi kebijakan yang bisa diturunkan dari hasil penelitian ini, yakni:

1. mendorong program sertifikasi untuk memberikan sinyal lebih baik kepada para pemberi kerja; dan

2. meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan formal yang memastikan lulusannya memiliki kemampuan dasar literasi dan numerasi yang baik terlepas dari kemampuan vokasional yang nantinya bisa bermanfaat langsung di dunia kerja.

PUSTAKA ACUAN

- Chen, D. (2009). Vocational Schooling, Labor Market Outcomes, and College Entry. *World Bank Policy Research Working Paper*, (4814). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-4814>
- Djojonegoro, W. (1998). *Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=dp-1AAAACAAJ>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan* (Vol. IX). Jakarta.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, Pub. L. No. 16. Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Menteri Pendidikan Nasional. (2009). Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Pub. L. No. 28. Indonesia: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). Indonesia education statistics in brief 1995/1996.
- Newhouse, D., & Suryadarma, D. (2011). The Value of Vocational Education: High School Type and Labor Market Outcomes in Indonesia. *World Bank Economic Review*, 25(2), 296–322. <https://doi.org/10.1093/wber/lhr010>
- Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk & Tenaga Kerja. (2017). *Analisis Mobilitas Tenaga Kerja 2016*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.

ABSTRACT

Students as the nation's next generation are expected to master information literacy, but unfortunately, false information is still circulating even though there is a preventive program such as "Gerakan Literasi Sekolah" (or School Literacy Movement). This study aims to describe the initial profile of students' information literacy in the global era to prepare for the implementation of the national assessment. The subjects of the study were 105 Vocational High School (SMK) students in the Bululawang District. Quantitative descriptive research was conducted to map students' information literacy skills. The study found that the average result for students' information literacy skill was in the category of needing special intervention with a score of 34.4. Furthermore, there was no significant difference between the information literacy skill of male and female students. Moreover, the students' information literacy skill was divided into three categories, i.e.: 1) need special intervention (62.9%), 2) basic (30.5%), and 3) proficient (6.7%). The lack of information literacy skill was resulted from their tendency to use assumptions or intuition rather than absorbing and managing the information. Based on these data, it is essential to improve the quality of students' literacy skills by improving the facilities, programs, and evaluation of the School Literacy Movement.

Key words: *national assessment, information literacy, 21st century skills, mapping*

ABSTRAK

Siswa sebagai calon generasi penerus bangsa diharapkan dapat menguasai literasi informasi. Namun, masih banyak berita *hoax* yang tersebar, walaupun sudah ada program pencegahan seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil awal literasi informasi siswa di era global sebagai persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional. Subjek penelitian ini adalah 105 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Kecamatan Bululawang. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dilakukan untuk memetakan kemampuan literasi informasi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan literasi informasi siswa masuk kategori perlu intervensi khusus dengan nilai sebesar 34,4. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan literasi informasi siswa laki-laki dan perempuan. Kategori siswa dalam literasi informasi terbagi dalam tiga kategori, yaitu perlu intervensi khusus sebesar 62,9%, dasar 30,5%, dan cakup 6,7%. Lemahnya literasi informasi siswa dikarenakan mereka lebih menggunakan anggapan atau intuisinya daripada mengelola informasi yang diberikan. Berdasarkan data tersebut, diperlukan adanya peningkatan kualitas literasi siswa dalam bentuk peningkatan fasilitas, program, dan evaluasi terhadap Gerakan Literasi Sekolah.

Kata kunci: asesmen nasional, literasi informasi, kemampuan abad 21, pemetaan

PENDAHULUAN

Salah satu penyebab terjadinya berita *hoax* adalah karena mudahnya masyarakat menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya yang disebabkan oleh keterbatasan dalam literasi. Terlebih lagi dalam kondisi COVID-19 saat ini ancaman berita *hoax* marak terjadi (Chumairoh, 2020). Literasi yang masih lemah mengakibatkan berita dan informasi mudah menyebar tanpa adanya konfirmasi atau upaya dalam mencari kebenaran fakta dari informasi tersebut. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi keamanan dan ketenteraman bangsa, tentu harus selektif dalam menyebarkan segala informasi yang diperoleh. Bahkan jika diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan masyarakat, maka informasi yang telah diterima wajib ditelusuri dan dibuktikan kebenarannya. Alur pemikiran tersebut membenarkan bahwa kemampuan literasi informasi secara baik merupakan salah satu hal pokok yang wajib dimiliki masyarakat, karena literasi informasi merupakan kemampuan penting untuk mengetahui kapan dan mengapa ia memerlukan informasi serta bagaimana memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan dengan penuh etika (Himawan, 2014). Literasi informasi disebut juga sebagai suatu perangkat keterampilan khusus yang harus dimiliki untuk memecahkan masalah, baik itu kepentingan akademisi maupun kepentingan pribadi (Rahmala, Suwignyo, & Kurniawan, 2018).

Pendidikan literasi informasi pada dasarnya dapat diberikan pada anak sejak dini. Hal ini penting sebagai fondasi bagi anak untuk dapat mencapai pendidikan selanjutnya yang berkualitas (Surgangga, 2017). Program sekolah sejak pendidikan dasar telah memfasilitasi siswa dengan jargon “gemar membaca membuka cakrawala dunia” yang terus digemakan hingga siswa menamatkan bangku sekolah dasar. Meskipun keadaan di sekolah dasar merupakan tahap awal belajar membaca dan menulis, siswa telah dibekali motivasi yang kuat untuk membaca buku. Pada dasarnya semua itu adalah tujuan besar dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di setiap jenjangnya. Pelaksanaan GLS memiliki manfaat dalam menunjang pembentukan karakter siswa (Wandasari, 2017). Program GLS yang dikolaborasi dengan berbagai program ekstra-kurikuler lainnya secara baik dan tepat, akan membantu pembentukan karakter siswa yang positif sehingga dapat memberikan manfaat saat terjun ke masyarakat (Mustofa & Setiyowati, 2021).

Evaluasi terkait target literasi informasi yang dicanangkan dalam GLS wajib untuk dievaluasi secara berkala. Evaluasi penting untuk memastikan bahwa GLS berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan (Mas & Djafri, 2019). Terlebih lagi pada tahun 2021 evaluasi terkait literasi juga diikuti dengan evaluasi terhadap kemampuan numerasi, di mana kedua aspek ini masuk dalam tes yang disebut Asesmen Kompetensi Minimal (AKM). AKM adalah sistem penilaian survei yang dilakukan oleh pemerintah untuk memetakan kualitas pendidikan nasional. Tes literasi memberikan gambaran tentang bagaimana memahami suatu permasalahan dan mengambil sikap atas persoalan yang diberikan (Mustofa & Kusniawati, 2021). Adapun kemampuan numerasi lebih menekankan bagaimana memahami suatu pola data informasi yang diberikan (Mustofa, 2020). Selain AKM itu sendiri, penilaian yang berada di bawah payung Asesmen Nasional (AN) di tahun 2021, akan diikuti dengan survei karakter dan lingkungan belajar, di mana kedua survei tersebut secara tidak langsung juga memengaruhi level literasi informasi siswa dalam hal sarana prasarana dan lingkungan belajar tempat pembentukan kompetensi literasi siswa. Survei karakter mengedepankan survei karakter Pancasila yang dimiliki siswa di antaranya mencakup Ketuhanan, kebinekaan, dan gotong royong. Sementara itu, survei lingkungan belajar lebih menekankan kepada ketersediaan fasilitas dan program yang mendukung proses pembelajaran di sekolah yang disesuaikan dengan jenjang dan model pendidikan yang dijalankan oleh sekolah. Evaluasi berkala tentu sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan besar dari GLS dapat tercapai, minimal mengalami perkembangan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Umumnya evaluasi terhadap suatu *output* dari program dilakukan setiap satu semester berjalan.

Evaluasi berkala terhadap suatu *output* penting dilakukan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya. Terlebih lagi institusi pendidikan yang secara langsung bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia wajib melakukan evaluasi berkala sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dari suatu kebijakan (Munthe, 2015). Evaluasi di tengah program merupakan salah satu cara untuk mengkaji proses pelaksanaan program yang fungsinya memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, evaluasi

dapat dijadikan bahan untuk memberikan kebijakan baru yang memungkinkan agar tujuan besar yang tertera dalam visi dan misi sekolah dapat tercapai, misalnya yang terkait dengan terwujudnya lulusan berkarakter Pancasila memerlukan evaluasi secara berkelanjutan terkait program-program pendukungnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan kemampuan literasi siswa terutama pada literasi informasi. Literasi informasi merupakan salah satu bagian dari literasi yang ada di AKM. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan sekolah di semester selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Penelitian dilakukan pada akhir semester gasal tahun pelajaran 2020/2021 melalui aplikasi Moodle yang didesain *offline* dengan jaringan LAN. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI yang akan menempuh Asesmen nasional di tahun 2021. Penelitian dilakukan di SMK di daerah Bululawang, Malang. Jumlah responden yang mengikuti adalah 105 siswa yang terdiri atas 51 siswa laki-laki dan 54 siswa perempuan.

Instrumen penelitian adalah tes kemampuan literasi informasi yang didapatkan dari laman yang dikelola oleh Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi <https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm/>. Meskipun soal yang disajikan di laman tersebut bersifat *open-source*, dapat dipastikan siswa di SMK tersebut tidak dapat mengaksesnya karena lingkungan sekolah berada di dalam pondok pesantren dengan akses internet yang dibatasi. Butir soal terdiri atas 10 soal pilihan ganda dengan berbagai kompetensi dasar. Siswa diminta untuk menjawab satu persatu soal yang diberikan melalui media aplikasi Moodle yang berada pada jaringan server lokal. Pengerjaan soal literasi informasi ini, pada pelaksanaannya diintegrasikan dengan waktu pelaksanaan ujian semester gasal tahun pelajaran 2020/2021 dengan waktu yang berbeda antara subjek uji coba validitas (Kelas XII) dan subjek pelaksana ujian literasi informasi (Kelas XI). Selanjutnya soal diuji validitasnya, daya beda, tingkat kesulitan, dan keajekannya kepada 87 siswa kelas XII yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Hasil uji validitas

dan deskripsi kompetensi dasar, hasil uji empiris, dan level tiap soal tersaji pada Tabel 1. Analisis jawaban siswa terhadap soal, selanjutnya dikategorikan per soal. Dalam konteks ini, level untuk menemukan informasi tersurat bernilai 1, memahami informasi tersirat 2, dan mengevaluasi teks informasi 3. Selanjutnya nilai pada kategori tersebut dikonversi ke nilai rentang 0-100. Adapun kategorisasi nilai tersaji pada Tabel 2.

Tingkatan kompetensi literasi terbagi menjadi 4 level yaitu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Adapun penjelasan tentang AKM terkait level tersebut, merujuk pada laman Pusat Asesmen Nasional, BSKAP Kemendikbud, adalah sebagai berikut: (1) intervensi khusus, yaitu kondisi di mana siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana; (2) dasar, yaitu kondisi di mana siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana; (3) cakap, yaitu kondisi di mana peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks; (4) mahir, yaitu kondisi peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks.

Setelah data hasil pengerjaan tes literasi informasi terkumpul, dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis deskriptif statistik, uji *independent sample t test*, dan persentase respons siswa terkait level soal. Analisis deskriptif statistik meliputi rata-rata, minimum, maksimum, *skewness* untuk laki-laki, perempuan, dan total. Uji t digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak antara kemampuan literasi informasi siswa laki-laki dan perempuan. Deskripsi terkait kategori setiap siswa dan persentase yang dicapai tiap kategori literasi informasi dipaparkan untuk dieksplorasi. Selain itu, dilakukan deskripsi terhadap beberapa butir soal yang mewakili setiap level. Paparan tersebut dibahas secara komprehensif untuk menemukan masalah dan menggali solusi potensial yang dapat diambil sebagai kebijakan lanjutan.

Tabel 1. Hasil Uji Kelayakan Soal dan Deskripsinya

Butir Soal	Kompetensi Dasar	Daya Beda	Tingkat Kesulitan	Validitas Poin Biserial	Level
1	Menemukan informasi tersurat (siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana) pada teks informasi tentang pembangkit listrik tenaga bayu	0,46	0,76	0,39	1
2	Menemukan informasi tersurat (siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana) pada teks informasi tentang pembangkit listrik tenaga bayu	0,50	0,31	0,35	1
3	Menemukan informasi tersurat (siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana) pada teks informasi tentang gratifikasi	0,13	0,15	0,27	1
4	Menemukan informasi tersurat (siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana) pada teks informasi tentang gratifikasi	0,38	0,57	0,43	1
5	Menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadinya dalam membaca teks informasi	0,50	0,16	0,60	3
6	Menemukan informasi tersurat (siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana) pada teks informasi tentang biografi tokoh	0,13	0,16	0,21	1
7	Menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan atau konsep di dalam teks informasi tentang biografi tokoh	0,42	0,21	0,44	2
8	Mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks informasi berupa poster panen air hujan sekarang	0,38	0,43	0,34	1
9	Menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan atau konsep di dalam teks informasi tentang biografi tokoh	0,21	0,09	0,35	2
10	Menilai akurasi pada informasi visual atau non-visual dalam teks informasi	0,79	0,60	0,61	3

Tabel 2. Kategorisasi Kemampuan Literasi Informasi Siswa

Nilai Kategori (0-16)	Rentang Nilai (0-100)	Kategori
<6	<38	Perlu Intervensi Khusus
6-<10	38 – 62	Dasar
10-<16	63 – 99	Cakap
16	100	Mahir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Level Literasi Informasi Berdasarkan Gender

Hasil analisis statistik deskriptif tersaji pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, tampak bahwa kemampuan literasi informasi siswa laki-laki memiliki nilai rata-rata sebesar 33,1 dengan kategori perlu intervensi khusus. Di pihak lain, untuk siswa perempuan memiliki nilai rata-rata sebesar 35,7 dengan kategori perlu intervensi khusus. Rata-rata siswa secara keseluruhan sebesar 34,4 dengan kategori perlu intervensi khusus. Dikarenakan nilai *skewness* berada di rentang -1 sampai +1, maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal, sehingga dapat dilanjutkan menggunakan uji parametrik (Morgan, 2004). Hasil uji *independent sample t test* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,429. Hasil ini menunjukkan bahwa signifikansinya di atas 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kemampuan siswa laki-laki dan perempuan terkait literasi informasi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyanti dan Risnani (2019) yang menemukan bahwa pada hampir setiap aspek literasi informasi antara siswa laki-laki dan perempuan berbeda.

Adanya bukti bahwa tidak adanya perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah dalam hal kemampuan literasi informasi, menunjukkan bahwa fasilitas, program dan kemampuan awal cenderung sama antara laki-laki maupun perempuan. Kebijakan perlu dilakukan terutama untuk mendukung berkembangnya literasi informasi siswa yang sangat minim. Hasil analisis tersebut juga menunjukkan bahwa program GLS yang diterapkan di sekolah selama ini masih belum optimal. Perlu adanya perubahan iklim pembelajaran dan program GLS yang lebih baik dan dapat diterima serta dilaksanakan oleh semua siswa.

Berdasarkan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan di tingkat sekolah, ditemukan beberapa solusi untuk meningkatkan level literasi siswa terkait informasi yang masih berada di level rendah atau pada level intervensi khusus. Beberapa di antaranya yaitu pemutakhiran perpustakaan dengan menyediakan majalah yang

tidak hanya terbit bulanan, langganan beberapa surat kabar secara sekaligus, penerapan wajib membaca surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya setiap minggu, dan optimalisasi duta baca sebagai program OSIS serta pemanfaatan program *journaling-feedback* dalam bentuk resensi baik setiap minggu atau bulan (Wahyuni & Pramudiyanto, 2017). Di sisi lain, dapat juga dilakukan optimalisasi papan mading dengan tanggung jawab pengelolaan antar kelas secara bergantian setiap minggu.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Aspek	Laki-laki	Perempuan	Total
N	51	54	105
Min	0	0	0
Max	63	75	75
Rata-rata	33,1	35,7	34,4
Std. Dev	16,3	17,3	16,7
<i>Skewness</i>	-0,264	0,060	-0,067

Capaian Literasi Informasi Siswa

Capaian literasi informasi siswa pada dasarnya menunjukkan kategori capaian literasi siswa setiap individu. Tabel 4 menyajikan data terkait kuantitas pada masing-masing kategori. Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih berada pada kategori perlu intervensi khusus sebanyak 62,9% (66 siswa). Selanjutnya disusul kategori dasar sebanyak 30,5% (32 siswa) dan kategori cakap sebanyak 6,7% (7 siswa). Tidak ada satu pun siswa yang mencapai kategori mahir.

Deskripsi Level Literasi Informasi

Mendeskripsikan kemampuan literasi informasi pada setiap level menjadi penting untuk memotret pemikiran siswa. Permasalahan pada level apa yang dianggap sulit oleh siswa merupakan bahan penting untuk dijadikan pijakan pengambilan kebijakan sekolah. Berkaitan dengan hal itu, maka dideskripsikan masing-masing level dan pencapaian setiap level pada Tabel 5.

Tabel 4. Capaian Literasi Informasi Siswa

Kategori	Jumlah	Persentase
Perlu intervensi khusus	66	62,9%
Dasar	32	30,5%
Cakap	7	6,7%
Mahir	0	0%

Tabel 5. Capaian Siswa terhadap Level Soal

Level	Menemukan Informasi Tersurat (1)					Memahami Informasi Tersirat (2)		Mengevaluasi Teks Informasi (3)		
	1	2	3	4	6	8	7	9	5	10
Persentase menjawab benar	71,4%	33,3%	23,8%	68,6%	5,7%	61,0%	13,3%	7,6%	23,8%	57,1%
Rata-Rata	44,0%					10,5%		40,5%		

Berdasarkan Tabel 5, tampak bahwa seluruh soal dengan berbagai level hanya mendapatkan nilai persentase benar di bawah 50%. Tentu ini memberikan gambaran bahwa literasi informasi siswa masih sangat lemah. Terlebih lagi untuk level memahami informasi tersirat hanya mendapatkan persentase benar 10,5%. Hasil pemetaan tersebut tentu harus digali lebih mendalam terkait apa dan bagaimana permasalahan yang dihadapi siswa.

Soal Berlevel Menemukan Informasi Tersurat (1)

Pada dasarnya soal dengan level menemukan informasi tersurat terbagi menjadi dua, yaitu mengakses informasi dalam teks dan memilih

informasi yang relevan. Terdapat 6 butir soal yang disajikan untuk memotret kemampuan literasi informasi siswa. Dari ke 6 soal tersebut, butir soal nomor 6 merupakan butir soal dengan tingkat kesalahan paling besar yaitu mencapai 94,3%. Butir soal nomor 6 disajikan dengan cara memberikan teks informasi tentang biografi seorang tokoh bernama Geronimo, yaitu pejuang Suku Apache. Selanjutnya di akhir teks diberikan pertanyaan seperti yang tersaji pada Gambar 1. Pada dasarnya untuk berhasil menjawab dengan benar soal level ini siswa harus: (1) konsentrasi terhadap apa yang menjadi pertanyaan; (2) mengidentifikasi 5W + 1H (untuk kasus soal nomor 6, ditanyakan mengapa); (3) Fokus pada bagian teks yang membahas detik-detik terjadinya peristiwa yang dimaksud (tidak membaca secara keseluruhan teks).

Kematian Geronimo diduga terjadi pada Februari 1909. Saat itu, dia terlempar ketika berkuda dan tidak mendapat pertolongan serta menghabiskan malam di udara dingin. Ketika seorang teman menemukannya keesokan paginya, kondisi Geronimo sudah mengkhawatirkan. Dia meninggal akibat penyakit pneumonia yang juga dideritanya pada 17 Februari 1909 dalam usia 79 tahun.

Sumber: <https://bangka.tribunnews.com/2019/03/26/biografi-tokoh-dunia-geronimo-pejuang-suku-apache-yang-sempat-jadi-tahanan-perang>.

Apakah yang menjadi penyebab kematian Geronimo menurut cerita biografi tersebut?

- A. Kesulitan hidup di penjara.
- B. Serangan militer AS.
- C. Kecelakaan saat berkuda dan derita sakit.
- D. Peperangan saat menumpaskan dendam.
- E. Tewas dalam peperangan terakhir suku Indian.

Gambar 1. Soal Level Menemukan Informasi Tersurat

Berdasarkan salah satu butir soal tersebut, tampak bahwa siswa cenderung menggunakan anggapannya dalam menjawab soal. Temuan ini sesuai dengan penelitian Mustofa (2018) yang menjelaskan bahwa siswa cenderung menggunakan anggapan, perasaan, atau intuisinya secara mandiri daripada konsep ilmiah atau informasi yang diberikan. Butir soal pada Gambar 1 memiliki jawaban benar C. Jawaban telah tersurat pada teks di paragraf yang diawali dengan kalimat “kematian Geronimo diduga”, yang secara jelas tersurat pada teks. Sedangkan pilihan jawaban lain, lebih kepada anggapan bahwa seorang tokoh harus mati dalam keadaan berjuang dan perang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih menggunakan anggapannya daripada informasi yang diberikan dalam menjawab suatu masalah di depannya. Tentu hal ini perlu dilakukan pembiasaan dan perubahan cara berpikir yang cukup sulit dan berat dalam melakukan perubahan tersebut.

Penggunaan anggapan yang selalu terlintas dalam pikiran sebagai akibat tertanamnya informasi yang telah mereka pelajari merupakan permasalahan serius. Hal ini menjadi masalah, karena di dunia ini, tidak setiap masalah memiliki pola yang sama. Seorang tokoh besar atau pejuang, tidak selamanya harus mati dalam medan perang. Penggunaan anggapan dalam menyelesaikan masalah secara lebih besar proporsinya cenderung membawa seseorang mudah termakan informasi yang salah (*hoax*). Berangkat dari masalah tersebut, maka perlu dilakukan intervensi khusus terutama dalam hal pembiasaan pola berpikir untuk selalu lebih percaya dengan informasi yang valid, data yang akurat, dan sumber yang dipercaya.

Soal Berlevel Memahami Informasi Tersirat (2)

Butir soal untuk mengakses kemampuan literasi informasi pada level memahami informasi tersirat pada dasarnya terdiri atas dua bagian. Dua bagian tersebut yaitu memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi, dan prediksi teks informasi. Tabel 5 menunjukkan bahwa level ini merupakan level paling sulit dengan persentase kebenaran hanya 10,5%. Salah satu butir soal yaitu butir soal nomor 9 memiliki persentase kesalahan 92,4%. Adapun butir soal tersebut dirancang dengan diawali pemberian teks informasi tentang biografi pejabat yang menyandang disabilitas. Selanjutnya di akhir teks diberikan soal seperti pada Gambar 2. Untuk berhasil menjawab benar pada level 2 ini, siswa harus: (1) konsentrasi terlebih dahulu pada soal yang ditanyakan; (2) mencari teks yang sesuai dengan keterangan soal di teks bacaan; (3) menyimpulkan poin penting yang sesuai dengan teks yang diberikan.

Berdasarkan respons jawaban siswa hanya 7,6% siswa yang menjawab benar pada pilihan jawaban C. Berbeda dengan kasus yang pertama pada level 1, untuk level 2 ini, siswa diminta untuk menyimpulkan dua hal dan membuat koneksi atas masalah yang diberikan. Siswa diharuskan untuk membaca teks informasi pada dua hal tersebut. Kemampuan ini penting di dalam kehidupan bermasyarakat, karena sering kali informasi yang diberikan tidak bersumber dari satu sumber, bahkan bermacam-macam berita diberikan sekaligus. Sebagai masyarakat yang memiliki literasi informasi tinggi dan berpendidikan harus mampu mengambil benang merah dari berbagai informasi yang diberikan.

Sumber: <https://www.jawapos.com/features/03/12/2019/eva-rahmi-kasim-asn-disabilitas-pertama-pejabat-eselon-ii/> diedit oleh Kity Karenisa.

Pada teks disebutkan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan payung hukum bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka. Kedua peraturan tersebut sangat menguntungkan bagi penyandang disabilitas karena ...

- A. Penyandang disabilitas diberikan pendidikan khusus oleh pemerintah.
- B. Masyarakat mengapresiasi potensi yang dimiliki para penyandang disabilitas
- C. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mengembangkan jenjang karier.
- D. Pemerintah memprioritaskan para penyandang disabilitas dalam berkarier.
- E. Masyarakat perlu membantu penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari.

Gambar 2. Soal Level Memahami Informasi yang Tersirat

5. Sesuai dengan wacana informasi di atas, kesimpulan yang dapat diambil sebagai suatu definisi gratifikasi yang paling tepat adalah:
- A. Pemberian cuma-cuma dalam bentuk apapun tanpa barang bukti atau kwitansi kepada seseorang atau lembaga.
 - B. Pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, hadiah perjalanan, maupun penyediaan fasilitas lainnya yang berpengaruh pada kepentingan kekuasaan.
 - C. Usaha pemberian seseorang dalam bentuk apapun dengan maksud meraih kepercayaan dan mendapat pujian dalam organisasi.
 - D. Usaha pemberian dalam jumlah besar dengan maksud menjaga relasi pribadi, sosial maupun adat istiadat.
 - E. Pemberian yang dilakukan secara alamiah dalam acara peringatan tertentu seperti pernikahan, kelahiran, dan lain-lain dengan maksud melestarikan keberagaman.

Gambar 3. Butir Soal Level Mengevaluasi Teks Informasi

Soal Berlevel Mengevaluasi Teks Informasi

Level mengevaluasi teks informasi merupakan level tertinggi dalam literasi informasi. Terdapat tiga bagian yang dapat diambil pada level ini yaitu menilai kualitas dan kredibilitas konten, menilai format penyajian, dan merefleksikan isi wacana. Berdasarkan Tabel 5 tampak bahwa rata-rata kemampuan literasi siswa pada level 3 ini sebesar 40,5%. Butir soal nomor 5 tersaji pada Gambar 3 merupakan butir soal dengan tingkat kesalahan tertinggi di level ini yaitu sebesar 76,2%. Untuk berhasil menjawab benar pada level ini siswa harus: (1) berkonsentrasi dengan apa yang ditanyakan; (2) fokus membaca teks yang berhubungan dengan kata kunci yang dimaksud di soal; (3) menilai secara komprehensif setiap informasi yang diberikan di teks; (4) menghubungkan antarinformasi untuk dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap respons jawaban siswa untuk butir soal nomor 5, menunjukkan bahwa hanya 25 dari 105 siswa yang berhasil menjawab pilihan benar A. Tentunya untuk level ini mereka tidak diperbolehkan menggunakan salah satu definisi untuk menjawab pertanyaan. Pilihan jawaban B sampai E merupakan pilihan jawaban yang menyajikan definisi dari berbagai sumber yang ada di teks bacaan. Kemampuan literasi level ini sangat dibutuhkan terutama bagi calon pemimpin di mana pun berada. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin harus mampu membuat suatu kebijakan yang bersumber dari banyak hal yang relevan dan tentunya mewakili semuanya.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan literasi informasi siswa masuk kategori perlu intervensi khusus dengan nilai sebesar 34,4. Kategori siswa dalam literasi informasi terbagi dalam tiga kategori yaitu perlu intervensi khusus sebesar 62,9%, dasar 30,5%, dan cakap 6,7%. Belum ada yang mencapai kategori mahir. Lemahnya literasi informasi siswa dikarenakan mereka lebih menggunakan anggapan atau intuisinya daripada mengelola informasi yang diberikan. Temuan ini tentu dapat digunakan oleh sekolah sebagai pijakan untuk mengadakan program-program sekolah yang dinilai efektif untuk membawa keseluruhan siswa keluar dari level terendah dalam literasi informasi ini. Selain itu, hasil asesmen awal ini, tentu dapat menjadi skala prioritas program tambahan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) selanjutnya.

Beberapa kebijakan yang dapat diusulkan dalam upaya untuk mengentaskan level intervensi khusus yaitu perlu adanya peningkatan kualitas literasi siswa dalam berbagai bentuk program. *Pertama*, yaitu dengan pengadaan langganan majalah setiap bulan dan langganan beberapa surat kabar (*Kompas*, *Surya*, atau *Jawa Pos*) setiap hari dilanjutkan kegiatan wajib bagi siswa untuk membuat resensi dari beberapa berita minimal satu bulan sekali. *Kedua*, optimalisasi Duta Baca yang terintegrasi dengan program OSIS untuk mengajak siswa aktif membaca, misalnya dengan memberikan apresiasi atau penghargaan bagi siswa yang paling sering mengunjungi

perpustakaan dan paling banyak menulis sinopsis buku. *Ketiga*, penyelenggaraan lomba literasi tingkat sekolah setiap kegiatan tengah semester (KTS). *Keempat*, optimalisasi program mading sekolah dengan pola perminggu/kelas dengan tema yang berbeda. *Kelima*, pengintegrasian semua mata pelajaran untuk mendukung literasi informasi siswa dengan melibatkan berita, informasi, atau fakta ilmiah yang mendukung topik yang sedang dipelajari. Pengintegrasian mata pelajaran dapat dikoordinir oleh wakil kurikulum dengan melibatkan seluruh guru mata pelajaran.

PUSTAKA ACUAN

- Chumairoh, H. (2020). Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19. *Vox Populi* 3 (1), 22-30.
- Himawan, D. (2014, April 25). *Pengantar Literasi Informasi*. Retrieved from repository. ipb.ac.id: <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/81255/2/LITERASI%20INFORMASI%20PENGANTAR.pdf>
- Mas, S. R., & Djafri, N. K. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Gerakan Literasi di Sekolah Dasar. *JMSP: Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 4 (1), 1-7.
- Morgan, G. A. (2004). *SPSS for introductory statistics: use and interpretation (2nd ed)*. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan, dan Manfaat. *Scholaria Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5 (2).
- Mustofa, Z. (2018). The Description of Student Understanding about Elasticity Concept. *JPPPF (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Fisika)* 4(1).
- Mustofa, Z. (2020). Kompetensi Numerasi Siswa SMK Ditinjau dari Gender dan Berbagai Kesulitannya. *Jurnal Pendidikan Matematika* 8 (4), 227-237.
- Mustofa, Z., & Kusniawati, K. Y. (2021). Pemetaan Awal Kemampuan Literasi Teks Fiksi Siswa SMK dalam Menghadapi Asesmen Nasional. *Bahtera: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 1154-1163.
- Mustofa, Z., & Setiyowati, R. (2021). Pembentukan Karakter pada Siswa di Sekolah Berasrama dalam Menghadapi Masalah Sosial. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktek Pendidikan PKN* 8 (1), 57-65.
- Rahmala, I. D., Suwignyo, H., & Kurniawan, T. (2018). Kemampuan Literasi Informasi Pemustaka Berdasarkan Information Literacy Standars For Student Learning. *Bibliotika: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi* 2(1), 1-7.
- Riyanti, R., & Risnani, L. Y. (2019). Literasi informasi dalam konteks 21st century skills pada siswa sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Banyumas . *Symbion (Symposium on Biology Education)* (pp. 200-214). Yogyakarta: FKIP Universitas Ahmad Dahlan.
- Surgangga, I. M. (2017). Mendidik Lewat Literasi Untuk Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Penjaminan Mutu LPM IHDN Denpasar* 3 (2).
- Wahyuni, S., & Pramudiyanto, A. (2017). Optimalisasi Budaya Literasi Melalui Program Journaling-Feedback. *The 1st International Conference on Language, Literature and Teaching* (pp. 938-944). Surakarta: UMS.
- Wandasari, Y. (2017). Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Sebagai Pembentuk Pendidikan Berkarakter. *JMKSP: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan* 1 (1), 1-19.

ABSTRACT

Honorary teachers are recruited to address the shortage of teachers in public schools, but the recruitment appears to be poorly planned. This hasty recruitment process results in inefficiency in the management and development of these honorary teachers. This qualitative research aims to describe and analyze the management of honorary teachers to support the optimization of school performance in primary education. This research used two methods of data collection, which are focus group discussions (FGD) and questionnaire. The data from the FGD were collected from honorary teachers and headmasters from several schools in West Java and Banten. And the data from the questionnaire were collected from 2.831 honorary teachers in Indonesia. The analyses on honorary teacher's issues were related to: (i) staff planning, (ii) recruitment process, (iii) career development; and (v) competence, performance, and welfare. From the analysis, the research recommended: (i) the staff planning and recruitment process should be managed directly by the regional education office, (ii) in recruiting honorary teachers to become government employees with a work agreement, it is best to apply affirmative rules that provide a sense of fairness, (iii) it is best to mention teachers' names when inviting them to self-development activities in order to prevent the principals from sending only civil servant teachers, (iv) the government needs to thoroughly consider the welfare of the honorary teachers.

Key words: *honorary teacher, career path, welfare, planning, recruitment*

ABSTRAK

Guru honorer direkrut untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah negeri, namun perekrutannya tampak kurang terencana. Proses rekrutmen seperti ini menghasilkan ketidakefektifan dalam pengelolaan dan pembinaan para guru honorer tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan guru honorer yang dapat mendukung optimalisasi kinerja sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui diskusi kelompok terpumpun bersama perwakilan guru honorer dan juga kepala sekolah dari Jawa Barat dan Banten. Selain itu, dikembangkan pula kuesioner menggunakan *google form* yang dapat diisi oleh guru honorer dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Analisis terhadap permasalahan guru honorer dilakukan terkait: (i) perencanaan kebutuhan, (ii) proses rekrutmen, (iii) pengembangan karier, serta (v) kompetensi, kinerja, dan kesejahteraan. Penelitian ini merekomendasikan: (i) perencanaan kebutuhan dan rekrutmen guru honorer agar dikelola langsung oleh dinas pendidikan, (ii) dalam merekrut guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebaiknya diterapkan aturan afirmasi yang memberikan rasa keadilan, (iii) undangan untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri, sebaiknya menuliskan langsung nama guru yang diundang untuk mencegah penugasan oleh kepala sekolah yang cenderung mengutamakan guru ASN, (iv) pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan guru honorer.

Kata kunci: *guru honorer, jenjang karier, kesejahteraan, perencanaan, rekrutmen*

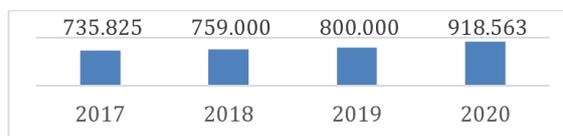
PENDAHULUAN

Parasal 41 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pada kenyataannya, satuan pendidikan, khususnya sekolah negeri masih banyak mengalami kekurangan guru. Banyak sekolah hanya memiliki satu atau dua guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) padahal pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) harus tetap dilaksanakan. Oleh karenanya, meskipun sekolah dilarang merekrut guru honorer, kepala sekolah dengan sangat terpaksa merekrut guru honorer (Musfah, 2020).

Permasalahan terkait guru honorer sudah ada sejak bertahun-tahun. Teridentifikasi sementara bahwa awal mula permasalahan terjadi pada saat perekrutan. Banyak guru honorer direkrut di tingkat bawah yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk mengangkat guru (Zachri, 2016). Disampaikan bahwa pertumbuhan jumlah guru honorer pada periode 2000 hingga 2015 meningkat sebanyak 860%, dari 84.600 menjadi 812.100 orang. Selama periode tersebut, banyak lulusan SMA atau sederajat maupun lulusan sarjana menganggap bahwa menjadi guru honorer merupakan langkah awal untuk menjadi guru ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal ini karena adanya pengalaman atau fakta sejarah yaitu pada tahun 2014 sebanyak 1,1 juta guru honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes (Musfah, 2020). Jika kebiasaan perekrutan guru seperti ini tidak diubah, maka kualitas pendidikan nasional akan sulit mengalami peningkatan.

Pada saat ini, pola rekrutmen guru honorer seperti pola yang telah dilakukan di masa lalu, yaitu guru honorer direkrut sendiri oleh kepala sekolah. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan tenaga pendidik yang begitu mendesak, sementara pemerintah sangat lamban dalam melakukan pengadaan guru ASN untuk menggantikan guru yang pensiun (Fauzan, 2021). Karena terus terdesak oleh kebutuhan, maka kepala sekolah terpaksa merekrut guru honorer. Data jumlah guru honorer di sekolah negeri

terus bertambah dari 2017 sampai dengan 2019, sebagaimana disajikan dalam Gambar 1 (Musfah, 2020). Dalam Gambar 1 disajikan pula data guru honorer pada tahun 2020 (Statistik Kemendikbud, 2020/2021).



Gambar 1. Perkembangan jumlah guru honorer di sekolah negeri periode 2017-2020

Sumber: Musfah, 2020 dan Statistik Kemendikbud, 2021

Dari Gambar 1 terlihat bahwa jumlah guru honorer terus bertambah. Dari data statistik Kemendikbud 2020/2021 terlihat bahwa jumlah seluruh guru pada berbagai sekolah negeri mencapai 2.202.889 orang. Dengan demikian, persentase guru honorer di sekolah negeri mencapai 41,7%. Dari data ini terlihat bahwa sekolah negeri kekurangan guru ASN, dan kekurangan tersebut dipenuhi oleh guru honorer. Dari jumlah guru honorer di sekolah negeri, sebanyak 728.461 orang (79,3%) merupakan guru honorer sekolah (Lumbanrau, 2021). Guru honorer adalah guru tidak tetap yang belum berstatus sebagai calon PNS dan digaji secara sukarela (Romdin, 2020). Contoh kasus di Gorontalo, banyak guru honorer berupah rendah, jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) seperti yang disampaikan dalam siaran pers Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2022). Penelitian Oktafiana, dkk. (2020) menemukan bahwa upah guru honorer yang rendah telah menyebabkan mereka mendapatkan kehidupan yang tidak layak, padahal kesejahteraan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja serta sikap loyalitas guru terhadap sekolah. Hasil kajian Fakhroh (2018) yang melakukan analisis hubungan antara pendapatan dan kualitas kinerja guru menggunakan analisis regresi mengungkapkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan dan kualitas kinerja guru. Hasil kajian Mansir (2020) menyampaikan bahwa kesejahteraan bagi guru menjadi penting dan utama dalam mewujudkan pendidikan nasional karena segala yang berkaitan dengan pendidikan kuncinya ada pada SDM, termasuk guru. Jadi, pendapatan guru yang

rendah sangat berpotensi menurunkan kualitas kinerja guru yang akan berdampak menurunkan kualitas pendidikan.

Sebagian besar guru honorer diangkat oleh kepala sekolah, sehingga berdampak pada upah kecil, di bawah Rp 500.000,- per bulan (Musfah, 2020). Tentang masih rendahnya upah guru honorer ini ditemukan juga dalam kajian Widiarto (2020) yang menyatakan bahwa dari jumlah 747.891 guru honorer yang belum bersertifikat pendidik, terdapat 13,1% mendapat rerata gaji sebesar Rp 300.000,- per bulan. Selain itu, Fauzi & Syafar (2017) menemukan bahwa gaji guru honorer berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Fauzy dan Syafar menemukan bahwa di Banjarmasin guru honorer menerima gaji Rp 75.000,- per bulan, di Bekasi berkisar Rp 1.000.000,- per bulan, kemudian di Yogyakarta guru honorer menerima gaji antara Rp 500.000,- – Rp 800.000,- per bulan. Hal ini sangat ironis ketika dibandingkan dengan gaji buruh kasar yang bisa mencapai Rp 3.300.000,- per bulan. Fakta tentang rendahnya gaji guru honorer ini tentunya sangat bertentangan dengan amanat Pasal 40 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, namun kebijakan tersebut belum dapat menjangkau semua guru honorer. Permasalahan guru honorer timbul karena perbedaan penghasilan yang mencolok antara guru ASN dan guru honorer. Beban kerja guru honorer sama dengan guru ASN, namun upah yang diterima mereka sangat berbeda. Sebenarnya hal ini merupakan suatu risiko yang harus ditanggung oleh guru karena memilih menjadi guru honorer dengan upah kecil saat rekrutmen. Pertanyaannya, mengapa seseorang bersedia menjadi guru dengan upah kecil. Hal ini ditengarai antara lain karena adanya harapan untuk kelak menjadi ASN, sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer. Menurut PP tersebut, tenaga honorer dapat diangkat menjadi PNS. Namun, harapan itu kandas bagi banyak guru honorer karena mereka tidak diangkat menjadi PNS meski sudah bertahun-tahun menjadi guru honorer. Dari

tahun ke tahun jumlah guru honorer pun semakin bertambah. Ketika jumlah mereka masih sedikit, tidak akan bermasalah. Namun ketika jumlahnya semakin banyak, maka berpotensi menimbulkan masalah, misalnya, apabila guru honorer mogok mengajar. Jika hal ini terjadi, yang menjadi korban adalah peserta didik, karena gurunya tidak mengajar.

Jumlah guru honorer berupah kecil yang cukup besar ini sangat berpotensi menimbulkan permasalahan bagi pembangunan pendidikan di tanah air jika tidak segera diperbaiki pengelolannya. Karena bagaimanapun, cenderung sulit mengharapkan mutu pendidikan yang tinggi dari guru berupah kecil. Dengan upah yang sangat kecil, guru honorer cenderung sulit menghidupi keluarganya, sehingga potensi permasalahan ekonomi akan menyebabkan kinerja sebagai guru tidak optimal. Permasalahan utama dari kajian ini adalah pengelolaan guru belum memberikan rasa keadilan bagi guru honorer.

Menurut Aliyyah (2018), yang dimaksud dengan pengelolaan guru adalah aktivitas pengaturan tenaga pendidik yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan, dan pemberhentian. Dari permasalahan utama ini, dirumuskan tujuan umum kajian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan guru honorer yang dapat mendukung optimalisasi kinerja sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan analisis terhadap: (i) perencanaan kebutuhan guru honorer dan pemenuhannya, (ii) proses rekrutmen guru honorer, (iii) pengembangan karier guru honorer, dan (iv) kompetensi, kinerja, dan kesejahteraan guru honorer.

Sasaran kajian ini adalah pengelolaan guru pada jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, khususnya yang berstatus sebagai sekolah negeri. Sasaran ini dipilih karena guru pada jenjang pendidikan dasar merupakan pegawai pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data tentang pengelolaan guru oleh bupati/walikota atau dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota. Selain berkontribusi

pada perkembangan ilmu pengetahuan, artikel ini juga memberikan masukan bagi Kemendikbudristek khususnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), dinas pendidikan kabupaten/kota, dan satuan pendidikan dasar dalam membuat kebijakan pengelolaan guru agar dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap guru, termasuk guru honorer.

Dalam kajian ini, istilah pengelolaan diabstraksikan sebagai sebuah konsep tersendiri. Menurut Israpil (2020), pengelolaan diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Pengelolaan merupakan serangkaian aktivitas untuk mengoordinasikan kegiatan. Pengelolaan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa secara efektif dan efisien. Jadi, pengelolaan memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Menurut Widiartho (2020), kebijakan pengelolaan guru harus menjadi sebuah proses sistem yang saling terkait satu sama lain, mulai dari input, proses dan *output*. Artinya, keberhasilan pencapaian tujuan pengelolaan guru dipengaruhi oleh seluruh unsur yang terkait satu sama lain.

Jadi, ketika dikaitkan dengan guru honorer, pengelolaannya meliputi (i) perencanaan seperti bagaimana melakukan perekrutan untuk mendapat guru honorer sesuai kebutuhan, (ii) pengorganisasian meliputi bagaimana pemberdayaan guru honorer dan bagaimana pembagian tugas-tugas untuk mencapai tujuan, (iii) pengarahan meliputi bagaimana memberitahukan guru honorer apa yang diinginkan bisa dilakukan sesuai dengan tujuan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini termasuk bagaimana pengupahannya sehingga memberikan rasa aman bagi guru honorer dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan (iv) pengawasan meliputi *monitoring* dan evaluasi, agar ada perbaikan untuk kegiatan berikutnya.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1, guru didefinisikan

sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Romdin (2020) mendefinisikan guru sebagai seorang yang profesional, yang memiliki tugas mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk menghasilkan generasi yang mampu menjawab tuntutan zaman. Dengan demikian, guru harus memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional, serta sehat jasmani dan rohani. Untuk itu, baik guru ASN maupun guru honorer merupakan tenaga profesional.

Fauzi & Syafar (2017) mengklasifikasi guru menjadi dua kelompok, yaitu guru ASN dan guru honorer. Guru honorer adalah tenaga pendidik yang belum diangkat menjadi ASN. Rahayu dkk. (2018) mendefinisikan guru sebagai tenaga profesional yang mendapat penugasan baik dari pemerintah maupun dari kepala sekolah untuk mengajar dan membimbing peserta didik. Status profesi guru terdiri dari guru PNS, guru kontrak daerah, dan guru honorer. Guru PNS adalah ASN. Sejak 2019, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pemerintah memulai program penerimaan guru calon ASN melalui program P3K, sehingga cakupan ASN menjadi lebih luas yaitu PNS dan P3K.

Selanjutnya, Rais (2019) mengemukakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, tenaga honorer adalah tenaga yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah. Berdasarkan sumber penggajian, guru honorer dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu (i) guru honorer daerah dengan gaji bersumber dari APBD, dan (ii) guru honorer sekolah dengan gaji bersumber dari anggaran sekolah. Jadi, cakupan guru ASN adalah guru PNS dan P3K, sedangkan cakupan guru honorer meliputi guru honorer daerah dan honorer sekolah.

Perbedaan antara guru ASN dan guru honorer terletak pada sumber gaji dan besar gaji. Sumber

gaji guru ASN adalah APBN dan besarnya terstandar memenuhi standar hidup layak, sedangkan sumber gaji guru honorer tidak diatur oleh pemerintah pusat melainkan oleh pihak yang merekrutnya. Gaji guru honorer daerah bersumber dari APBD yang besarnya tidak standar tergantung kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan gaji guru honorer sekolah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah, yang besarnya juga tidak standar karena tergantung kepada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah.

Hasil penelitian Israpil (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan guru honorer dimulai dari proses rekrutmen sampai kepada penugasannya yang dilakukan secara mandiri dengan kriteria yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Masing-masing sekolah memiliki kriteria pengelolaan sendiri sehingga tidak ada standar baku dalam pengelolaan guru honorer, mulai dari rekrutmen, penugasan, pengupahan, hingga pengembangan dan pembinaan karier. Rekrutmen guru yang mengikuti suatu prosedur yang standar sebagaimana dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam merekrut guru ASN seharusnya dapat dijadikan sebagai panduan bagi kepala sekolah dalam melakukan rekrutmen guru, karena rekrutmen yang terstandar menjadi awal yang baik dalam pengelolaan guru.

Isnaini (2015) mengemukakan bahwa memiliki guru yang berkualitas sangat tergantung pada kualitas proses rekrutmen. Semakin baik prosesnya, semakin besar kemungkinan didapatkan tenaga yang memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Isnaini (2015) mengutip Ibrahim Bafadal yang mengemukakan bahwa rekrutmen guru merupakan aktivitas manajemen yang mengupayakan didapatkannya calon guru yang betul-betul potensial untuk menduduki posisi tertentu. Guru honorer sebagai bagian dari organisasi seluruh sumber daya manusia (SDM) di sekolah memang harus mendapatkan perhatian, karena mereka akan memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Mendapatkan guru honorer yang berkualitas diawali dari rekrutmen dengan mengikuti panduan rekrutmen yang baku. Pengelolaan guru honorer tidak hanya mencakup rekrutmen saja, namun juga komponen pengelolaan

lainnya, seperti penempatan dan penugasan setelah direkrut, pengarahan dalam pelaksanaan tugas-tugas, pemenuhan hak setelah kewajiban dilaksanakan, termasuk di dalamnya pengupahan dan pengembangan karier, serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan.

Pengelolaan guru membutuhkan panduan standar yang dibuat pemerintah, mengingat tenaga yang direkrut didayagunakan di sekolah negeri. Acuan yang dapat diterapkan adalah peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan P3K. Di dalamnya diatur tahapan pengadaan P3K, khususnya pada Pasal 1 ayat (2), pengadaan P3K adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan guru yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, penerimaan lamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Dengan demikian, usaha memperbaiki kualitas pendidikan melalui pengelolaan guru merupakan suatu keharusan yang perlu direncanakan dengan baik dan terstruktur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui diskusi kelompok terpumpun dengan perwakilan guru honorer dan kepala sekolah dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Perwakilan dari Provinsi Jawa Barat berasal dari Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang, sedangkan perwakilan dari Provinsi Banten berasal dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak. Selain itu, dikumpulkan pula data kuantitatif melalui kuesioner yang dikemas dalam *google form* untuk diisi secara daring oleh guru honorer dari berbagai daerah di tanah air. Jumlah guru honorer yang menjawab survei daring tersebut sebanyak 2.831 orang.

Analisis data penelitian menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif didapat dari survei terhadap guru honorer menggunakan kuesioner yang dikemas dalam *google form* dan diisi secara daring. Dalam analisis data kuantitatif dilakukan perbandingan, misalnya bagaimana perbedaan penghasilan guru ASN dan guru honorer. Analisis data kuantitatif

disajikan dalam bentuk grafik dan diagram. Data tentang penghasilan guru honorer diperoleh dari survei daring, sedangkan data penghasilan guru ASN diperoleh dari studi terdahulu. Pembahasan diperkaya dengan informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, baik yang bersumber dari hasil wawancara, dokumentasi, hasil diskusi, maupun sumber-sumber lain yang relevan, seperti membandingkan dengan pengelolaan guru di negara lain yang mungkin dapat diadopsi dan diterapkan sesuai dengan kondisi setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perencanaan Kebutuhan Guru dan Pemenuhannya

Sekolah mengetahui adanya kekurangan guru dengan cara memetakan kebutuhan guru di sekolah. Berikut disajikan contoh pemetaan yang dilakukan kepala SMPN dalam menghitung kebutuhan guru di sekolahnya untuk setiap mata pelajaran. Rumus yang digunakan dalam menghitung kebutuhan guru adalah sebagai berikut.

$$KG_i = \frac{(JTM_i) * (JRB)}{32}$$

$$KGHi = KG_i - JGASN_i$$

Keterangan:

KG_i = Kebutuhan Guru Mapel i

JTM_i = Jam Tatap Muka Mapel i

JRB = Jumlah Rombongan Belajar di sekolah

32 = Median JTM guru per minggu
sesuai UU No. 14 Tahun 2005.

KGH_i = Kebutuhan Guru Mapel i

JGASN_i = Jumlah Guru ASN Mapel i

Selain menggunakan rumus tersebut, kepala sekolah biasanya mengalkulasi kapan sekolahnya membutuhkan guru baru dengan cara mengecek umur pensiun setiap guru. Kepala sekolah biasanya mengusulkan secara tertulis kepada

dinas pendidikan perencanaan kebutuhan guru di sekolahnya. Pengalaman kepala sekolah selama ini, biasanya usul mereka tersebut tidak selalu serta merta langsung ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan.

Sekolah sangat mengharapkan pemerintah pusat merekrut guru ASN untuk menggantikan guru yang pensiun atau guru yang tidak bisa lagi mengajar karena sakit. Sekolah menaruh harapan tersebut karena amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Pasal 24 yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan KBM khususnya di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Harapan tersebut sering tidak terealisasi, karena dalam beberapa tahun terakhir terdapat kebijakan moratorium pengangkatan guru PNS. Ada beberapa guru PNS yang diangkat untuk menggantikan guru yang pensiun, namun jumlahnya terlalu kecil untuk menggantikan begitu banyak guru yang pensiun setiap tahun.

Selain itu, pemerintah telah berupaya mengangkat guru ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri, namun kebijakan ini pun tidak serta merta dapat menutupi kekurangan guru. Sekolah negeri saat ini masih tetap mengalami kekurangan guru ASN, dan selama ini kekurangan guru tersebut dipenuhi dengan guru honorer. Kebijakan pemerintah mengangkat ASN melalui jalur P3K sebenarnya hanyalah mengubah status guru dari guru honorer menjadi ASN P3K.

Oleh karena pengadaan tenaga guru ASN dari pemerintah pusat tidak terealisasi, pihak sekolah harus berusaha sendiri memenuhi kebutuhan guru. Cara yang ditempuh adalah dengan meminta guru honorer dari dinas pendidikan, namun tidak semua dinas pendidikan dapat memenuhi permintaan sekolah. Salah satu cara yang ditempuh pemda, misalnya Pemerintah Kota Tangerang yang berupaya mendukung pembangunan pendidikan di wilayahnya adalah dengan merekrut guru yang dibutuhkan sekolah. Ketika menerima usulan dari sekolah, dinas pendidikan mempelajari dan menelaah apakah memang benar sekolah membutuhkan tenaga baru. Jika berdasarkan kalkulasi ternyata

sekolah benar-benar membutuhkan guru baru, maka dinas merekrut dan mengirim guru yang dibutuhkan. Namun, jika dinas pendidikan tidak dapat merekrut guru baru, maka dinas pendidikan memperbolehkan sekolah merekrut sendiri tenaga yang dibutuhkan. Setelah sekolah merekrut guru baru, maka guru tersebut diusulkan untuk diangkat oleh kepala sekolah dengan persetujuan dinas pendidikan agar pengupahannya dapat dilakukan dengan dana APBD. Contoh di Kota Tangerang ini merupakan sebuah praktik baik yang perlu diadopsi dan diterapkan di wilayah lain. Seluruh guru honorer di Kota Tangerang mendapat upah dari APBD dan besarnya sama dengan UMR Kota Tangerang.

Di wilayah lain, sekolah tetap mengusulkan kebutuhan guru ke dinas pendidikan, namun apabila dinas pendidikan tidak bisa mengadakan perekrutan guru baru, maka sekolah dengan sangat terpaksa merekrut guru honorer sekolah yang pengupahannya menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sayangnya, penggunaan dana BOS untuk honor tenaga pendidik dibatasi, sehingga sekolah hanya bisa mengupah guru beberapa ratus ribu saja. Pada peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode ke-3 disebutkan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk pembayaran gaji guru honorer hingga 50% sesuai kebutuhan. Meskipun demikian, kebutuhan pembiayaan sekolah selain untuk kebutuhan guru juga banyak tersedot pada operasional sehari-hari, sehingga pembayaran gaji guru honorer belum optimal. Memang sangat tidak rasional ada lulusan sarjana Pendidikan (SPd) yang mau bekerja dengan honor kecil, namun, karena adanya keinginan atau cita-cita untuk menjadi ASN melalui jalur guru honorer, mereka mau dan bersedia mengajar meskipun berupah kecil. Terlebih lagi, belakangan ini ada penerimaan ASN P3K yang mengutamakan pelamar yang sudah menyandang status guru honorer. Hal ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada lulusan SPd untuk menjadi guru honorer terlebih dahulu meski hanya dengan upah seadanya.

Jenis Guru Honorer dan Proses Perekrutannya

Dalam kajian ini, yang dimaksud guru honorer adalah guru yang tidak berstatus sebagai ASN. Guru honorer ini mengajar di SD dan SMP negeri yang diangkat dan mendapatkan SK penugasan

dari kepala sekolah saja atau bisa juga mendapat SK dari kepala sekolah dengan persetujuan dinas pendidikan, bahkan ada yang mendapat SK penugasan dari kepala daerah. Di beberapa daerah, guru honorer diangkat oleh pemerintah daerah mengikuti skema guru kontrak yang dikenal dengan guru TKK (Tenaga Kerja Kontrak). Mereka digaji langsung oleh pemerintah daerah menggunakan dana APBD. Guru TKK ini mendapat SK penugasan yang ditandatangani oleh kepala daerah. Di Provinsi DKI Jakarta, guru TKK dikenal dengan sebutan guru dengan Kontrak Kerja Individu (KKI) yang digaji setara UMR Provinsi DKI.

Dalam kajian ini, pengelompokan guru honorer mengikuti klasifikasi guru honorer oleh Satriawan (2021) yang mengklasifikasi guru honorer berdasarkan penghasilan. Yang pertama adalah guru kontrak pemerintah daerah, sehingga dikenal juga dengan sebutan guru honorer daerah. Biasanya guru kelompok ini menerima gaji atau penghasilan setiap bulannya dari pemda. Gaji guru ini tidak selalu setara UMR karena disesuaikan dengan beban keuangan daerah. Besar gajinya biasanya berbeda-beda antara satu kabupaten/kota dengan lainnya, karena tergantung pada PAD masing-masing dan UMR daerah. Guru honorer daerah dikontrak per tahun, dan dievaluasi setiap akhir tahun. Jika berperforma baik, kontraknya diperpanjang setahun, dan begitu seterusnya.

Klasifikasi kedua adalah guru honorer sekolah. Berhubung sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) tidak lagi memungut iuran Komite Sekolah, penggajian guru honorer sekolah bersumber dari dana BOS. Biasanya besar gaji yang diterima guru honorer sekolah tergantung dari pencairan dana BOS, sehingga terkadang tiga atau bahkan empat bulan sekali baru menerima gaji. Besar upah mereka tidak standar. Rata-rata upah mereka di bawah Rp 1.000.000,- per bulan, bahkan ada yang berupah di bawah Rp 500.000,- per bulan. Pembayarannya pun sering diberikan secara rapel mengikuti jadwal pencairan dana BOS. Padahal, mereka membutuhkan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Proses rekrutmen guru honorer sekolah sangat bervariasi. Biasanya sekolah tidak mengumumkan adanya lowongan guru, karena

khawatir banyak pelamar yang mendaftar. Jumlah pelamar yang banyak akan memberatkan anggaran sekolah dalam melakukan seleksi. Biasanya lowongan kebutuhan guru disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Kepala sekolah menyampaikan kepada guru bahwa sekolah membutuhkan guru, lalu guru-guru menyampaikan kepada kenalannya yang ingin menjadi guru untuk memasukkan lamaran. Kepala sekolah dibantu oleh guru senior akan menilai lamaran yang masuk. Jika ada pelamar yang dirasa memenuhi persyaratan, maka akan dihubungi untuk melakukan wawancara. Sering terjadi jika sekolah merasa cocok dengan pelamar tertentu dan apabila pelamar tersebut juga merasa cocok dan bersedia, maka pelamar bisa langsung ditawarkan mengajar. Kepala sekolah membuat Surat Keputusan (SK) penugasan sambil guru mulai mengajar. SK tersebut biasanya diperbaharui setiap tahun, tergantung kinerja guru bersangkutan.

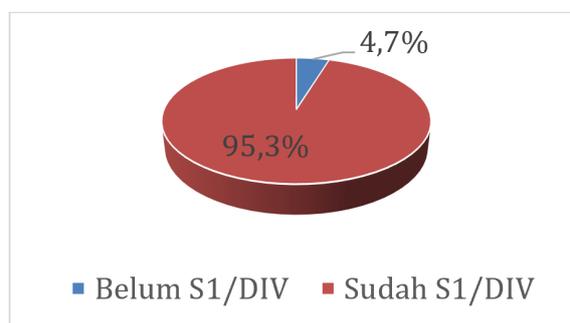
Proses rekrutmen guru honorer sekolah tidak dilakukan secara terstandar. Pada sekolah tertentu, para lulusan SPd mendatangi sekolah sebelum tahun ajaran dimulai untuk menyampaikan lamarannya menjadi guru. Kepala sekolah lalu membuat arsip pemberkasan calon-calon guru yang menyampaikan lamarannya. Ketika sekolah membutuhkan guru, sekolah tinggal membuka arsip lamaran tersebut lalu mengidentifikasi siapa yang paling tepat mengisi lowongan guru yang dibutuhkan. Proses selanjutnya adalah memanggil pelamar yang terseleksi, lalu melakukan wawancara. Jika diperoleh kesepakatan, pelamar tersebut bisa langsung mengajar. SK penugasan bisa langsung dibuat atau dibuat setelah guru tersebut mengajar.

Kasus lain lagi diperoleh dari pengalaman nyata seorang responden yang bercerita bahwa dia tidak perlu melamar sama sekali untuk menjadi guru. Setelah tamat pendidikan menengah, dia ditawarkan untuk mengajar. Responden bersedia mengajar dengan gaji apa adanya. Guru tersebut selanjutnya melakukan pengembangan diri dengan mengambil kuliah S1 untuk memenuhi persyaratan menjadi guru profesional. Sampai sekarang guru ini masih menjadi guru honorer dengan gaji hanya beberapa ratus ribu per bulan. Guru ini juga sudah beberapa kali mengikuti tes untuk menjadi ASN, namun belum berhasil.

Gaji guru ini tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, karenanya guru tersebut terpaksa menambah penghasilan dengan berkebutuhan. Guru ini masih berumur 34 tahun, namun sudah 16 tahun menjadi guru. Guru ini sangat kecewa karena mengikuti seleksi P3K namun tidak lolos. Yang dipermasalahkan adalah dia tidak mendapat afirmasi meskipun sudah lama mengabdikan. Hal ini karena peraturan afirmasi hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah berumur di atas 35 tahun. Jika masa kerja bisa menjadi pertimbangan mendapat afirmasi, mungkin dia bisa lolos seleksi. Responden guru ini sangat berharap agar peraturan afirmasi memberikan rasa keadilan bagi guru honorer.

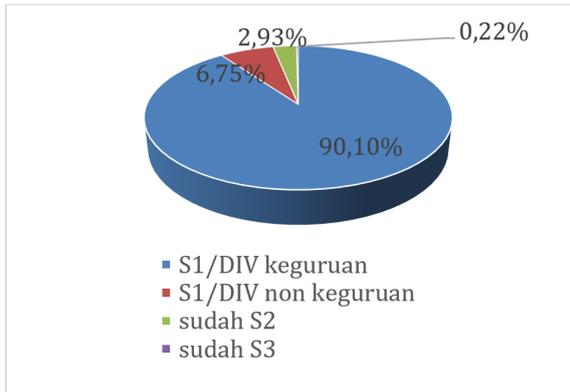
Karier Guru Honorer dan Pembinaannya

Dilihat dari latar belakang pendidikan, pada umumnya guru honorer yang mengisi survei daring sudah berpendidikan S1/D-IV sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan (Gambar 2a). Pada Gambar 2a terlihat bahwa proporsi guru honorer yang masih berpendidikan di bawah S-1 atau D-IV kurang dari 5%. Dari 95,3% yang sudah memiliki ijazah minimal S1/D-IV, sebagian besar sudah memiliki latar belakang pendidikan keguruan, bahkan ada pula yang sudah memiliki ijazah S2 dan/atau S3 (Gambar 2b). Yang hendak ditekankan di sini, bahwa lebih dari 90% guru honorer memiliki pendidikan dan latar belakang pendidikan yang linier untuk mengajar sebagai guru.



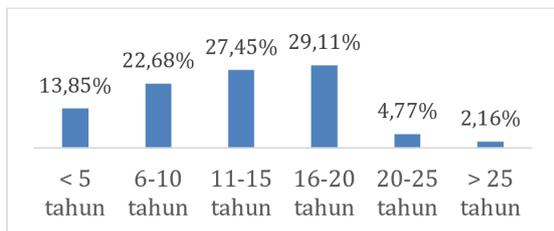
Gambar 2a. Pendidikan terakhir guru honorer (n=2.450).

Sumber: survei daring.



Gambar 2b. Latar belakang pendidikan guru honorer yang sudah S1/DIV (n=2.316) sumber: survei daring.

Masa kerja guru honorer sangat bervariasi. Dari 2.831 guru honorer yang mengikuti survei daring, masa kerjanya bervariasi dari 1 - 40 tahun, dengan rerata masa kerja 12,7 tahun. Masa kerja mayoritas responden adalah 16-20 tahun, yaitu sebesar 29,2%. Hasil ini dapat dilihat pada Gambar 3.



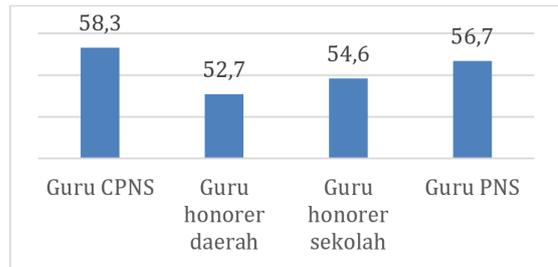
Gambar 3. Masa kerja guru honorer (n=2450) Sumber: survei daring.

Untuk peningkatan jenjang karier, semua guru umumnya ditugaskan untuk mengikuti kegiatan KKG/MGMP. Namun, khusus untuk pelatihan lainnya, guru honorer merasa selalu dinomorduakan, karena jika ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan, sering sekali yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan adalah guru ASN.

Kompetensi, Kinerja, dan Kesejahteraan Guru Honorer

Kompetensi guru honorer dilihat dari hasil UKG 2015 dapat dipelajari pada Gambar 4. Terlihat bahwa rerata kompetensi guru, baik guru ASN dan guru honorer, tidak jauh berbeda,

dan semuanya berada di bawah angka 60. Bahwa status kepegawaian tidak memengaruhi perbedaan kompetensi guru ditemukan pula oleh Artha (2018). Hal yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa secara kompetensi, sebenarnya tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok guru yang ada. Oleh karena itu, seharusnya perhatian pemerintah terhadap setiap kelompok guru tersebut tidak jauh berbeda.



Gambar 4. Nilai UKG 2015 (n-CPNS=51.764, n-guru honorer daerah = 66.526, n-guru honorer sekolah = 247.510, n-guru PNS = 1.296.220) Sumber: Ditjen GTK, 2015.

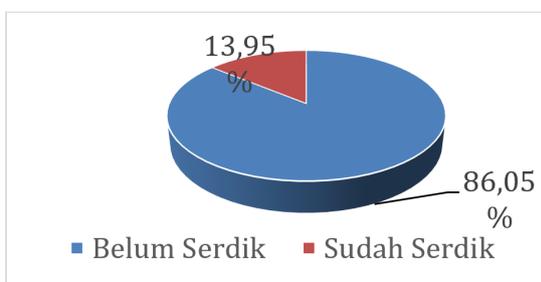
Guru honorer selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Mereka berpendapat bahwa mereka sama-sama mendidik anak bangsa, sama seperti guru ASN. Namun, mereka sering dibedakan terutama dalam hal pengupahan. Upah mereka jauh di bawah gaji guru ASN. Selain memiliki gaji yang tinggi, guru ASN juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sedangkan guru honorer ternyata sangat sulit dalam mendapat TPG.

Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 11667/B/HK/2017 Lampiran III tentang Standar Pelayanan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS menyebutkan bahwa untuk mendapat TPG, seorang guru bukan PNS harus memiliki antara lain sertifikat pendidik (Serdik) yang didapat melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sayangnya, untuk mengikuti PPG, seorang guru harus memiliki SK penugasan dari kepala daerah, dan untuk mendapatkan SK ini sangat tidak mudah. Tidak banyak kepala daerah yang mau menerbitkan SK tersebut, karena khawatir akan ada tuntutan dari guru honorer di kemudian hari terkait berbagai aspek peningkatan

kesejahteraan atau pun pengembangan karier.

Jika dibandingkan dengan guru honorer yang mengajar di sekolah swasta, terlihat bahwa guru honorer di sekolah swasta lebih diberi kemudahan terkait SK penugasan. Guru honorer yang sudah dua tahun bekerja dan memiliki SK penugasan sebagai guru oleh yayasannya diperbolehkan untuk mengikuti PPG, sedangkan guru honorer di sekolah negeri yang sudah lebih dari 2 tahun mengajar tidak mudah untuk mendapat SK penugasan dari pemerintah daerah. Hal yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa pemerintah perlu juga memperhatikan syarat SK penugasan bagi guru honorer di sekolah negeri. Jika SK penugasan guru honorer swasta yang dikeluarkan oleh yayasan diakui, maka sebaiknya SK penugasan guru honorer sekolah negeri oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan bisa dipertimbangkan sebagai syarat mengikuti PPG.

Sejalan dengan pernyataan sulitnya guru honorer mendapatkan Serdik melalui PPG, Gambar 5 menunjukkan bahwa sebagian besar guru honorer yang menjadi responden belum memiliki Serdik.

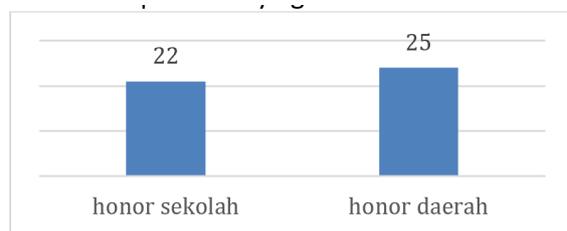


Gambar 5. Kepemilikan Serdik oleh guru honorer (n=2.450).
Sumber: survei daring.

Berdasarkan undang-undang, seorang guru profesional harus mengajar minimal 24 jam tatap muka. Jam Tatap Muka (JTM) atau Jam Pelajaran (JP) adalah alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022, yaitu untuk SD 1 JTM = 35 menit, sedangkan untuk SMP 1 JTM = 40 menit.

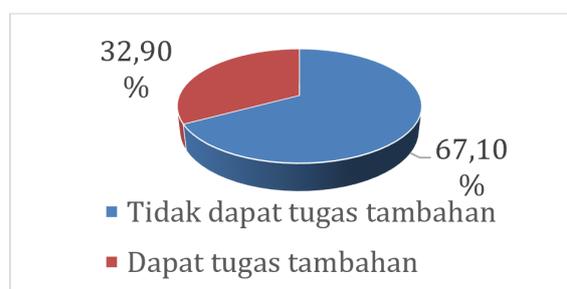
Beban kerja guru bukan ASN dapat dilihat pada Gambar 6. Gambar 6 menunjukkan bahwa beban

kerja guru honorer daerah sudah mencapai standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dari data survei kajian ini, rerata JTM guru honorer daerah adalah 25 jam. Sementara itu, rerata JTM guru honorer sekolah masih kurang dari 24 jam, yaitu baru mencapai 22 jam. Hal ini rasional karena banyak guru honorer sekolah yang jumlah jam mengajarnya sedikit. Namun demikian, data rerata beban kerja guru honorer sekolah sebesar 22 jam menunjukkan bahwa beban kerja sebagian guru honorer sekolah sudah mencapai 24 jam per minggu. Artinya beban kerja sebagian guru honorer sekolah sudah mencapai beban kerja minimal seperti halnya guru ASN.

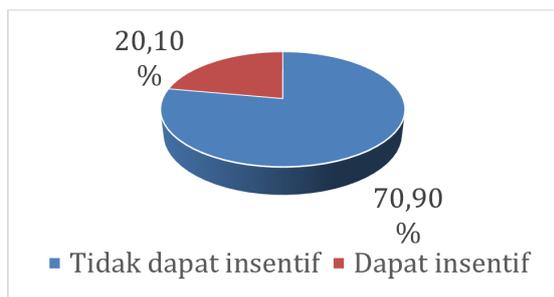


Gambar 6. Beban kerja guru honorer (n-guru honorer sekolah = 818 dan n-guru honorer daerah= 1.632)
Sumber: survei daring.

Selain beban kerjanya sudah memenuhi tuntutan regulasi perundang-undangan, banyak guru honorer juga diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah. Seharusnya, pelaksanaan tugas-tugas tambahan tersebut diberi insentif, namun banyak guru honorer sekolah menyampaikan bahwa mereka tidak mendapat insentif dari mengerjakan tugas tambahan tersebut (Gambar 7a dan 7b).



Gambar 7a. Guru honorer yang mendapat tugas tambahan (n=2.450)
Sumber: survei daring.



Gambar 7b. Ada tidaknya insentif dari mengerjakan tugas tambahan (n=932)
 Sumber: survei daring.

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu pada dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan, standar, atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Lubis, dkk., 2018). Dengan demikian, kinerja guru adalah hasil kerja guru yang diperlihatkan dalam pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya (Nome, 2018).

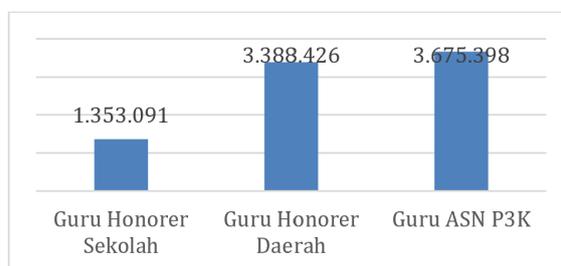
Kinerja guru ini merupakan sebuah variabel laten, artinya tidak dapat diukur secara langsung, namun diukur secara tidak langsung menggunakan indikator kinerja itu sendiri (Ginting, 2009). Selama ini, indikator yang terukur dari kinerja guru adalah prestasi akademis siswa. Prestasi siswa sendiri merupakan hasil kinerja dari seluruh guru baik ASN maupun honorer. Dengan demikian, prestasi siswa sebagai indikator kinerja tidak dapat diukur secara terpisah antara guru ASN dan guru honorer, karena mereka secara bersama-sama mempersiapkan anak-anak didik untuk mengikuti ujian akhir sekolah.

Para kepala sekolah yang diajak berdiskusi menyampaikan bahwa kinerja guru honorer dan ASN sama saja. Mereka berkolaborasi dan saling mendukung dalam melakukan pembelajaran. Sementara ini, khususnya di masa pandemi, guru-guru ASN umumnya guru-guru sepuh yang merupakan guru-guru dengan pengalaman mengajar yang luar biasa. Namun, guru-guru honorer yang secara pengalaman masih kurang, umumnya adalah guru-guru muda yang sangat energik dan memahami teknologi, sehingga kepala sekolah sering menunjuk guru honorer menjadi operator sekolah guna

memenuhi kebutuhan guru-guru di sekolah yang kurang memahami teknologi, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian oleh Sari (2019). Dengan demikian, peran guru honorer sangat penting di dalam membantu guru-guru sepuh untuk dapat melakukan pembelajaran daring, sehingga dapat dikatakan guru-guru baik ASN maupun honorer memiliki kinerja yang sama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan guru honorer selama ini berbeda jauh dengan guru ASN. Dari diskusi dengan guru honorer, diketahui bahwa mereka mendapat upah jauh di bawah UMR. Hal ini ditemukan pula dalam survei daring seperti disajikan pada Gambar 8. Upah yang rendah ini ditemukan pula oleh Israpil (2020) yang menyatakan bahwa upah yang diterima guru honorer tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Padahal beban kerja dan kinerja mereka sama dengan guru ASN (Aisyah, 2017; Sa'adah, dkk., 2018).

Guru honorer menyampaikan bahwa kehadiran dan keberadaan mereka dibutuhkan oleh sekolah. Mereka pun selalu siap membantu teman-teman guru lainnya baik sesama rekan honorer maupun ASN untuk saling mengisi, melengkapi dan berkolaborasi agar kegiatan belajar mengajar baik secara daring atau luring dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, mereka berharap guru honorer yang sudah berijazah linear dengan mata pelajaran yang diajarkan dan yang sudah mengabdikan lebih dari 5 tahun dapat diperhatikan oleh pemerintah. Jika memungkinkan mereka diangkat menjadi ASN, namun jika tidak, mereka meminta diberikan upah yang layak, minimal setara dengan UMR.



Gambar 8. Besar upah guru honorer dan P3K (n-guru honorer sekolah = 818; n-guru honorer daerah= 1.632; n-guru P3K = 381).
 Sumber: survei daring

Pada Gambar 8 terlihat bahwa upah guru honorer sekolah hanya separuh atau bahkan lebih kecil dari separuh upah guru honorer daerah dan guru P3K. Informasi ini dicoba dibandingkan dengan gaji pokok guru PNS yang diperoleh dari survei yang dilakukan bersamaan ketika guru mengikuti UKG 2015. Dari survei tersebut, rerata gaji pokok guru PNS pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 3.566.174 (dengan n= 1.346.165 guru). Gaji guru PNS ini akan menjadi 2 kali lipat apabila guru tersebut sudah memiliki Serdik dan mendapat TPG yang besarnya sama dengan satu kali gaji pokok, sehingga upahnya mencapai 7.132.348,- per bulan. Besar upah guru PNS ini kurang lebih tujuh kali lipat upah guru honorer sekolah.

Peningkatan mutu sekolah akan sulit dilakukan bila permasalahan upah guru honorer yang masih rendah belum terselesaikan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8. Dengan gaji yang tidak cukup membiayai hidup seorang guru honorer, terlebih lagi jika harus membiayai keluarga, kesejahteraan hidup guru honorer masih akan menjadi masalah dan potensi menghambat optimalisasi kinerja mengajarnya. Rendahnya gaji guru honorer ditemukan pula oleh Mansir (2020) yang menyampaikan bahwa guru honorer memiliki kesejahteraan yang rendah. Kecilnya gaji guru honorer menyebabkan ada guru honorer yang terpaksa mengajar di sekolah lain atau mencari pekerjaan sampingan.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Simpulan

Sekolah melakukan pemetaan umur pensiun guru ASN untuk mengetahui proporsi kebutuhan guru. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, kepala sekolah mengusulkan kebutuhan guru kepada dinas pendidikan. Selanjutnya, dinas pendidikan menganalisis usulan tersebut. Jika ternyata benar sekolah membutuhkan guru, maka dinas pendidikan mengirim guru yang dibutuhkan. Namun, jika dinas pendidikan tidak dapat mengadakan guru yang dibutuhkan, maka sekolah diperbolehkan merekrut guru honorer secara mandiri.

Ada dua jenis guru honorer, yaitu guru honorer daerah dan guru honorer sekolah. Belakangan ini, pemerintah melalui BKN merekrut guru P3K. Perekrutan guru P3K diawali dengan pembentukan panitia dengan melibatkan instansi

yang membutuhkan. Proses rekrutmennya banyak menimbulkan kekecewaan di kalangan guru honorer sekolah. Yang dikeluhkan antara lain terkait afirmasi khusus untuk Serdik dan juga afirmasi terkait umur tanpa memperhitungkan masa kerja. Yang memiliki Serdik dapat afirmasi. Kemudian untuk usia juga mendapat kritik keras dari mereka yang sudah lama masa kerjanya namun umurnya belum mencapai batas umur 35 tahun, sehingga mereka tidak mendapat afirmasi. Pengupahan guru P3K mengikuti skema penggajian PNS. Berbeda dengan guru ASN, guru honorer daerah direkrut langsung oleh dinas pendidikan dan terdaftar di Dapodik, sehingga mendapat SK penugasan dari kepala daerah. Mereka mendapat upah yang besarnya hampir setara UMR. Kontrak mereka diperpanjang setiap tahun jika memang masih dibutuhkan. Guru honorer sekolah direkrut oleh kepala sekolah. Kepala sekolah terpaksa merekrut karena usulan untuk mendapat bantuan guru ASN atau guru honorer daerah tidak terpenuhi. Proses rekrutmen guru ini sangat tidak standar, karena pengumuman lowongan tidak dilakukan secara terbuka. Besar gaji guru honorer sekolah tergantung besarnya dana BOS yang diterima sekolah. Upah mereka sangat jauh dari UMR.

Terkait penjenjangan karier, guru honorer merasa dibedakan dari guru ASN. Mereka tidak mudah mendapatkan SK penugasan dari kepala daerah. Sedangkan, SK dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan mengikuti kegiatan PPG untuk mendapat Serdik yang menjadi syarat lulus seleksi P3K. Mereka merasa pemerintah lebih memprioritaskan guru honorer di sekolah swasta. Untuk mengikuti PPG, seorang guru honorer di sekolah swasta dipermudah karena mereka mudah dalam mendapat SK penugasan dari yayasan. Dengan berbekal SK tersebut, mereka dapat mengikuti PPG, sedangkan guru honorer di sekolah negeri sangat kesulitan dalam mendapat SK penugasan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut guru honorer juga merasa dinomorduakan dari guru PNS, karena ketika ada pelatihan dari pemerintah biasanya yang ditugaskan adalah guru ASN.

Menilik aspek kompetensi, guru honorer sebenarnya kompetensinya tidak berbeda jauh dari guru ASN. Demikian pula dari aspek kinerja, tidak terdapat perbedaan yang nyata antara guru honorer dan guru ASN, karena mereka

berkolaborasi dalam pelaksanaan KBM untuk mengajar anak didiknya. Namun, terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada aspek kesejahteraan. Gaji guru ASN bisa lebih dari dua kali lipat gaji guru honorer daerah. Kemudian jika dibandingkan dengan gaji guru honorer sekolah, gaji guru ASN bisa lebih dari tujuh kali lipat. Guru honorer sekolah akhirnya harus mencari tambahan penghasilan dengan mengajar di sekolah lain atau mengerjakan pekerjaan sampingan agar dapat menghidupi keluarganya.

Usulan Kebijakan

Perencanaan kebutuhan guru sebaiknya dikelola langsung oleh dinas pendidikan berdasarkan perencanaan yang dibuat sekolah. Dengan demikian, dinas pendidikan mengetahui kebutuhan guru di wilayahnya dan dapat merekrut guru sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu. Jangan sampai KBM sudah berjalan, namun belum ada guru yang direkrut sehingga mengarahkan sekolah untuk merekrut sendiri. Rekrutmen sendiri oleh sekolah seharusnya dihindari.

Selanjutnya, dalam melakukan rekrutmen, dinas pendidikan sebaiknya menggunakan panduan yang baku dan standar sehingga guru yang berhasil direkrut benar-benar memiliki kualitas yang diharapkan.

Dalam merekrut guru P3K, pemerintah pusat perlu memperhatikan penerapan afirmasi yang memberikan rasa keadilan bagi guru honorer sekolah. Terkait afirmasi Serdik, perlu disadari bahwa banyak guru honorer sekolah tidak dapat mengikuti PPG karena kesulitan mendapat SK penugasan dari kepala daerah yang menjadi persyaratan mengikuti PPG. Guru honorer sekolah merasa dinomorduakan oleh pemerintah, padahal mereka mengabdikan di sekolah milik pemerintah. Guru honorer di sekolah negeri membandingkan kemudahan yang didapat rekannya di sekolah swasta. Guru honorer di sekolah swasta lebih mudah mengikuti PPG dibanding guru honorer di sekolah negeri, karena guru honorer di sekolah negeri harus memiliki SK penugasan dari pemda, sedangkan guru honorer di sekolah swasta harus memiliki SK penugasan dari yayasan. Biasanya, yayasan mudah dalam menerbitkan SK penugasan sedangkan pemda sulit menerbitkannya. Serdik

sendiri akan mempermudah seorang guru honorer lolos tes ASN P3K, karena adanya afirmasi yang tinggi bagi pemegang Serdik. Karena guru honorer di sekolah swasta mudah dalam mendapatkan Serdik secara otomatis memiliki peluang yang tinggi untuk lulus tes ASN P3K.

Selain Serdik, umur juga mendapat afirmasi, namun khusus bagi yang sudah berumur di atas 35 tahun. Guru-guru yang umurnya belum mencapai 35 tahun menyangkan syarat ini karena mereka tidak mendapat afirmasi, padahal masa kerja mereka sama atau bahkan lebih lama dari mereka yang umurnya di atas 35 tahun. Akan lebih baik jika program afirmasi memperhitungkan tidak hanya umur, tetapi juga masa kerja guru. Kemendikbud sebaiknya merevisi aturan afirmasi ini untuk rekrutmen tenaga P3K di masa yang akan datang, sehingga memberikan rasa keadilan bagi guru honorer di sekolah negeri. Pemda juga perlu memudahkan guru honorer sekolah negeri mengikuti PPG dengan memudahkan mereka mendapat SK penugasan, karena mereka mengabdikan di sekolah milik pemerintah dengan beban kerja yang sama atau bahkan lebih besar dari guru ASN.

Ketika dilakukan rekrutmen guru baru, sebaiknya rekrutmen dilakukan oleh dinas pendidikan. Untuk mencegah munculnya keluhan dari guru honorer, sebaiknya guru-guru yang direkrut adalah mereka yang sudah memiliki Serdik. Ditjen GTK perlu lebih gencar lagi mempromosikan profesi guru di sekolah menengah dan juga di LPTK dengan menekankan bahwa untuk melamar menjadi guru dibutuhkan lulusan sarjana pendidikan yang sudah mengikuti PPG prajabatan. Dengan promosi ini, calon guru akan diberi informasi yang benar bahwa menjadi guru ASN jalurnya bukan melalui guru honorer melainkan melalui PPG, yaitu pendidikan lanjutan setelah menyelesaikan sarjana pendidikan.

Terkait peningkatan jenjang karier, sebaiknya kepala sekolah memberikan kesempatan kepada setiap guru baik ASN maupun honorer secara adil untuk mengikuti pelatihan yang diadakan pemerintah. Guru honorer merasa sangat dibutuhkan di sekolah, namun ketika ada pelatihan atau kegiatan pengembangan diri dari pemerintah, guru ASN yang selalu diutamakan. Untuk mencegah hal ini, pemerintah sebaiknya

menuliskan langsung nama-nama guru terkait ketika mengundang mereka untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan pengembangan diri lainnya.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan guru honorer sekolah, karena gaji mereka di bawah UMR. Jika ingin memperbaiki mutu pendidikan, maka kesejahteraan guru harus diperbaiki. Saat ini masih saja ada guru honorer yang terpaksa mengajar pada lebih dari satu sekolah atau mengerjakan pekerjaan sampingan untuk dapat menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, perlu untuk mengidentifikasi guru-guru yang sudah berpendidikan sarjana pendidikan dan mampu mata pelajaran yang linear sesuai dengan jurusan pendidikannya, serta memiliki beban kerja minimal 24 JTM per minggu agar diangkat menjadi guru ASN P3K. Jika menjadi guru ASN P3K tidak memungkinkan, maka perlu kerja sama dengan pemda agar guru-guru dengan kriteria seperti ini dapat diangkat menjadi guru honorer daerah dengan upah UMR.

PUSTAKA ACUAN

- Aisyah T, N. (2017). *Perbedaan persepsi kinerja guru PNS dan Non PNS pada Sekolah Dasar Negeri di Desa Saotengnga Kabupaten Sinjai* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Aliyyah, R. R. (2018). *Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Polimedia Publishing.
- Artha, M. Y. P. (2018). *Kompetensi Pedagogik Guru Ditinjau dari Pangkat, Golongan, Status Kepegawaian, dan Jenis Kelamin Guru Berdasarkan Survei Pada Guru-Guru SMA dan SMK Negeri Se-Kabupaten Sleman Yogyakarta*. (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2015). *Data Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015* [Dataset].
- Fakhroh, Z. M. (2018). *Hubungan Pendapatan dengan Kualitas Kinerja Guru dalam Pembelajaran di SMK Diponegoro 1 Purwokerto* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto)
- Fauzan, G. A. (2021). Guru Honorer dalam Lingkaran Ketidakadilan. *Journal on Education*, 4(1), 197-208.
- Fauzi, H., & Syafar, D. (2017). Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar di Yogyakarta. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 162-172.
- Ginting, D. B. (2009). Structural Equation Model (SEM). *Media Informatika*, 8(3), 121-134.
- Isnaini, R. L. (2015). Implementasi Rekrutmen Guru Disd Ta' Mirul Islam Surakarta (Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sd Islam). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(1), 109-120.
- Israpil, I. (2020). Pengelolaan dan Pemberdayaan Guru Non PNS Pada Madrasah Negeri di Kota Kendari. *EDUCANDUM*, 6(1), 22-30.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). *Hadiah Penghormatan Untuk Guru: Penuhi Haknya, Berikan Upah Layak* [Siaran Pers Nomor: 299/HUMAS PMK/XI/2022].
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2021). *Statistik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB 2020/2021*.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Lubis, Y., Hermanto, B., & Edison, E. (2018). *Manajemen dan Riset Sumber Daya Manusia* (Cetakan Kedua). Bandung: Alfabeta. CV.
- Lumbanrau, R.E. (21 Februari 2021). Kasus Hervina dan Nestapa Kehidupan Guru Honorer: 'Dilema antara Gaji Rendah, Pengabdian Tanpa Kepastian dan Cinta Pekerjaan'. *BBC.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56094473>.
- Mansir, F. (2020). Kesejahteraan Dan Kualitas Guru Sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital. *Jurnal IKA PGSD*

- (Ikatan Alumni PGSD) Unars, 8(2), 293-303. <https://doi.org/10.36841/pgsdunars.v8i2.829>.
- Musfah, J. (3 Februari 2020). Mengatasi Kekurangan Guru. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/opini/287392/mengatasi-kekurangan-guru>.
- Nome, N. (2018). Mengulas dan Memahami Kinerja Guru. *Jurnal Luxnos Vol, 4(2)*, 1-8.
- Oktafiana, R., Fathiyani, F., & Musdalifah, M. (2020). Kebijakan Kesejahteraan Guru terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Mappesona, 3(3)*, 1-13.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer.
- Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1167/B /H K /2017 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Standar Pelayanan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.
- Putri A. (2015). Permasalahan Guru Honorer yang Tak Kunjung Selesai. <https://www.rappler.com/world/asia-pacific/guru-honorer-kemendikbud-anies-baswedan>. Diakses pada 29 Januari 2021.
- Rahayu, M., Ulfatin, N., & Juharyanto, J. (2018). Sistem Pengelolaan Guru Tidak Tetap (GTT) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, 1(3)*, 263-269.
- Rais, M. (2019). Pengelolaan Guru Pendidikan Agama Non PNS Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Gorontalo. *EDUCANDUM, 5(2)*, 277-288.
- Romdin, R. R. *Kesejahteraan subjektif guru honorer Sekolah Dasar Negeri di Gugus 02 Kecamatan Tiga Raksa* (Tesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sa'adah N., Yudana, I.M., dan Arya Sunu I.G.K. (2018). Studi komparatif tentang perbedaan kinerja guru PKN PNS dengan non PNS (Studi pada SMP di Kota Singaraja). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 6(2)*, 16-26.
- Sari, A. M. A. (2019). *Analisis Peran Guru Tidak Tetap (GTT) Sebagai Guru Kelas Dan Operator Sekolah Di Kecamatan Sanankulon* (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Satriwan, S. (5 November 2021). Afirmasi dan Solusi Guru PPPK. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/08/afirmasi-dan-solusi-guru-pppk>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Widiarto, A. (2020). Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, 11(1)*, 89-103.
- Zachri E. (2016). Guru Honorer Tumbuh di Luar Kendali. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/753092/guru-honorer-tumbuh-di-luar-kendali>. Diakses pada tanggal 5 November 2021.

ABSTRACT

Based on the current age composition of the population, Indonesia is predicted to get a demographic bonus from 2030 to 2040. However, the phenomenon of adolescent deviance, such as 'klitih', drugs abuse, cyberbullying, promiscuity, and so on, might continue to be a persistent problem in the future. Parents are one of the most important agents in nurturing positive characters. Therefore, this study tried to examine what parents can do to strengthen positive characters in teenagers and avert them from deviant behavior or juvenile delinquency. This study used literature review as the method of the research. This study found that parents' roles should include: ensure that adolescents can go through their developmental phases well; understand adolescent psychology; and be a good role model for teenagers. Furthermore, they need to develop the 3 dimensions of character, which are moral knowing, moral feeling, and moral action. Moreover, they need to apply the appropriate parenting styles according to the needs of their teenagers. Meanwhile, to optimize children's potential, parents are expected to implement the multiple intelligences approach in their children's education. Cooperation with various parties, especially schools, is needed to ensure these efforts run effectively.

Key words: *juvenile delinquency, character education, parents' role, deviant behaviors, children potential*

ABSTRAK

Berdasarkan komposisi usia penduduk saat ini, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040. Namun, fenomena penyimpangan pada remaja, seperti aksi *klitih*, penyalahgunaan narkoba, *cyberbullying*, pergaulan bebas, dan sebagainya, dikhawatirkan akan menjadi masalah tersendiri di kemudian hari. Orang tua merupakan salah satu agen yang sangat penting dalam pembentukan karakter-karakter positif bagi remaja. Oleh karena itu, artikel ini akan mencoba membedah hal-hal apa yang bisa dijalankan para orang tua untuk menguatkan karakter para remaja dan menghindarkan mereka dari perilaku menyimpang atau kenakalan remaja. Metode yang digunakan adalah *literature review* atau kajian pustaka. Dari hasil kajian pustaka diketahui bahwa peran yang perlu dilakukan orang tua adalah mengusahakan agar remaja bisa memenuhi tugas-tugas perkembangannya, memahami psikologi remaja, dan menjadi *role model* yang baik untuk remaja. Selain itu, mereka juga harus mengembangkan 3 dimensi karakter, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Di samping itu, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk mengoptimalkan potensi anak, orang tua bisa menerapkan pendidikan di dalam rumah dengan pendekatan kecerdasan majemuk. Kerja sama orang tua dengan berbagai pihak, khususnya sekolah, sangat diperlukan agar upaya-upaya tersebut berjalan dengan efektif.

Kata kunci: kenakalan remaja, penguatan karakter, peran orang tua, perilaku menyimpang, potensi anak

PENDAHULUAN

Perilaku menyimpang di kalangan remaja, khususnya di Indonesia, akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Beberapa perilaku menyimpang seperti *klitih*, *cyberbullying*, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, hingga tawuran, sangat sering diberitakan berbagai media. Fenomena *klitih* misalnya, beberapa waktu terakhir ini menjadi *trending topic* dalam berbagai aplikasi percakapan, khususnya di media sosial. *Klitih* adalah sebuah istilah yang merujuk pada kegiatan kejahatan seperti pembacokan, yang banyak terjadi di daerah Yogyakarta. Brigjen Pol R. Slamet Santoso, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021 ada 58 kasus *klitih*, dengan pelaku hampir dua kali lipat, yakni 102 orang. Ironisnya, 80 orang dari pelaku tersebut, menurut Slamet, masih berstatus sebagai pelajar (Perwitasari, 2021).

Perilaku menyimpang lainnya adalah penyalahgunaan narkoba. Meskipun berbagai cara telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik tindakan preventif maupun kuratif, nyatanya pengguna narkoba justru semakin tak terkendali. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), angka pengguna zat-zat berbahaya ini pada tahun 2019 mencapai 3,6 juta pengguna. Sebagian besar, yakni 63% adalah pengguna ganja. Dari data pengguna tersebut, 27% adalah dari kalangan mahasiswa dan pelajar (Tambun, 2021).

Fenomena seks bebas pun cukup marak. Meskipun Indonesia menganut budaya yang tidak membolehkan perilaku seksual di luar pernikahan, nyatanya tradisi tersebut banyak dilanggar. Baru-baru ini, detik.com (13/1/2022) mewartakan sejumlah 266 remaja di Ponorogo mengajukan permohonan menikah dini (yang melanggar UU Pernikahan) di kantor Pengadilan Agama, dengan alasan sudah hamil di luar pernikahan. Kasus ini meningkat, karena sebelumnya, yakni tahun 2020, hanya ada 241 kasus. Usia remaja yang mengalami kehamilan di luar pernikahan ada pada kisaran 15-18 tahun (Pebrianti, 2022).

Fenomena *cyberbullying* juga meningkat, seiring dengan meningkatnya penggunaan internet pada remaja. Penelitian yang melibatkan 290 pelajar SMP dan 200 pelajar SMA di sekolah

menengah atas di Surakarta, menunjukkan bahwa 37,1% subyek pernah melakukan aktivitas *cyberbullying*. Subjek melakukan *cyberbullying* sebagai hiburan dengan cara mengolok-olok, mengunggah gosip atau rumor dalam rangka merusak reputasi seseorang (Hudiyah dkk., 2016).

Keempat contoh di atas, yakni fenomena *klitih*, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan *cyberbullying*, hanya merupakan beberapa contoh dari panjangnya kasus-kasus kenakalan yang dilakukan oleh para remaja. Secara psikologis, masa remaja adalah masa yang penuh krisis. Menurut Sarwono (2019), masa remaja adalah masa penuh kesukaran, bukan hanya kesukaran untuk individu yang bersangkutan, tetapi juga kesukaran bagi orang tua, masyarakat, bahkan pihak-pihak lainnya. Masa remaja adalah masa negativistik, yaitu masa ketika mulai ada perbedaan pandangan dan pendapat antara remaja dengan orang tua. Masa remaja identik dengan kebingungan dalam mencari identitas dirinya sendiri (Santrock, 2002). Pendapat orang tua menurutnya tidak cukup kuat, tetapi mereka sendiri juga belum cukup mapan, sehingga akhirnya remaja akan mudah dipengaruhi lingkungan sosial atau teman-temannya. Hurlock (2017) mengistilahkan masa remaja sebagai masa *storm and stress*, sebuah istilah yang mengacu pada masa-masa di mana ketegangan emosional meninggi yang disebabkan karena berbagai perubahan fisik dan hormonal. Masa remaja (*adolescence*) merupakan masa transisi dari anak-anak menuju remaja. Pada masa ini, terjadi perkembangan-perkembangan penting, yakni perkembangan fisik (perubahan pubertas, perubahan otak), perkembangan kognitif, dan juga perkembangan sosial-emosional (King, 2018).

Patologi sosial memandang bahwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan sumber patologi sosial yang terjadi pada usia remaja, di mana remaja melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan dalam lingkungan sosial. Kenakalan ini muncul dari sikap remaja yang senang membangkang atau memberontak (Datu, 2021). Ditinjau dari psikologi perkembangan, remaja yang melakukan hal-hal yang dikategorikan sebagai menyimpang atau nakal, sebenarnya merupakan remaja yang tidak mampu memenuhi atau gagal dalam tugas perkembangannya. Terjadi disfungsi tugas

perkembangan, yang mungkin terjadi di fase kanak-kanak awal hingga remaja akhir, sehingga remaja mengalami permasalahan dengan ketidakmampuan melakukan penyesuaian (*social incompetence*), dan terdapat ketidakseimbangan antara tuntutan (*task*) dengan kemampuan untuk melakukannya (*skill*) (Ekowarni, 2016).

Penelitian Safaria, dkk. (2020) menunjukkan bahwa tipe kepribadian seperti *Machiavellianism*, *Psychopathy*, dan *Narcissism* merupakan prediktor kuat perilaku *cyberbullying* pada remaja usia 12-18 tahun. Pada riset yang melibatkan 2.407 subjek, terbukti bahwa *the dark triad personality* tersebut berkorelasi positif serta signifikan dengan *cyberbullying*, dengan *Machiavellianism* sebagai prediktor terkuat disusul oleh *Psychopathy* dan *Narcissism*.

Perilaku menyimpang tersebut bisa menyebabkan kenakalan remaja, yakni sebuah perbuatan yang bertentangan dengan norma, hukum, atau aturan-aturan pada masyarakat, dengan pelaku adalah remaja yang merupakan usia-usia transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa (Kartono, 2019). Perilaku remaja harus dikontrol, sebab jika perilaku menyimpang menetap dalam waktu lama, akan menyebabkan permasalahan serius, yang mana kenakalan bisa berubah jadi kriminalitas.

Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi, sebuah keadaan di mana angka penduduk dalam usia produktif cukup tinggi. Masa tersebut akan terjadi pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang, saat itu penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dominan dibanding usia tidak produktif (Muhtarom, 2021). Bonus demografi sebenarnya menguntungkan secara ekonomi (Sugiearto, dkk., 2021), tetapi jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang andal, justru akan menjadi musibah demografi.

Remaja saat ini sebenarnya adalah calon-calon manusia dewasa pada periode tersebut. Pendidikan karakter dapat membentuk remaja-remaja tersebut menjadi sosok yang bisa diandalkan. Di sinilah peran agen-agen perubahan sosial, seperti keluarga, sekolah, komunitas, dan sebagainya menjadi sangat penting. Lebih khusus lagi adalah peran orang tua. Artikel ini mencoba memaparkan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan orang tua dalam membentuk karakter anak-anak mereka. Peran

aktif orang tua sangat diharapkan dalam rangka menghindarkan para remaja dari perilaku menyimpang.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini mencoba membedah fenomena permasalahan kenakalan remaja dan peran orang tua dalam pendidikan karakter untuk mencegah perilaku menyimpang. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan sumber dari berbagai buku referensi, jurnal, media cetak, *online* dan sumber-sumber lainnya yang valid. Dari kajian pustaka tersebut, penulis mengkaji serta merumuskan kontribusi dari teori-teori tersebut untuk menjelaskan satu tema tertentu, dalam hal ini adalah peran orang tua dalam mencegah kenakalan remaja melalui pendidikan karakter, serta pengoptimalan potensi anak melalui pendekatan kecerdasan majemuk. Penulis juga memberikan usulan-usulan yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, tokoh agama dan pihak-pihak terkait agar kenakalan remaja bisa diminimalkan dan potensi-potensi remaja bisa dioptimalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, kenakalan (delinkuensi) pada remaja terbagi menjadi empat tipe, yaitu delinkuensi terisolir, delinkuensi neurotik, delinkuensi psikotik, dan delinkuensi defek moral (Kartono, 2019). Dari empat tipe ini, barangkali tipe psikotiklah yang paling membahayakan orang lain, karena biasanya berhubungan dengan kriminalitas. Delinkuensi defek moral juga cukup berbahaya, karena mereka bisa menjadi penjahat yang sulit untuk direhabilitasi, karena telah mengalami kerusakan (*defect, defectus*) moral. Tipe lain tetap berbahaya, namun bahayanya lebih kepada internal diri individu itu sendiri dibanding eksternal. Pada delinkuensi neurotik, remaja mengalami masalah kejiwaan yang serius, seperti kecemasan, rasa takut, tidak aman, bersalah, dan sebagainya (Kartono, 2019).

Heiner membuktikan dalam risetnya bahwa kompetensi sosial (*social competence*) yang dimiliki remaja yang nakal ternyata sangat kurang dibandingkan dengan remaja yang tidak nakal (Ekowarni, 2016). Jadi, remaja tersebut sebenarnya masih belum dewasa dan belum

siap untuk memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Secara usia, remaja tersebut telah memasuki usia menjelang dewasa, tetapi belum memiliki keterampilan sosial yang mestinya sudah dimiliki.

Perilaku menyimpang sangat terkait dengan disfungsi tugas-tugas perkembangan usia remaja sehingga perlu diatasi dengan segera. Tugas perkembangan menurut Hurlock (2017), Erikson (1994), Santrock (2017) dan pakar psikologi perkembangan lainnya adalah tugas atau peran yang harus dijalankan sesuai dengan usianya.

Menurut Hurlock (2017), remaja memiliki tugas-tugas perkembangan sebagai berikut: penerimaan terhadap kondisi fisik; penerimaan dan pemahaman tentang permasalahan seksual; kemampuan membentuk hubungan positif dengan orang yang berlainan jenis; mencapai kemandirian emosional; kemandirian finansial; mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual di lingkungan sosial-masyarakat; memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua; perilaku tanggung jawab sosial untuk memasuki dunia dewasa; mempersiapkan diri memasuki perkawinan; bertanggung jawab dan memahami serta mempersiapkan kehidupan berumah tangga (Hurlock, 2017).

Tugas-tugas perkembangan tersebut sangat berkaitan erat dengan pendidikan karakter, yang merupakan salah satu hal penting yang sudah digaungkan sejak masa silam oleh pendiri-pendiri bangsa ini. Dalam teks lagu kebangsaan Indonesia, terdapat kata '*bangunlah jiwanya, bangunlah badannya*' yang sebenarnya merujuk pada upaya bangsa untuk membentuk karakter bangsa yang sehat. Tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Menurut Lickona (2013), ada tiga dimensi dalam pendidikan karakter, yaitu pengetahuan atau pemahaman tentang masalah-masalah moral (*moral knowing*), afeksi atau perasaan berkaitan dengan moralitas (*moral feeling*), dan tindakan atau aksi-aksi untuk menjalankan nilai-nilai moral (*moral action*). Karakter yang baik merupakan

perpaduan dari tiga dimensi tersebut.

Karakter yang baik tidak sekadar mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi juga mencintai yang baik, membenci yang buruk, serta mencoba melakukan sesuatu yang baik dan menjauhi keburukan. Pendidikan moral ini akan sangat ideal jika berlangsung secara simultan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan yang lebih luas.

Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter

Tidak bisa dimungkiri, orang tua memainkan peranan sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Para psikolog aliran psikodinamika, seperti Sigmund Freud meyakini sepenuhnya bahwa perilaku dan perasaan orang dewasa, termasuk juga masalah psikologisnya, berasal dari pengalaman masa kecil. Interaksi yang hangat dan harmonis antara anak dengan orang tuanya sangat penting dalam pembentukan karakter manusia (Jarvis, 2018).

Dalam perspektif behaviorisme, perilaku manusia dipengaruhi dari pengondisian (*conditioning*), baik pengondisian klasik (*classical conditioning*) (Watson, 1925), pengondisian operan (*operant conditioning*) (Skinner, 1938), maupun teori belajar sosial (*social learning*) yang membutuhkan model (Bandura, 1997). Anak melewati masa-masa yang sangat lekat dan intensif dengan orang tua, maka peran orang tua tentu sangat dominan. Perspektif humanistik juga melihat bahwa manusia dimotivasi oleh adanya keinginan untuk berkembang dan memenuhi potensinya, maka orang tua jelas memiliki peran sangat penting dalam pengembangan potensi anak (Jarvis, 2018; King, 2018; Jaenudin, 2015).

Saat ini kita mengenal beragam pola asuh yang lazim diterapkan orang tua, yakni pengasuhan bertipe otoriter (pengasuhan penuh dengan pembatasan dan hukuman), pola asuh otoritatif/demokratis (memberi kebebasan, tetapi masih dalam batas-batas kendali), dan pola asuh permisif atau memberikan kebebasan seluas-luasnya (Santrock, 2017).

Beberapa penelitian menyebutkan, pola asuh otoritatif lebih efektif dalam membentuk karakter pada anak (Riati, 2016). Penelitian Vitasari (2013) menyebutkan bahwa pola asuh demokratis atau otoritatif yang diterapkan orang

tua ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan anak dalam berpendapat dan mengeluarkan opini. Anak tidak takut untuk mengungkapkan pemikirannya karena merasa orang tua tidak akan memarahi.

Orang tua memiliki kontribusi sangat besar dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang berupa kenakalan remaja. Baik teori psikodinamika, psikologi behavioristik, psikologi humanistik, maupun teori-teori lainnya, menempatkan hubungan antara orang tua dengan anak sebagai sebuah interaksi yang sangat eksklusif dalam pembentukan karakter anak.

Secara lebih terperinci, beberapa peran yang bisa dilakukan orang tua dalam membentuk karakter positif pada anak agar kenakalan remaja bisa dicegah tercantum pada poin-poin berikut.

1) Mengusahakan agar anak bisa memenuhi tugas-tugas perkembangannya

Kompetensi yang rendah dalam kehidupan sosial atau *social incompetence*, menurut McFall (dalam Ekowarni, 2016) dianggap sebagai sebab remaja mengalami kenakalan. *Social incompetence* disebabkan karena adanya disfungsi tugas perkembangan pada usia remaja, atau pun berawal dari disfungsi tugas perkembangan pada usia-usia sebelumnya. Orang tua yang abai terhadap tugas-tugas perkembangan ini, sangat mungkin memiliki anak yang mengalami perilaku menyimpang dalam setiap fase usianya. Masa-masa negativistik pertama, kedua, dan ketiga, seperti diungkapkan oleh Sarwono (2019), bisa menjadi masa-masa krisis yang tidak terselesaikan dengan baik dan terakumulasi.

Tugas-tugas perkembangan remaja kebanyakan adalah soal karakter atau moral. Sebagai orang yang sangat dekat dengan kehidupan anak, sudah sewajarnya orang tua memantau apakah tugas perkembangan tersebut berjalan dengan baik, dan memfasilitasi agar anak bisa memenuhi tugas-tugas tersebut. Orang tua bisa memberikan pengertian, menasihati, membelikan buku-buku, mengikutsertakan anak dalam seminar-seminar atau pelatihan tentang wirausaha, atau mendaftarkan anak dalam kelas-kelas pranikah yang saat ini cukup banyak diselenggarakan, atau kegiatan lain yang berefek terhadap pemenuhan tugas-tugas

perkembangan tersebut.

Pada usia remaja, anak sudah mulai berinteraksi dengan lawan jenis, yang biasanya diikuti dengan berbagai macam permasalahan seperti jatuh cinta, cemburu, patah hati dengan lawan jenis, dan sebagainya. Orang tua sebisa mungkin mendekati dan menjadi sahabat untuk anaknya. Menjadi tempat bercerita sekaligus konselor percintaan yang dipercaya anak-anaknya.

2) Memahami psikologi remaja

Ketika remaja mengalami krisis dan berada pada fase negativistik ketiga sebagaimana disebutkan oleh Sarwono (2019), remaja memang sering menunjukkan perilaku yang kurang terkontrol. Misalnya, ada luapan-luapan emosi yang cukup menjengkelkan. Hal ini membuat orang tua merasa kurang nyaman, dan justru sering kali malah terlibat konflik dengan anak. Akhirnya, hubungan antara anak dan orang tua menjadi renggang. Padahal, pada fase ini, remaja juga sedang mengalami kebingungan identitas. Orang tua mestinya melakukan bimbingan, bukan justru menjauhinya.

Remaja yang mengalami kebingungan identitas (*identity confusion*) sementara dia tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari orang tuanya, akhirnya cenderung mengasingkan diri, atau malah bergabung bersama komunitas di luar keluarga. Jika komunitas yang dipilih memiliki kegiatan-kegiatan negatif, seperti geng *klitih*, tawuran, narkoba, atau geng motor, maka anak cenderung untuk mengikuti komunitasnya dan terjebak pada kenakalan remaja.

3) Menjadi teladan yang baik untuk anak

Dalam teori *social learning*, Bandura menyebutkan bahwa orang cenderung untuk meniru sosok yang menjadi model baginya. Proses *modeling* sangat penting dalam proses pembentukan perilaku atau karakter (Greene, 2017). Dalam proses pencarian identitas, remaja juga mencari sosok yang menjadi model baginya. Menurut Erikson, fase kelima dalam tahap perkembangan sosial emosional yang terjadi pada usia-usia remaja adalah identitas vs kebingungan identitas (*identity vs identity confusion*) (Erikson, 2015). Pada periode ini, remaja harus mendapatkan bimbingan intensif, agar bisa memahami dan memiliki konsep diri

yang baik.

Sosok yang paling ideal untuk menjadi model bagi seorang anak tentu saja orang tua. Karena itu, kita sering mendengar istilah *'like father, like son'*, atau *'like mother, like daughter'*. Dalam bahasa Indonesia, kita juga mengenal peribahasa 'buah jatuh tak jauh dari pohonnya' atau 'air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga', yang artinya bahwa tabiat, watak, atau karakter dari orang tua akan menurun kepada anaknya. Oleh karena itu, jika orang tua mampu menjadi model yang baik untuk anak-anaknya, kemungkinan besar, anak-anaknya akan memiliki karakter yang baik, dan terhindar dari kenakalan remaja.

4) Mengembangkan tiga dimensi karakter: *moral knowing, moral feeling, dan moral action*

Menurut Lickona (2013), tiga dimensi dari pembentukan karakter adalah mengetahui moral atau nilai-nilai kebaikan (*moral knowing*), merasakan moral atau nilai-nilai kebaikan (*moral feeling*), dan melakukan atau menjalankan nilai-nilai moral (*moral action*). Ketiga dimensi ini bisa dikondisikan atau ditanamkan orang tua sejak anak berusia dini. *Moral knowing* bisa dilakukan misalnya dengan mendongeng tentang karakter yang baik. Cerita-cerita rakyat di negara kita banyak yang mengajarkan kebaikan, misal tentang berbuat baik terhadap orang tua, ada pada *Kisah Si Malin Kundang*. Cerita tentang perintah untuk bersikap dermawan, ada pada *Legenda Terbentuknya Danau Rawa Pening*, dan sebagainya. Kisah-kisah para tokoh agama, pahlawan dan sosok inspiratif juga bisa membantu mengenalkan anak pada kebaikan.

Setelah mengenal nilai-nilai moral, anak bisa diajari untuk mulai mencintai dan merasakan nilai-nilai moral, dan kemudian dilatih untuk mulai melakukan tindakan-tindakan kebaikan tersebut. Dalam penerapannya, berbagai penguatan (*reinforcement*) dan juga hukuman (*punishment*) bisa dilakukan. Menurut Skinner (dalam Jarvis, 2018), pengondisian operan dengan penguatan dan hukuman bisa membentuk satu perilaku tertentu sesuai tujuan. Memberi hadiah, memberi pujian, menyemangati, memberikan kalimat-kalimat positif jika anak melakukan progres baik; tidak memberi hadiah, menasihati, mengurangi fasilitas, jika anak melakukan sebaliknya; merupakan bentuk-bentuk dari

pengondisian operan.

Agar lebih efektif, orang tua bisa bekerja sama dengan sekolah, sehingga pembentukan karakter tidak hanya terjadi di rumah, tetapi juga di sekolah. Memang pada faktanya, tidak semua sekolah mudah diajak bekerja sama, karena itu orang tua perlu juga mengusahakan pemilihan sekolah yang baik dan mampu mendukung pembentukan karakter baik. Memilih lingkungan tempat tinggal juga sangat penting. Orang tua perlu berikhtiar untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang berada di lingkungan kondusif untuk pembentukan karakter anak.

5) Menerapkan pola asuh yang tepat sesuai kebutuhan anak

Pola asuh yang baik sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Penerapan pola asuh otoriter, demokratis, atau permisif, tentu ditentukan sesuai kebutuhan anak. Akan tetapi, menurut berbagai penelitian, pola asuh yang demokratis atau otoritatif memiliki efek baik untuk karakter anak. Penelitian Riati (2016) dan Vitasari (2013) memperlihatkan bahwa pola asuh otoritatif ternyata paling tepat dan efektif untuk membentuk karakter anak dibandingkan pola asuh otoriter ataupun permisif.

Pola asuh otoritatif adalah pola asuh di mana orang tua memberikan otoritas atau kebebasan anak untuk bisa mandiri, namun tetap memegang kendali (Santrock, 2002). Pola ini merupakan jalan tengah antara pola asuh otoriter—di mana orang tua membatasi secara ketat segala keinginan anak dan berorientasi pada hukuman, dengan pola asuh permisif, atau anak dibiarkan bebas berkehendak sesuka hatinya.

Peran Orang tua dalam Optimalisasi Potensi Anak

Kompetensi yang rendah pada anak dipandang sebagai sebab utama munculnya kenakalan pada remaja (Ekowarni, 2016). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi merupakan sebuah langkah tepat untuk mengurangi permasalahan tersebut. Peningkatan kompetensi akan efektif jika dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Setiap anak pada dasarnya memiliki potensi berupa bakat dan minat tertentu yang bisa dikembangkan. Dalam hal ini, pendekatan kecerdasan majemuk dari Gardner bisa menjadi

salah satu alternatif.

Howard Gardner telah mengembangkan teori kecerdasan majemuk yang menyatakan bahwa ada berbagai tipe kecerdasan, yaitu naturalis, logis-matematis, musikal, eksistensial, interpersonal, linguistik, kinestetik-jasmani, intrapersonal dan visual spasial (Syarifah, 2019). Konsep ini telah banyak dikaji dan diterapkan di berbagai kurikulum (Attwood, 2022). Penelitian Umarella (2019) menunjukkan bahwa penggunaan konsep kecerdasan majemuk efektif dalam meningkatkan prestasi siswa di SMPN 14 Ambon. Penerapan konsep pendekatan kecerdasan majemuk dalam mendidik anak, dianggap sesuai dengan spirit dari pendidikan itu sendiri yang berusaha untuk memanusaiakan manusia (Husnah, 2019).

Meskipun banyak sekolah telah menerapkan konsep kecerdasan majemuk dalam kurikulumnya, peran orang tua sangat penting, sebab konsep kecerdasan majemuk berpangkal dari keunikan masing-masing individu (Syarifah, 2019). Orang tua yang lazimnya setiap hari bertemu dengan anak, sebaiknya membangun interaksi yang intens dan kuat dengan anak-anaknya dalam kerangka pendekatan konsep ini. Sejak anak masih berusia dini, orang tua bisa melakukan eksplorasi untuk melihat kecenderungan anak mengarah pada tipe kecerdasan yang mana dari beberapa jenis kecerdasan yang diungkapkan oleh Gardner tersebut. Sebisa mungkin, orang tua memberikan lingkungan yang kondusif dan berusaha memfasilitasi kebutuhan anak dalam berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.

Proses pembelajaran dalam lingkungan terkecil, yakni rumah, yang berbasis pada pendekatan potensi anak, akan menjadi sebuah proses yang mengasyikkan bagi anak tersebut. Ketika anak merasa senang dan nyaman dalam proses pembelajaran, anak akan banyak menghabiskan waktu dalam kegiatan positif, sehingga tidak akan tergoda untuk melakukan perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Dari pembahasannya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lima peran yang bisa dijalankan orang tua untuk menguatkan pendidikan karakter anak

agar terhindar dari kenakalan remaja adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan agar anak bisa memenuhi tugas-tugas perkembangannya, sebab berdasarkan teori, kenakalan remaja merupakan salah satu efek dari disfungsi tugas-tugas perkembangan tersebut.
2. Memahami psikologi remaja, agar bisa bersikap tepat menghadapi anak-anaknya yang menginjak usia remaja.
3. Menjadi panutan yang baik untuk anak, sebab remaja sedang mengalami masalah krisis identitas.
4. Mengembangkan tiga dimensi karakter: *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* melalui penerapan pola pengondisian operan, yaitu memberi penguatan dan hukuman sesuai dengan kondisi anak.
5. Menerapkan pola asuh yang tepat sesuai kebutuhan anak, yaitu pola asuh otoritatif atau demokratis.
6. Berupaya mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki anak dengan pendekatan kecerdasan majemuk.

Adapun usulan sesuai hasil dan pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Agar lebih terperinci dan mendapatkan bukti-bukti valid, artikel ini bisa dilanjutkan dengan penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Masalah pendidikan karakter dan kenakalan remaja merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Jangan sampai bonus demografi yang terjadi pada bangsa Indonesia berubah menjadi musibah demografi, karena angkatan kerja produktifnya justru menjadi pelaku-pelaku kriminalitas.
2. Pemerintah sebagai pemegang amanah konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu lebih aktif dalam menguatkan peran orang tua dalam pendidikan karakter dan optimalisasi potensi anak. Sekolah bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam memfasilitasi peran orang tua tersebut. Sebagai contoh, sekolah perlu lebih sering melakukan pembinaan bagi orang tua terkait poin-poin penguatan peran yang telah dibahas dalam artikel ini. Kegiatan pembinaan tersebut dapat berupa pelaksanaan seminar *parenting*, diskusi kelompok terpumpun, pelatihan, *family gathering*, dan sebagainya.

PUSTAKA ACUAN

- Attwood, A. I. (2022). A Conceptual Analysis of the Semantic Use of Multiple Intelligences Theory and Implications for Teacher Education. *Frontiers in Psychology*, 13(June). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.920851>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy - The Exercise of Control*. Freeman and Company. <https://doi.org/10.1891/0889-8391.13.2.158>
- Datu, J. (2021). Kenakalan Remaja Klithih yang Mengarah pada Konflik Sosial dan Kekerasan di Yogyakarta. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(2), 129–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>
- Ekowarni. (2016). Kenakalan Remaja: Suatu Tinjauan Psikologi Perkembangan. *Buletin Psikologi*, 1(2), 24–27. <https://doi.org/10.22146/bpsi.13162>
- Erikson, E. (1994). *Identity, Youth and Crisis*. W. W. Norton Company.
- Greene, B. A. (2017). *Self-Efficacy and Future Goals in Education*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315523019>
- Hudiyah, A., Haq, B., Raihana, P. A., & Purwandari, E. (2016). *Exploring Cyberbullying among High School Students in Surakarta*. 2007, 286–295.
- Hurlock, E. B. (2017). *Perkembangan Anak*. Erlangga. www.erlanggaonline.com
- Husnah, Z. (2019). Multiple Intelligence Based-Education Mewujudkan Indonesia sebagai Bangsa Para Juara. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 1(2), 51–65. <https://doi.org/10.23971/mdr.v1i2.1030>
- Jaenudin, U. (2015). *Teori-Teori Kepribadian*. Pustaka Setia.
- Jarvis, M. (2018). *Theoretical Approaches in Psychology (Teori-Teori Psikologi-Terjemah)*. Nusa Media.
- Kartono, K. (2019). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Raja Grafindo Persada.
- King, L. A. (2018). *Psikologi Umum*. Salemba Humanika.
- Lickona, T. (2013). *Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik. Siswa menjadi Pintar dan Baik*. Nusa Media.
- Muhtarom, I. (2021). *10 Tahun Lagi Masa Bonus Demografi, RI Punya 205 Juta Penduduk Usia Produktif*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1464971/10-tahun-lagi-masa-bonus-demografi-ri-punya-205-juta-penduduk-usia-produktif>
- Pebrianti, C. (2022). *266 Remaja di Ponorogo Ajukan Pernikahan Dini karena Hamil Duluan*. Detik.Com 13 Januari 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5895576/266-remaja-di-ponorogo-ajukan-pernikahan-dini-karena-hamil-duluan>
- Perwitasari, N. (2021). *Penyebab Fenomena Klitih Jogja & Cara Mengatasinya Menurut Sosiolog*. Tirto.Id. <https://tirto.id/gmSC>
- Riati, I. (2016). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Karakter Anak Usia Dini. *Infantia*, 4(2), 1–10.
- Safaria, T., Nuqul, F. L., Purwandari, E., Ratnaningsih, I. Z., Khairani, M., Saputra, N. E., Rahmawati, E. I., Esita, Z., Nazriani, D., Miftahudin, M., & Mariati, L. I. (2020). The Role of Dark Triad Personality on Cyberbullying: Is It Still A Problem? *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(02), 4256–4260.
- Samad Umarella, M. A. A. (2019). Implementation of the Theory Multiple Intelligences in Improve Competence of Learners on the Subjects of Islamic Religious Education in SMP Negeri 14 Ambon. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 73. <https://doi.org/10.33477/alt.v4i1.817>
- Santrock, J. W. (2002). *Remaja*. Erlangga.
- Santrock, J. W. (2017). *Psikologi Pendidikan*. Prenada Media. www.erlanggaonline.com
- Sarwono, S. W. (2019). *Pengantar Psikologi Umum*. Raja Grafindo Persada.

- Sugiearto, J., Yunitasri, D., Muslihatinningsih, F., & Purtomo, R. (2021). *Causality Analysis of the Demographic Bonus and the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia*. 6(1), 16–21.
- Syarifah, S. (2019). Konsep Kecerdasan Majemuk Howard Gardner. *SUSTAINABLE: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 2(2), 176–197. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v2i2.987>
- Tambun, L. T. (2021). *27% Pengguna Narkoba dari Kalangan Pelajar dan Mahasiswa*. *Berita Satu*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/news/792291/27-pengguna-narkoba-dari-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa>
- Vitasari. (2013). Pengaruh Pola Asuh Demokratis Orang Tua terhadap Kemampuan Mengemukakan Pendapat Anak di Dusun Losari Randusari Argomulyo Cangkring Sleman. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 45–67.



Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2022